

PERKEMBANGAN TRIWULANAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Masa bergejolak

Oktober 2011



THE WORLD BANK | BANK DUNIA

**PERKEMBANGAN TRIWULANAN
PEREKONOMIAN INDONESIA**
Masa bergejolak

Oktober 2011



THE WORLD BANK | BANK DUNIA

Investing in Indonesia's Institutions

for Inclusive and Sustainable Development

Kata Pengantar

Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia menyajikan perkembangan utama ekonomi Indonesia dalam tiga bulan terakhir. Laporan ini menempatkan perkembangan tersebut dalam konteks jangka panjang dan global, serta memberikan penilaian terhadap prospek ekonomi dan kesejahteraan sosial Indonesia. Laporan ini ditujukan untuk khalayak termasuk pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pelaku pasar keuangan, serta komunitas analis dan profesional yang terlibat dalam ekonomi Indonesia.

Laporan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia ini disusun dan dihimpun oleh tim analisa makroekonomi kantor perwakilan Bank Dunia di Jakarta dan dipimpin oleh Shubham Chaudhuri (Lead Economist) dan Enrique Blanco Armas (Senior Economist): Magda Adriani (harga komoditas), Andrew Blackman (sektor eksternal dan *spillovers* internasional), Andrew Carter (penerimaan pemerintah), David Stephan (ringkasan eksekutif, neraca nasional), Fitria Fitriani (sektor eksternal), Faya Hayati (harga dan risiko), Ahya Ihsan (belanja fiskal dan KPS), dan Ashley Taylor. Tambahan kontribusi diterima dari Anna I. Gueorguieva, Yuliya Makarova dan Wahyoe Soedarmono (belanja daerah), Dwi Endah Abriningrum (KPS), dan Cut Dian Agustina dan Ahmad Zaki Fahmi (Diagnosa Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur). Arsianti dan Ashley Taylor berbagi tugas penyuntingan dan produksi. Enrique Blanco Armas, Mustapha Benmaamar, Alex Drees-Gross, Franz Drees-Gross, Gregorius D.V. Pattinasarany, Djauhari Sitorus, P.S. Srinivas, William Wallace dan Andri Wibisono memberikan komentar dan masukan yang terperinci. Farhana Asnap, Indra Irnawan, Jerry Kurniawan, Nugroho, Marcellinus Winata dan Randy Salim mengatur diseminasi dan Titi Ananto, Sylvia Njotomihardjo dan Nina Herawati memberikan bantuan administrasi.

Untuk mendapatkan lebih banyak analisa Bank Dunia terhadap ekonomi Indonesia:

Untuk informasi mengenai Bank Dunia serta kegiatannya di Indonesia, silakan berkunjung ke website ini www.worldbank.org/id

Untuk mendapatkan publikasi terkait melalui e-mail, silakan menghubungi madriani@worldbank.org. Untuk pertanyaan dan saran berkaitan dengan publikasi ini, silakan menghubungi ataylor2@worldbank.org.

Daftar isi

Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif: Masa bergejolak	viii
A. PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL TERKINI	1
1. Kembali menurunnya pertumbuhan global dan meningkatnya gejolak pasar...	1
2. Ketidakpastian telah meningkat disekitar <i>outlook</i> dasar dari pertumbuhan domestik yang kuat	4
3. Aliran masuk modal tetap kuat pada triwulan dua sementara surplus perdagangan menurun	6
4. Gejolak internasional belakangan ini mempengaruhi pasar keuangan Indonesia	8
5. Inflasi IHK terus turun dengan melambatnya guncangan inflasi pangan	10
6. Tingkat kemiskinan tahunan nasional Indonesia turun pada bulan Maret 2011	12
7. Defisit tahun 2011 direvisi naik karena pengeluaran yang lebih besar untuk subsidi energi	13
8. Seperti kondisi ekonomi global, risiko jangka pendek terhadap outlook Indonesia meningkat	18
B. BEBERAPA PERKEMBANGAN TERBARU PEREKONOMIAN INDONESIA	19
1. Potensi pengaruh penurunan <i>outlook</i> dunia terhadap Indonesia	19
a. Memikirkan beberapa potensi skenario yang berkaitan dengan ekonomi global	19
b. Bagaimana guncangan internasional dapat ditransmisikan ke Indonesia?	21
c. Potensi dampak jangka pendek terhadap ekonomi Indonesia	24
d. Peran kebijakan pendukung dan pentingnya menghindari kesalahan kebijakan	26
e. Kembalinya aliran masuk modal pada jangka menengah memberikan insentif lebih lanjut untuk meneruskan kemajuan pada reformasi struktural utama	26
2. Menggunakan KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta) untuk menangani tantangan infrastruktur Indonesia	27
a. KPS merupakan fokus dalam agenda pembangunan Indonesia	27
b. Kemajuan telah dicapai dalam membangun kerangka aturan dan kelembagaan bagi KPS, tetapi pelaksanaan masih menjadi tantangan utama	27
c. Pengalaman internasional memberikan pelajaran bagi keberhasilan penerapan KPS	31
d. Jalan ke depan	32
C. INDONESIA 2014 DAN SETERUSNYA: PANDANGAN SELEKTIF	34
1. Belanja Daerah Tidak Menunjukkan Hasil	34
a. Belanja pemerintah daerah telah meningkat pesat selama satu dekade terakhir	34
b. Hasil-hasil pembangunan tidak menunjukkan pola yang seragam	37
c. Pelayanan publik bisa meningkat dengan efisiensi dan prioritas yang lebih baik	38
d. Apa yang mendorong ketidakefisienan belanja dan kurangnya kualitas pelayanan publik?	40
e. Catatan penutup	42
2. Identifikasi hambatan-hambatan untuk pertumbuhan inklusif di Jawa Timur	43
a. Kinerja ekonomi Jawa Timur	43
b. Menelusuri hambatan-hambatan pertumbuhan inklusif di Jawa Timur	44
c. Pilihan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan inklusif yang lebih tinggi di Jawa Timur	49
LAMPIRAN: GAMBARAN EKONOMI INDONESIA	50

DAFTAR GRAFIK

Gambar 1: Keprihatinan pasar terhadap keberlanjutan fiskal zona Euro telah meningkat	1
Gambar 2: Pertumbuhan mitra dagang utama Indonesia melemah	2
Gambar 3: Permasalahan yang dihadapi negara maju telah menurunkan <i>outlook</i> pertumbuhan global.....	2
Gambar 4: Pasar ekuitas jatuh dengan tajam dan volatilitas meningkat.....	3
Gambar 5: ... dan investor telah beralih kepada aset yang lebih aman seperti obligasi AS	3
Gambar 6: Penurunan harga komoditas global telah terpusat pada bahan-bahan metal dan dasar	3
Gambar 7: Pertumbuhan PDB triwulanan bertahan pada 6,5 persen pada triwulan kedua tahun 2011.....	4
Gambar 8: ...didorong oleh ekspor bersih, konsumsi swasta dan investasi	4
Gambar 9: Aliran masuk neraca keuangan meningkat pada triwulan 2/ 2011 tetapi surplus neraca berjalan menurun.....	7
Gambar 10: Harga aset turun tajam pada bulan September... ..	8
Gambar 11: ...turun dari tingkat yang tinggi	8
Gambar 12: Penurunan besar terhadap ekuitas Indonesia tetapi sama dengan yang dialami oleh negara lainnya di kawasan	9
Gambar 13: ...sementara depresiasi Rupiah relatif terbatas dibandingkan dengan negara lainnya di kawasan	9
Gambar 14: Aliran portfolio berbalik arah dengan tajam di bulan Agustus dan September	9
Gambar 15: Inflasi telah menurun pada tahun 2011 tetapi merangkak naik di bulan Agustus.....	11
Gambar 16: ...dengan meningkatnya inflasi bulanan, sebagian karena meningkatnya inflasi inti.....	11
Gambar 17: Kemiskinan nasional Indonesia turun di 2011	12
Gambar 18: Lemahnya pencairan pada program-program inti dan lebih tingginya pengeluaran subsidi energi terus berlanjut	14
Gambar 19: Belanja modal telah meningkat antara bulan Juni dan Agustus, tetapi masih berada di bawah tingkat tahun yang lalu... ..	14
Gambar 20: Belanja infrastruktur pemerintah pusat untuk transportasi, energi dan irigasi menurun di tahun 2010	15
Gambar 21: Skenario untuk outlook eksternal termasuk berlanjutnya gejolak pasar keuangan sampai penurunan tajam pertumbuhan ekonomi global	20
Gambar 22: Potensi aliran keluar dana asing makin meningkat seiring dengan makin besarnya cadangan devisa	24
Gambar 23: Investasi infrastruktur swasta Indonesia hanya pulih sebagian sejak krisis tahun 1997-98.....	28
Gambar 24: ...dan tetap relatif rendah dibanding ekonomi berkembang lainnya, terutama Brasil dan India.....	28
Gambar 25: Realisasi proyek KPS di Indonesia sangat tertinggal dari rencana yang diumumkan.....	30
Gambar 26: Pemerintah daerah mengelola lebih dari setengah dari seluruh belanja pemerintah pada sektor-sektor utama.....	34
Gambar 27: Belanja pemerintah daerah sama dengan belanja inti pemerintah pusat.....	35
Gambar 28: Transfer pemerintah pusat, terutama DAU, mendanai sebagian besar pendapatan pemerintah daerah	35
Gambar 29: Korelasi yang tidak signifikan antara peningkatan belanja dan peningkatan hasil pelayanan publik	38
Gambar 30: Walaupun belanja untuk infrastruktur telah meningkat, belanja untuk administrasi pemerintahan masih menjadi bagian terbesar belanja pemerintah daerah	39
Gambar 31: Beberapa daerah dapat menyampaikan hasil yang jauh lebih tinggi pada tingkat input yang serupa	40
Gambar 32: Belanja kepegawaian yang tinggi pada tingkat pemerintah daerah didorong oleh sektor aparat pemerintahan dan pendidikan	41
Gambar 33: Laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur mengikuti laju pertumbuhan nasional pada beberapa tahun terakhir	44
Gambar 34: Contoh kerangka pemeriksaan pertumbuhan HRV	45
Gambar 35: Pada tahun 2008, sepertiga jalan kabupaten/kota di Jawa Timur dalam kondisi buruk dan sangat buruk.....	46
Gambar 36: Angkatan kerja per pencapaian pendidikan di tahun 2009	47
Gambar 37: Pajak dan Retribusi Daerah relatif rendah di Jawa Timur.....	48

DAFTAR GRAFIK LAMPIRAN

Gambar lampiran 1: Pertumbuhan PDB triwulanan dan tahunan.....	50
Gambar lampiran 2: Kontribusi terhadap PDB (pengeluaran)	50
Gambar lampiran 3: Kontribusi terhadap PDB (sektor)	50
Gambar lampiran 4: Penjualan sepeda motor dan mobil (<i>unit</i>)	50
Gambar lampiran 5: Indikator konsumen.....	50
Gambar lampiran 6: Indikator kegiatan industri	50
Gambar lampiran 7: Aliran perdagangan riil.....	51
Gambar lampiran 8: Neraca pembayaran.....	51
Gambar lampiran 9: Neraca perdagangan	51
Gambar lampiran 10: Cadangan devisa dan dana modal asing.....	51
Gambar lampiran 11: Term of trade dan implisit ekspor- impor berdasarkan chained Fisher- Price indices	51
Gambar lampiran 12: Inflasi dan kebijakan moneter.....	51
Gambar lampiran 13: Rincian tingkat harga konsumen	52
Gambar lampiran 14: Tingkat inflasi negara tetangga.....	52
Gambar lampiran 15: Harga beras domestik dan internasional.....	52
Gambar lampiran 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran	52
Gambar lampiran 17: Indeks saham regional	52
Gambar lampiran 18: Indeks spot dolar dan rupiah.....	52
Gambar lampiran 19: Yield obligasi pemerintah 5 tahunan mata uang lokal	53
Gambar lampiran 20: Spread EMBI obligasi pemerintah dengan obligasi dollar amerika	53
Gambar lampiran 21: Tingkat kredit bank umum	53
Gambar lampiran 22: Indikator keuangan sektor perbankan	53
Gambar lampiran 23: Hutang pemerintah	53
Gambar lampiran 24: Hutang luar negeri	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Dalam skenario dasar pertumbuhan diproyeksikan akan melambat di tahun 2012	ix
Tabel 2: Proyeksi dasar pertumbuhan PDB tahun 2011 diturunkan, risiko di sekitar <i>outlook</i> meningkat	6
Tabel 3: Aliran masuk neraca pembayaran diperkirakan menurun di tahun 2011 dan 2012 pada skenario dasar	7
Tabel 4: Proyeksi defisit tahun 2011 telah direvisi naik, terutama karena peningkatan pengeluaran subsidi energi.....	17
Tabel 5: Skenario berbeda ekonomi global dapat mengakibatkan berbagai dampak terhadap perekonomian Indonesia	21
Tabel 6: Perlambatan yang terjadi di AS dan Eropa menpengaruhi Indonesia baik langsung dan tak langsung melalui perannya sebagai “pemasok” bahan baku dari mitra dagang lainnya	22
Tabel 7: Industri manufaktur paling terpengaruh langsung terhadap AS dan Uni Eropa sementara komoditas lebih bergantung pada permintaan regional	22
Tabel 8: Penurunan ekonomi global yang parah akan menyebabkan penurunan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi domestik	25
Tabel 9: Nilai proyek yang siap ditawarkan mencapai setengah dari rencana proyek KPS Indonesia untuk tahun 2011	29
Tabel 10: Bagian Jawa Timur dalam total investasi swasta nasional masih tetap rendah.....	44

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Tabel lampiran 1: Realisasi dan estimasi anggaran belanja pemerintah	54
Tabel lampiran 2: Neraca Pembayaran.....	54

DAFTAR KOTAK

Kotak 1: Potensi manfaat KPS bagi penyampaian layanan infrastruktur.....	27
Kotak 2: Pengalaman KPS di India.....	32
Kotak 3: Mekanisme transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang kini berlaku di Indonesia.....	36
Kotak 4: Pengantar singkat kerangka diagnosis pertumbuhan inklusif	45

SINGKATAN DAN AKRONIM

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	MP3EI	: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	MSME	: <i>Micro, Small, and Medium-sized enterprises</i> (Usaha Kecil dan Menengah Mikro)
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan	MTP	: <i>Major Trading Partners</i> (Mitra Perdagangan Utama)
BAPPEDA	: Badan Perencana Pembangunan Daerah	LHS	: <i>Left Hand Side</i> (Sisi kiri)
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
BI	: Bank Indonesia	LPEM	: Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah	NER	: <i>Net Enrollment Rate</i> (Rasio Penerimaan Murid)
BPS	: Badan Pusat Statistik	O&M	: Operasi dan Pemeliharaan
BULOG	: Badan Urusan Logistik	PDB	: Produk Domestik Bruto
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara	PMA	: Penanaman Modal Asing
CPI	: <i>Consumer Price Index</i> (Indeks Harga Konsumer)	PODES	: Poliklinik Desa
DAK	: Dana Alokasi Khusus	PPP	: <i>Public Private Partnership</i>
DAU	: Dana Alokasi Umum	R-APBN	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
DBH	: Dana Bagi Hasil	RHS	: <i>Right Hand Side</i> (Sisi Kanan)
DEKON/TP	: Dana Dekosentisasi dan Tugas Pembantuan	RMU	: <i>Risk Management Unit</i>
DID	: Dana Insentif Daerah	Rp	: Rupiah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
EU	: <i>European Union</i> (Uni Eropa)	SBI	: Sertifikat Bank Indonesia
FY	: <i>Fiscal Year</i> (Tahun Fiskal)	SD	: Sekolah Dasar
HRV	: Hausmann, Rodrik dan Velasco	SIKD	: Sistem Informasi Keuangan Daerah
IEQ	: <i>Indonesia Economic Quarterly</i>	SMP	: Sekolah Menengah Pertama
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>	SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
KemenKeu	: Kementerian Keuangan	SMU	: Sekolah Menengah Umum
KKPPI	: Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur	SUNs	: Surat Utang Negara
KPPOD	: Komite Pengawasan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Susenas	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
KPS	: Kerjasama Pemerintah Swasta	UKP4	: Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
KUR	: Kredit Usaha Rakyat	UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
LARF	: <i>Land Acquisition Revolving Fund</i> (Dana Bergulir Pembebasan Lahan)	US	: <i>United States</i> (Amerika Serikat)
LDR	: <i>Loan to Deposit Ratio</i> (Rasio Pinjaman terhadap Simpanan)	USD	: <i>United States Dollar</i> (dolar Amerika Serikat)
MoF	: <i>Ministry of Finance</i> (Kementerian Keuangan)	WB	: <i>World Bank</i> (Bank Dunia)

Ringkasan Eksekutif: Masa bergejolak

Bagaimana dampak penurunan *outlook* ekonomi dan keuangan global terhadap Indonesia?

Peristiwa-peristiwa di dunia internasional mendominasi perkembangan ekonomi Indonesia selama triwulan terakhir. Prospek pertumbuhan global telah melemah dan krisis hutang pemerintah di zona Euro telah meningkat. Gejolak pasar dan penghindaran risiko di dunia internasional juga telah meningkat, walaupun masih berada jauh di bawah kondisi pada akhir tahun 2008. Pasar-pasar saham berjatuh dan negara ekonomi berkembang utama (*emerging markets*) mengalami aliran keluar modal, memberikan tekanan terhadap nilai tukar mata uang mereka. Kinerja perekonomian domestik Indonesia tetap kuat, tetapi seperti di negara lainnya di kawasan, pasar keuangan Indonesia juga tidak kebal terhadap gejolak saat ini. Pada tanggal 22 September indeks harga saham dalam negeri merosot tajam sebesar 8,9 persen, penurunan harian terbesar sejak bulan Oktober 2008, dan saham dan obligasi yang dimiliki investor asing juga telah berkurang. Melihat ke depan, pertanyaannya adalah bagaimana kondisi yang semakin memburuk dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akan mempengaruhi perekonomian Indonesia dalam jangka pendek?

Dalam jangka pendek gejolak pasar keuangan internasional diperkirakan akan berlanjut tetapi juga ada risiko terjadinya skenario penurunan yang lebih besar walaupun kemungkinannya lebih kecil

Bagaimana perkembangan di AS, zona Euro dan Cina akan menjadi penentu utama terhadap tipe dan skala pengaruh eksternal yang akan dihadapi Indonesia dalam jangka pendek. Masih terus berkembangnya penyelesaian krisis hutang zona Euro, berlanjutnya gejolak dan volatilitas keuangan, dan melemahnya harga-harga komoditas, tampaknya akan menjadi skenario dasar (*baseline*). Gejolak ini dapat menghilangkan secara perlahan bila ada tindak kebijakan yang mendukung, yang mendorong kepercayaan, investasi dan pertumbuhan. Tetapi juga terdapat risiko terjadinya peristiwa negatif yang lebih besar, seperti kacau-balaunya penyelesaian krisis zona Euro yang dapat memicu krisis keuangan internasional, serupa seperti yang terjadi pada akhir tahun 2008. Karena banyak negara hanya memiliki respon kebijakan yang terbatas, maka pertumbuhan, perdagangan dan harga komoditas global tampaknya akan mengalami penurunan lebih lanjut. Dalam skenario ekstrim hal ini dapat menyebabkan perlambatan yang cukup besar terhadap pertumbuhan global jika ekonomi-ekonomi berkembang utama seperti Cina dan India tidak mendukung permintaan global, seperti yang mereka lakukan di tahun 2009, tetapi sebaliknya mereka juga mengalami penurunan pertumbuhan yang cukup besar (*hard landing*).

Indonesia memasuki periode meningkatnya ketidakpastian dengan posisi yang relatif kuat...

Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh domestik, posisi fiskal yang kokoh, akumulasi cadangan devisa dan kinerja sektor keuangan yang kuat, membuat Indonesia berada pada posisi yang relatif baik untuk menghadapi guncangan eksternal yang timbul dari skenario-skenario di atas. Meningkatnya ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan tanggapan kebijakan yang kuat, telah dilakukan pada waktu krisis tahun 2008-09.

...dengan kinerja pertumbuhan ekonomi yang kuat akhir-akhir ini dan rendahnya inflasi,...

Pertumbuhan PDB pada triwulan 2/2011 tidak berubah dari triwulan 1 sebesar 6,5 persen tahun-ke-tahun. Investasi dan konsumsi swasta tetap kuat. Sektor *non-tradable* terus menjadi pendorong pertumbuhan dan pertumbuhan manufaktur juga bergerak di atas 6 persen tahun-ke-tahun pada triwulan 2 untuk pertama kali dalam enam tahun. Dengan penurunan harga bahan pangan, inflasi IHK bergerak turun menjadi 4,8 persen di bulan Agustus 2011. Walaupun tingginya harga-harga bahan pangan beberapa waktu lalu berdampak negatif terhadap konsumen pangan bersih (*net food consumers*), kuatnya ekonomi dalam negeri berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan nasional menjadi 12,5 persen di bulan Maret 2011, dari 13,3 persen tahun sebelumnya.

...posisi fiskal yang kuat,...

Tingkat hutang pemerintah Indonesia terhadap PDB relatif rendah, sekitar 25 persen, dan dengan kecenderungan menurun. Hal ini jauh berbeda dengan memburuknya posisi fiskal banyak negara lainnya sejak tahun 2008. Defisit diperkirakan akan turun dari 2,1 persen dari PDB di APBN-P tahun 2011 menjadi 1,5 persen di R-APBN tahun 2012. Pengeluaran untuk subsidi energi masih rentan terhadap peningkatan harga minyak, seperti terlihat dari kenaikan defisit dalam APBN-P tahun 2011 terhadap defisit APBN awal dari 1,8 persen dari PDB. Akan tetapi, belanja inti, terutama untuk infrastruktur, masih terhambat oleh masalah pencairan. Posisi pembiayaan fiskal juga tampaknya akan mampu menghadapi gejolak pasar dalam jangka pendek, setelah adanya kelebihan pembiayaan di tahun 2010 dan pra-pembiayaan selama tahun 2011.

...akumulasi cadangan devisa dari tingginya aliran masuk neraca pembayaran selama tahun 2010 dan paruh pertama tahun 2011,...

Memasuki gejala pasar di bulan September, cadangan devisa Indonesia sebesar 125 miliar dolar Amerika merupakan lebih dari dua kali lipat nilai di bulan Agustus 2008. Jumlah aliran masuk neraca pembayaran kembali mencatat nilai yang tinggi pada triwulan kedua tahun 2011, yang berasal dari tingginya aliran masuk neraca keuangan. Selain aliran masuk portofolio, PMA juga menunjukkan tren yang meningkat. Akan tetapi surplus neraca berjalan telah mengecil, walaupun hanya disebabkan oleh melebarnya defisit pendapatan.

...dan menguatnya kinerja sektor keuangan

Kinerja sektor keuangan Indonesia akhir-akhir ini juga menjadi penyangga terhadap ketidakstabilan pasar keuangan. Sebagian dari hal ini disebabkan oleh upaya-upaya untuk menerapkan dan menegakkan perbaikan pada keseluruhan kerangka peraturan dan pemantauan. Kecukupan modal sektor perbankan cukup tinggi dan kredit macet telah menurun. Sistem perbankan juga memiliki likuiditas yang tinggi tetapi harus terus dipantau karena bank-bank tidak memiliki tingkat likuiditas yang sama.

Perkembangan internasional akan mempengaruhi prospek pertumbuhan jangka pendek Indonesia, melalui dampaknya terhadap permintaan eksternal, harga komoditas dan aliran modal

Goncangan-goncangan internasional dapat berdampak terhadap Indonesia melalui berbagai jalur, termasuk jalur perdagangan. Dampak langsung perdagangan Indonesia terhadap AS dan Uni Eropa memang terbatas tetapi dampak tidak langsung kepada Indonesia melalui mitra perdagangan lainnya dapat menjadi lebih signifikan. Jatuhnya harga komoditas dunia dan merosotnya permintaan dari ekonomi-ekonomi berkembang utama, terutama Cina, merupakan mekanisme transmisi lainnya yang dapat mempengaruhi ekspor dan juga neraca fiskal, investasi dalam negeri, konsumsi dan inflasi.

Seperti disoroti di atas, pengaruh krisis keuangan terhadap Indonesia telah terlihat. Dampak aliran keluar modal portofolio terhadap Indonesia telah meningkat sejalan dengan peningkatan cadangan devisa dalam beberapa tahun terakhir. Volume dan arah aliran portofolio, dan biaya pembiayaan bagi Pemerintah dan perusahaan Indonesia, memiliki kepekaan terhadap sentimen investor asing dan juga terhadap situasi ekonomi dan kebijakan domestik. Hal serupa juga berlaku untuk PMA, daya tarik Indonesia sebagai tujuan PMA mungkin masih bertahan tetapi berlanjutnya kelemahan kondisi perusahaan di negara-negara asal kemungkinan dapat mempengaruhi aliran modal masuk.

Proyeksi pertumbuhan skenario dasar Bank Dunia untuk tahun 2012 telah diturunkan menjadi 6,3 persen

Dalam skenario dasar (*baseline*) dengan berlanjutnya gejala pasar internasional, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan Indonesia sebesar 6,4 persen di tahun 2011 dan sedikit melambat di tahun 2012 menjadi 6,3 persen (Tabel 1). Angka pertumbuhan tahun 2012 telah diturunkan dari 6,7 persen dalam Triwulan edisi Juni karena melemahnya pertumbuhan negara-negara mitra dagang utama dan harga komoditas, tetapi masih berada pada tingkat yang kuat. Dibawah skenario yang lebih pesimistis termasuk terjadinya krisis keuangan internasional yang dalam dan terus melemahnya permintaan eksternal, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan turun ke sekitar 5,5 persen. Akhirnya, dalam skenario yang lebih ekstrim dimana krisis menyebabkan turunnya pertumbuhan global secara signifikan dimana Cina dan India juga menghadapi penurunan pertumbuhan yang besar, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2012 dapat merosot tajam, walaupun diproyeksikan masih berada di atas 4 persen.

Tabel 1: Dalam skenario dasar pertumbuhan diproyeksikan akan melambat di tahun 2012

		2009	2010	2011	2012
Produk domestik bruto	(Persen perubahan tahunan)	4,6	6,1	6,4	6,3
Indeks harga konsumen*	(Persen perubahan tahunan)	2,6	6,3	5,0	5,5
Defisit anggaran**	(Persen PDB)	-1,6	-0,6	-2,1	-1,5
Pertumbuhan mitra dagang utama	(Persen perubahan tahunan)	-1,0	6,6	3,3	3,9

Catatan: * laju inflasi triwulan 4 ke triwulan 4. ** Angka 2011 adalah APBN-P dan 2012 adalah RAPBN

Sumber: Kementerian Keuangan, BPS lewat CEIC, Consensus Forecasts Inc., dan Bank Dunia

Tanggapan kebijakan yang kuat dan konsisten dapat membatasi pengaruh guncangan eksternal dan mengurangi dampaknya

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menghadapi aliran keluar modal, termasuk pembelian obligasi dalam negeri. Upaya-upaya terdahulu termasuk memperpanjang rata-rata waktu jatuh tempo dan periode kepemilikan minimum dari Sertifikat Bank Indonesia. BI juga menetapkan serangkaian kebijakan kehati-hatian makro. Ruang untuk stimulus fiskal juga sudah tersedia, bila dibutuhkan, tetapi tambahan belanja dapat terhambat oleh masalah pencairan. Namun demikian, kokohnya fundamental ekonomi makro Indonesia dan kebijakan yang ada merupakan beberapa pertahanan yang paling kuat untuk menghadapi guncangan saat ini dan masa depan. Penguatan lebih lanjut terhadap kemampuan pemerintah untuk menangani risiko-risiko akan membawa manfaat. Dalam gejolak yang terjadi sekarang menghindari kebijakan-kebijakan yang tidak pasti menjadi lebih penting, terutama yang berkaitan dengan perubahan dalam pembatasan investasi luar negeri dan kerangka peraturan dan pemerintahan.

Menjaga kemajuan reformasi untuk meningkatkan iklim investasi, infrastruktur dan pelayanan publik juga dapat membantu mendorong kepercayaan investor dan meningkatkan *outlook* pertumbuhan jangka menengah Indonesia

Fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan proyeksi bagi pertumbuhan jangka menengah pada kisaran 6,5 persen atau lebih masih tetap bertahan. Keberlanjutan kemajuan reformasi struktural, seperti reformasi subsidi energi, pembebasan tanah dan pembiayaan infrastruktur, merupakan kunci untuk menggerakkan laju potensi pertumbuhan lebih tinggi dan juga dapat memainkan peran penting dalam memelihara kepercayaan investor dalam jangka pendek.

Edisi Triwulanan ini memiliki sejumlah pembahasan tentang masalah-masalah jangka menengah tersebut. Yang pertama membicarakan bagaimana kerangka Kerjasama Pemerintah-Swasta di Indonesia dan bagaimana penerapannya dapat diperkuat sehingga dapat membantu Pemerintah untuk mencapai sasarannya terhadap investasi infrastruktur sektor swasta. Yang kedua membahas peran penting pemerintah daerah dalam penyampaian layanan publik pada bidang-bidang seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan dan keterbatasan efisiensi belanja daerah. Yang terakhir membicarakan tantangan utama pembangunan bagaimana menjadikan pertumbuhan menjadi lebih inklusif, dan juga lebih tinggi, dengan fokus pada analisis di propinsi Jawa Timur.

A. PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL TERKINI

1. Kembali menurunnya pertumbuhan global dan meningkatnya gejala pasar...

Lingkungan perekonomian global telah melemah dengan signifikan sepanjang triwulan lalu dan semakin bertambahnya ketidakpastian ...

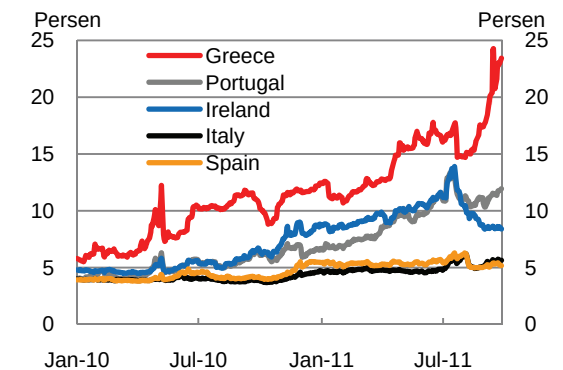
Triwulan yang lalu ditandai dengan meningkatnya dan meluasnya krisis hutang negara – negara zona Eropadan melemahnya *outlook* pertumbuhan ekonomi AS dan Uni Eropa dan juga beberapa negara – negara berkembang utama lainnya.. Kesehatan sektor perbankan Eropa masih mengkhawatirkan, sementara biaya pembiayaannya semakin tinggi. Ketidakpastian kebijakan, terutama yang berkaitan dengan respon terhadap krisis hutang di zona Eropa serta kebijakan fiskal di AS (seperti terlihat pada negosiasi batas atas hutang federal), memperkeruh kondisi jangka pendek dan memberikan sentimen negatif kepada para investor. Gejala di pasar keuangan meningkat tajam selama kurun triwulan lalu. Penjualan saham besar-besaran yang mencerminkan tingginya penghindaran risiko telah memicu pelarian modal ke instrumen yang lebih aman. Harga – harga komoditas di pasaran dunia juga menurun, terutama untuk bahan-bahan baku.

Pertanyaan bagaimana kondisi yang semakin memburuk ini *outlook* global dapatberdampak terhadap Indonesia merupakan tema utama dari Laporan Triwulanan kali ini. Untuk memberi gambaran umum, bagian ini mencoba menguraikan dengan singkat tentang perkembangan-perkembangan terkini, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi dari negara-negara mitra dagang utama Indonesia, perkembangan harga – harga komoditas dunia, dan aliran dana portfolio internasional.

...yang didorong oleh kekhawatiran meningkatnya ketidakpastian atas penyelesaian krisis hutang di zona Eropa dan implikasinya terhadap sektor perbankan Eropa...

Kekhawatiran terhadap penerapan reformasi fiskal dan prospek pertumbuhan di Yunani dan negara – negara di zona Eropa lainnya telah meningkat (Gambar 1). Kekhawatiran akan kondisi fiskal, telah mempengaruhi risiko kredit perbankan yang menyimpan sejumlah besar obligasi negara zona Eropa. Biaya pendanaan perbankan di zona ini juga makin meningkat. Menghadapi situasi ini, negara-negara anggota Euro telah bersepakat untuk menambah paket dana talangan bagi Yunani di akhir bulan Juli lalu dan mengucurkan uang kepada komite Pengendalian Fasilitas Keuangan Eropa, atau yang lebih dikenal sebagai *European Financial Stability Facility (EFSF)*. Pada bulan Juli disetujui bahwa, tergantung dari ratifikasi atau prosedur pengesahan di masing-masing negara, EFSF dapat, jika dibutuhkan, memberikan penyalangan pendanaan siaga, memberikan pinjaman kepada negara-negara bukan anggota dengan tujuan merekapitalisasi lembaga-lembaga keuangan, dan untuk mengintervensi pasar hutang sekunder pada kondisi-kondisi tertentu. Namun demikian, kekhawatiran pasar masih besar terhadap respon kebijakan krisis hutang dan potensi keputusan yang menimbulkan kekacauan.

Gambar 1: Keprihatinan pasar terhadap keberlanjutan fiskal zona Euro telah meningkat (imbal hasil obligasi pemerintah 10-tahunan, persen)



Sumber: Datastream

Eropa, atau yang lebih dikenal sebagai *European Financial Stability Facility (EFSF)*. Pada bulan Juli disetujui bahwa, tergantung dari ratifikasi atau prosedur pengesahan di masing-masing negara, EFSF dapat, jika dibutuhkan, memberikan penyalangan pendanaan siaga, memberikan pinjaman kepada negara-negara bukan anggota dengan tujuan merekapitalisasi lembaga-lembaga keuangan, dan untuk mengintervensi pasar hutang sekunder pada kondisi-kondisi tertentu. Namun demikian, kekhawatiran pasar masih besar terhadap respon kebijakan krisis hutang dan potensi keputusan yang menimbulkan kekacauan.

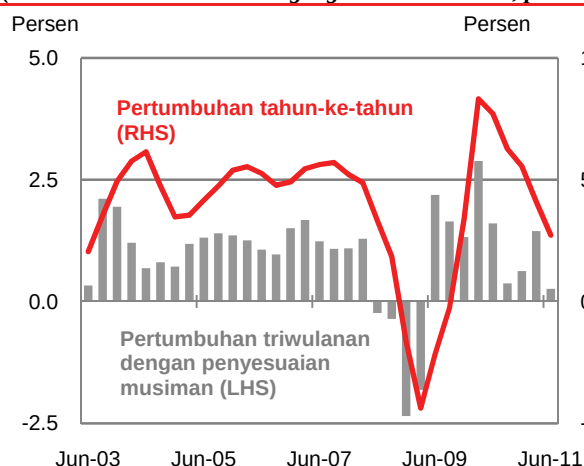
... seiring dengan menurunnya *outlook* pertumbuhan, terutama di negara – negara maju...

Outlook pertumbuhan ekonomi bagi negara – negara berpenghasilan tinggi menurun menyusul melemahnya perekonomian di triwulan 2/ 2011, sejalan dengan revisi penurunan pertumbuhan sebelumnya. Sebagai contoh, menjelang akhir bulan Juni, perkiraan resmi pertumbuhan AS pada triwulan 1/2011 telah diturunkan menjadi 0,4 persen dari level sebelumnya 1,9 persen. Dampak gempa bumi dan tsunami masih membebani pertumbuhan di Jepang. Mengikuti hasil pertumbuhan di triwulan satu yang sangat kuat, perlambatan pertumbuhan juga terjadi di negara berkembang utama (*emerging economies*) di Asia Timur. Faktor-faktor tersebut menjadi pendorong melambatnya pertumbuhan negara – negara mitra dagang utama Indonesia (Gambar 2).

Beberapa prediksi dan indikator parsial mengarahkan pada perlemahan kegiatan ekonomi di paruh kedua tahun 2011. Hal ini disebabkan oleh faktor hutang dan dampak riil dari upaya pengetatan fiskal yang membayangi pertumbuhan di Eropa serta kepercayaan konsumen yang terus menurun di AS. Indeks Indikator Utama Gabungan (Composite Leading Indicators Indices) dari OECD memperlihatkan adanya momentum perlambatan pertumbuhan di pasar negara maju maupun berkembang. Dalam laporan IMF September 2011 World Economic Outlook menurunkan proyeksi pertumbuhan AS sekitar satu poin persentase relatif untuk tahun 2011 dan 2012 relatif terhadap proyeksi bulan Juni 2011. Ramalan terhadap zona Eropa diturunkan sekitar satu setengah poin persentase (Gambar 3). Sementara, pertumbuhan untuk negara ekonomi berkembang dan negara berkembang utama (*emerging economies*) juga ikut diturunkan, walau masih berada di atas 6 persen. Dengan kontribusi Cina yang masih menjadi sentral terhadap pertumbuhan dunia dan permintaan komoditas, isyarat perlemahan apapun pada kegiatan industri manufaktur Cina terus dicermati dengan sangat hati-hati.

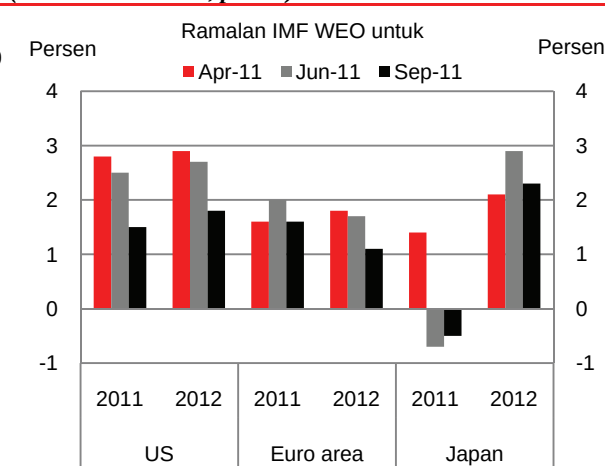
Gambar 2: Pertumbuhan mitra dagang utama Indonesia melemah

(Pertumbuhan PDB mitra dagang utama Indonesia, persen)



Gambar 3: Permasalahan yang dihadapi negara maju telah menurunkan outlook pertumbuhan global

(Pertumbuhan PDB, persen)



Catatan: Rangkaian MTP disusun dari tingkat pertumbuhan dengan bobot bagian ekspor nominal Indonesia tahun 2010

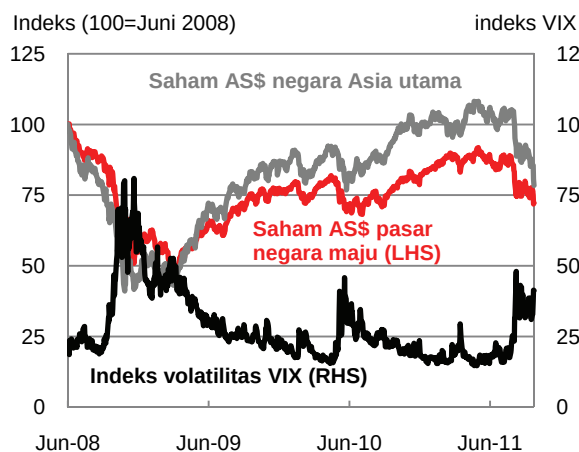
Sumber: CEIC dan Bank Dunia

Sumber: IMF World Economic Outlook (beraneka)

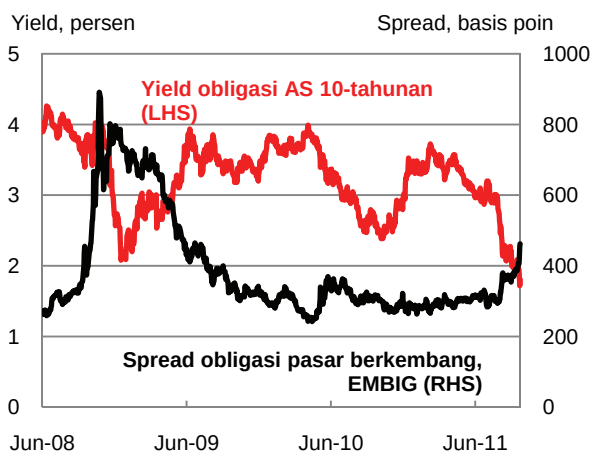
Pasar saham dunia merosot tajam dengan meningkatnya aksi penghindaran risiko

Pasar-pasar keuangan telah diterjang oleh perkembangan-perkembangan di atas pada triwulan terakhir, walaupun tingkat tekanan pasar keuangan masih jauh dari yang dicatat pada akhir tahun 2008. Indeks VIX yang mengukur volatilitas pasar saham meningkat sekitar dua kali lipat dari pertengahan bulan Juni ke pertengahan September (Gambar 4). Dengan meningkatnya motivasi menghindari risiko, para investor beraksi dengan memindahkan aset-aset mereka yang berisiko ke instrumen yang lebih aman. Dari tanggal 15 Juni hingga 27 September saham di pasar negara maju merosot sebesar 11,2 persen dalam nilai dolar Amerika. Imbal hasil (*yields*) untuk obligasi 10-tahunan pemerintah AS turun sekitar 1 poin persentase menjadi sedikit di bawah 2 persen.

Negara-negara berkembang utama (*emerging markets*) juga tak luput dari badai ini. Saham-saham negara berkembang Asia turun sebesar 21,3 persen dalam nilai dolar Amerika dari tanggal 15 Juni hingga 27 September. Rata-rata *spread* pada *spread* obligasi mereka meningkat dari 130 basis poin menjadi 450 basis poin dan terjadi peningkatan tingkat *credit default swap* lintas bursa. Penerbitan modal baru ke negara-negara berkembang turun di bulan Juli dan Agustus dan tercatat aliran modal keluar yang signifikan dari pasar negara berkembang, termasuk di Indonesia, seperti dibahas di bawah ini.

Gambar 4: Pasar ekuitas jatuh dengan tajam dan volatilitas meningkat...**(Indeks saham US\$; indeks volatilitas saham VIX)**

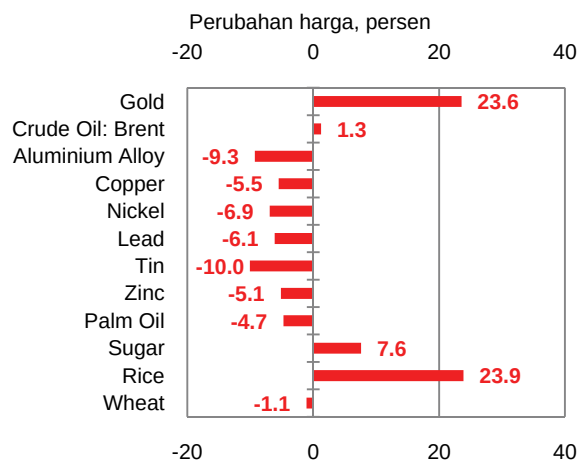
Catatan: Indeks VIX mengukur perkiraan volatilitas 30-hari dari indeks S&P 500 index seperti ditunjukkan oleh harga kontrak pilihan. Saham adalah indeks MSCI
Sumber: Datastream dan Bank Dunia

Gambar 5: ... dan investor telah beralih kepada aset yang lebih aman seperti obligasi AS**(yield, persen; spread obligasi negara AS, basis poin)**

Catatan: EMBIG adalah JP Morgan Emerging Bond Index Global.
Sumber: Datastream

Harga – harga komoditas juga turut berjatuh, terutama komoditas yang dijadikan sebagai input industri manufaktur ataupun investasi

Harga – harga komoditas turun dikarenakan perkembangan di atas. Pada bulan Agustus indeks harga komoditas non-migas dalam dolar Amerika dari Bank Dunia turun sebesar 1,6 persen sementara harga-harga energi menurun sebesar 6,3 persen. Untuk beberapa komoditas pilihan, penurunan harga komoditas metal cenderung turun lebih besar dari pada komoditas lainnya di bulan Juni ke September (Gambar 6), yang mencerminkan jatuhnya optimisme untuk *outlook* manufaktur dan investasi. Satu pengecualian adalah peningkatan dalam harga emas karena para investor mencari aset yang “aman.” Harga beras internasional (Thai) juga mengalami peningkatan karena perubahan kebijakan dalam negerinya (lihat pada bagian harga-harga di bawah untuk rincian lebih lanjut).

Gambar 6: Penurunan harga komoditas global telah terpusat pada bahan-bahan metal dan dasar (perubahan dalam rata-rata harga internasional dolar Amerika dari bulan Juni ke September 2011, persen)

Catatan: September adalah rata-rata hingga 26 September
Sumber: CEIC dan Bank Dunia

Tantangan ekonomi yang sulit berarti bahwa situasi pasar keuangan internasional akan tetap cair dalam jangka pendek

Tantangan fundamental ekonomi yang dihadapi oleh banyak negara berpenghasilan tinggi adalah tantangan jangka menengah - konsolidasi fiskal, pemulihan kesehatan neraca perbankan dan pihak swasta, dan reformasi struktural untuk memperbaiki prospek tren pertumbuhan sangat dibutuhkan. Untuk negara – negara dengan tingkat hutang yang tinggi, tantangan mereka adalah terbatasnya ruang gerak dalam hal memilih kebijakan yang tepat untuk mencegah semakin menurunnya pertumbuhan. Rumitnya negosiasi politik juga seringkali menjadi syarat yang harus dilalui dalam proses pengambilan kebijakan yang dibutuhkan. Walaupun *outlook* negara berkembang masih kuat, dengan belum adanya kejelasan penyelesaian krisis di zona Eropa, situasi pasar keuangan internasional kemungkinan akan tetap cair dalam jangka pendek. Menghadapi volatilitas

aliran modal menambah tantangan yang dihadapi negara berkembang, termasuk tekanan inflasi untuk beberapa negara, dan juga menangani dampak spillover dari penurunan pertumbuhan di Eropa dan US. Sejalan dengan ketidakpastian di atas, maka bagian B lebih lanjut mencoba menganalisa beberapa alternatif skenario bagaimana situasi ekonomi global terus berkembang dan bagaimana hal – hal tersebut berdampak terhadap Indonesia.

2. Ketidakpastian telah meningkat disekitar *outlook* dasar dari pertumbuhan domestik yang kuat

Pertumbuhan PDB tetap kuat pada triwulan 2/2011 sebesar 6,5 persen

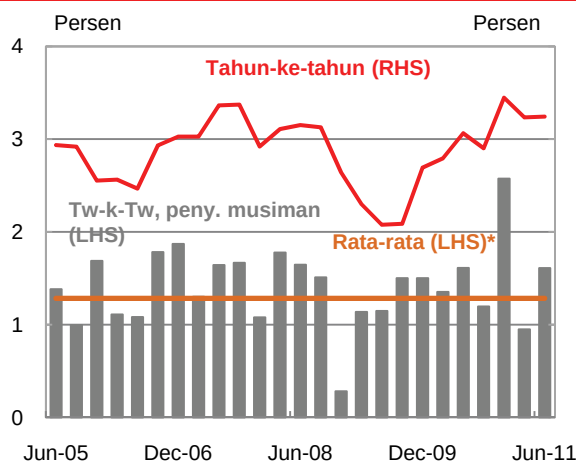
Ekonomi Indonesia terus tumbuh dengan kuat pada triwulan 2/2011. Pertumbuhan tahun-ke-tahun bertahan pada tingkat 6,5 persen sejak triwulan 1 (Gambar 7). Dengan penyesuaian musiman, pertumbuhan triwulanan meningkat sebesar 1,6 persen. Angka ini lebih tinggi dari 1,0 persen yang dicatat pada triwulan 1 dan tingkat pertumbuhan rata-rata 10-tahunan. Pertumbuhan pada triwulan kedua sesuai dengan harapan pasar dan perkiraan Triwulanan edisi Juni. Melihat kinerja pertumbuhan sampai saat ini, dan tetap kuatnya pendorong pertumbuhan dalam negeri, proyeksi pertumbuhan tahun 2011 tetap pada 6,4 persen sesuai dengan Triwulanan edisi Juni. Akan tetapi, seperti disoroti di atas, *outlook* internasional telah menurun, yang disebabkan oleh perkiraan perlambatan pada permintaan eksternal, proyeksi pertumbuhan tahun 2012 diturunkan menjadi 6,3 persen dari 6,7 persen, dan ketidakpastian disekitar baseline ini telah meningkat.

Konsumsi swasta dan investasi memberikan dukungan berkelanjutan terhadap pertumbuhan, sementara ekspor bersih memberikan dorongan kuat pada triwulan 2/2011

Konsumsi swasta terus memberi kontribusi yang kuat terhadap pertumbuhan PDB triwulanan pada triwulan kedua, sementara pertumbuhan investasi berbalik arah menjadi positif. Pertumbuhan konsumsi swasta didukung oleh berlanjutnya sentimen konsumen tingkat tinggi dan penurunan inflasi yang terjadi akhir-akhir ini. Kuatnya investasi didorong oleh pembangunan gedung, yang terlihat dari tingginya penjualan semen. Walaupun demikian, ekspor bersih (*net exports*) memberikan sumbangan utama pada pertumbuhan PDB triwulanan, setelah sebelumnya memberikan sumbangan yang negatif pada triwulan pertama. Pertumbuhan triwulan ekspor riil meningkat menjadi 5,4 persen, hampir dua kali lipat dari impor riil. Kuatnya ekspor pada triwulan kedua ini disebabkan oleh kuatnya peningkatan ekspor komoditas dan pertanian, terutama ke Jepang, Cina dan India. Konsumsi riil pemerintah memberikan kontribusi yang minim pada pertumbuhan triwulanan ini, yang menunjukkan masih adanya masalah pada pencairan anggaran belanja.

Gambar 7: Pertumbuhan PDB triwulanan bertahan pada 6,5 persen pada triwulan kedua tahun 2011...

(persen perubahan dalam PDB riil)

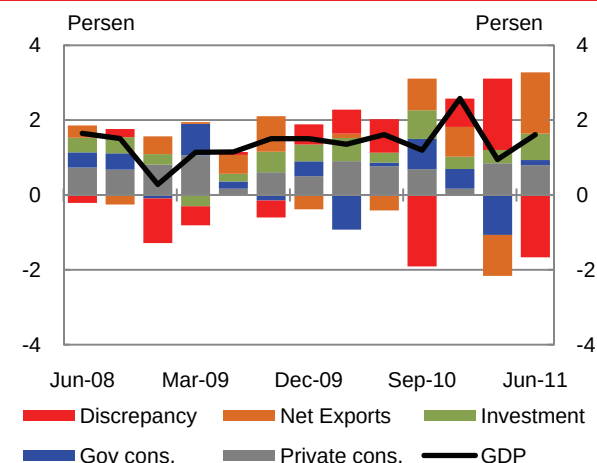


Catatan: * Rata-rata pertumbuhan Tw-k-Tw sejak Triwulan 2/2001

Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 8: ...didorong oleh ekspor bersih, konsumsi swasta dan investasi

(kontribusi pada pertumbuhan triwulan-ke-triwulan dengan penyesuaian musiman, persen)



Catatan: Kontribusi mungkin tidak berjumlah sesuai pertumbuhan keseluruhan PDB karena penyesuaian musiman pada tiap rangkaian secara individual
Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia

Pertumbuhan manufaktur cukup signifikan, untuk pertama kalinya dalam enam tahun meningkat di atas 6 persen

Pertumbuhan pada sisi produksi pada triwulan kedua didorong oleh perdagangan ritel dan kulakan, manufaktur dan transportasi dan komunikasi. Sektor non perdagangan tetap berkontribusi besar kepada pertumbuhan, walaupun terjadi perlambatan terhadap laju pertumbuhannya. Sektor manufaktur mencatat pertumbuhan yang sangat kuat pada triwulan 2, meningkat sebesar 6,1 persen tahun-ke-tahun dan 1,6 persen triwulan-ke-triwulan (dengan penyesuaian musiman), didorong oleh permintaan ekspor dan domestik. Ini adalah yang pertama kali dalam enam tahun di mana pertumbuhan tahun-ke-tahun melampaui enam persen. Pertumbuhan umum di bidang manufaktur tetap tinggi walaupun terjadi perlambatan pada produksi peralatan transportasi dan permesinan yang disebabkan oleh gangguan pasokan akibat gempa dan tsunami yang terjadi pada bulan Maret di Jepang.

Lingkungan eksternal melemah tetapi dengan fundamental ekonomi yang kuat, Indonesia diperkirakan dapat mempertahankan pertumbuhan pada 6,4 persen pada tahun 2011, sementara pertumbuhan tahun 2012 sedikit diturunkan tetapi masih tetap kuat sebesar 6,3 persen

Seperti dibahas di atas, peristiwa-peristiwa pada triwulan yang lalu telah meningkatkan ketidakpastian *outlook* global dan juga mempengaruhi *outlook* pertumbuhan di Indonesia. Besarnya dan lamanya pemulihan perlambatan pertumbuhan dunia akan mempengaruhi *outlook* pertumbuhan mitra-mitra perdagangan utama dan harga-harga komoditas. Tingkat penghindaran resiko investor internasional, dan respon kebijakan yang diambil di Indonesia, akan mempengaruhi *outlook* aliran masuk modal.

Menurut skenario dasar, proyeksi bagi mitra perdagangan utama (MTP) telah direvisi turun dibandingkan dengan edisi Juni 2011 sebesar 1 poin persentase pada tahun 2011 dan 2012. Asumsi harga minyak tetap pada 105 dolar Amerika per barel, yang menyeimbangkan ketidakpastian *outlook* dengan hasil-hasil yang baik pada bagian awal tahun ini. Harga minyak diperkirakan akan sedikit melambat ke 100 dolar Amerika pada tahun 2012.

Berdasarkan skenario dasar ini, pertumbuhan MTP yang lebih rendah akan diimbangi oleh kuatnya konsumsi swasta dalam negeri jangka pendek dan investasi, dimana investasi ini mencerminkan masuknya FDI pada akhir-akhir ini dan meningkatnya belanja modal dari APBN. Digabungkan dengan kuatnya pertumbuhan yang ditunjukkan sampai saat ini, proyeksi pertumbuhan tahun 2011 tetap tidak berubah dari Triwulanan edisi Juni sebesar 6,4 persen. Sedangkan proyeksi pertumbuhan untuk tahun 2012 telah direvisi turun sebesar 0,4 basis poin menjadi 6,3 persen. Angka ini mencerminkan revisi turun dari permintaan eksternal dan *outlook* harga komoditas, serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi, yang menyebabkan melambatnya pertumbuhan konsumsi dan investasi selama tahun 2012 (Tabel 2).

Perkiraan dasar ini didasarkan pada berlanjutnya fundamental domestik yang positif, sebagai contoh termasuk respon kebijakan yang terkoordinasi dalam menanggapi pengaruh negatif gejolak pasar internasional terhadap sektor keuangan dalam negeri. Perkembangan-perkembangan yang terjadi di zona Euro, AS dan Cina, dan pada pasar-pasar keuangan internasional, dapat menyebabkan *outlook* yang berbeda. Bagian risiko di bawah dan Bagian B akan melihat beberapa kemungkinan skenario yang berlainan secara lebih rinci.

Tabel 2: Proyeksi dasar pertumbuhan PDB tahun 2011 diturunkan, risiko di sekitar *outlook* meningkat (persentase perubahan, kecuali dinyatakan lain)

	Tahunan			Tahun berjalan ke triwulan Desember			Revisi Tahunan	
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2011	2012
1. Indikator ekonomi utama								
Total pengeluaran konsumsi	4,0	5,1	5,4	4,9	6,4	5,0	-0,1	-0,8
Pengeluaran konsumsi swasta	4,6	4,9	4,7	4,4	5,6	4,6	0,0	-0,3
Konsumsi pemerintah	0,3	6,6	10,1	7,3	10,6	6,9	0,0	-3,5
Pembentukan modal tetap bruto	8,5	9,2	9,3	8,7	10,3	9,0	0,0	-0,6
Ekspor barang dan jasa	14,9	14,1	8,9	16,1	9,1	7,7	1,2	-1,6
Impor barang dan jasa	17,3	15,4	10,0	16,9	10,4	9,1	-1,5	-2,6
Produk Domestik Bruto	6,1	6,4	6,3	6,9	6,2	6,0	0,0	-0,4
Pertanian	2,9	3,4	3,8	3,8	1,7	4,0	0,0	-0,1
Industri	4,7	5,1	5,0	5,3	5,3	4,5	0,2	-0,2
Jasa-jasa	8,4	8,5	8,1	9,2	8,8	7,8	-0,1	-0,7
2. Indikator eksternal								
Neraca pembayaran (miliar AS\$)	30,3	23,9	18,8	n/a	n/a	n/a	-0,9	-7,2
Neraca berjalan (miliar AS\$)	5,6	2,3	0,3	n/a	n/a	n/a	-0,5	-4,2
Neraca perdagangan (miliar AS\$)	21,3	21,7	19,7	n/a	n/a	n/a	3,1	-1,3
Neraca keuangan (miliar AS\$)	26,2	23,3	18,5	n/a	n/a	n/a	0,8	-3,0
3. Indikator ekonomi lainnya								
Indeks harga konsumen	5,1	5,6	5,5	6,3	5,0	5,5	-0,3	-0,6
Indeks keranjang kemiskinan	8,4	8,1	6,7	11,1	5,8	6,4	0,3	-0,3
Deflator PDB	8,0	8,3	9,0	8,0	8,7	8,7	-0,9	-0,6
PDB nominal	14,6	15,2	15,8	15,0	15,5	15,2	-1,0	-1,2
4. Asumsi ekonomi								
Kurs tukar (IDR/AS\$)	9074	8662	8650	8977	8650	8650	-50,9	0,0
Suku bunga	6,4	6,8	6,8	6,5	6,8	6,8	0,0	-0,3
Harga minyak Indonesia (AS\$/barel)	79,4	105,0	100,0	86,2	100,0	100,0	0,0	3,0
Pertumbuhan mitra dagang utama	6,6	3,3	3,9	5,6	3,9	4,1	-1,0	-0,8

Catatan: Proyeksi aliran perdagangan berkaitan dengan neraca nasional, yang dapat melebihi pergerakan volume perdagangan sebenarnya, dan mengecilkan pergerakan harga karena perbedaan dalam penggunaan harga
 Sumber: Kemenkeu, BPS, BI, CEIC dan proyeksi Bank Dunia

3. Aliran masuk modal tetap kuat pada triwulan dua sementara surplus perdagangan menurun

Keseluruhan aliran masuk neraca pembayaran pada triwulan 2/2011 sekali lagi mencatat nilai tinggi...

Keseluruhan aliran masuk neraca pembayaran sekali lagi mencatat nilai tinggi pada triwulan 2/2011, menyentuh 11,9 miliar dolar Amerika didorong oleh aliran masuk modal dan finansial sebesar 12,5 miliar dolar Amerika (Gambar 9). Surplus neraca berjalan menyempit tajam ke 0,2 miliar dolar Amerika sementara *net errors* (kesalahan bersih) menyumbang sebesar 0,8 miliar dolar Amerika pada aliran keluar. Kuatnya hasil triwulan 2 ini, ditambah aliran masuk lanjutan di bulan Juli dan Agustus, meningkatkan cadangan devisa hingga 124,6 miliar dolar Amerika pada akhir bulan Agustus (setara dengan impor dan hutang luar negeri Pemerintah untuk 7,1 bulan).

... aliran masuk FDI dan portofolio terus menguat, sebelum terjadinya gejolak pasar

Surplus neraca finansial dan modal kembali terjadi, setelah mengalaminya selama delapan triwulan berturut-turut, di dorong oleh kuatnya aliran masuk portofolio bersih ke sekuritas negara (baik obligasi domestik dan global bulan Mei) serta obligasi korporasi, juga kontribusi dari repatriasi bersih valuta asing dan deposit serta penarikan hutang bersih dari luar negeri. Aliran masuk FDI terus menguat, dengan aliran masuk bruto sebesar 5,2 miliar dolar Amerika, sementara FDI bersih mencapai 2,7 miliar dolar Amerika. Hal ini menambah mendukung tren investasi dalam jangka yang lebih panjang, relatif terhadap aliran portofolio.

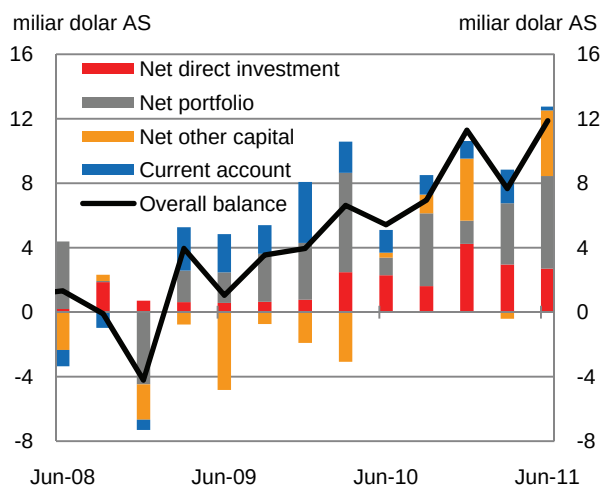
Neraca berjalan terus menyempit, terutama didorong oleh repatriasi keuntungan pada neraca pendapatan

Pada triwulan 2/2011 neraca transaksi berjalan mendekati defisit untuk pertama kali sejak krisis keuangan dunia tahun 2008. Neraca perdagangan Indonesia untuk barang dan jasa secara keseluruhan stabil, walaupun defisit minyak dan gas bumi terus meningkat. Transfer berjalan juga sedikit menurun, tapi ini meningkatkan secara signifikan pada defisit pendapatan, sebesar 6,9 miliar dolar Amerika dari 5,3 miliar dolar Amerika di triwulan 1, yang merupakan penyumbang terbesar terhadap penurunan surplus neraca transaksi berjalan. Penyebab utamanya adalah repatriasi keuntungan (*profit repatriation*) dari investasi langsung yang dapat dilihat sebagai isyarat daya tarik Indonesia sebagai tujuan FDI.

Peningkatan impor minyak dan gas bumi mengimbangi ekspor komoditas lain pada triwulan kedua

Pada neraca perdagangan, peningkatan surplus perdagangan non-migas diimbangi oleh peningkatan defisit migas, dan adanya peningkatan pada defisit jasa dengan meningkatnya pengeluaran untuk jasa pengiriman sejalan dengan volume perdagangan. Peningkatan ekspor terutama terjadi pada komoditas, seperti karet, minyak sawit dan batu bara, sedangkan impor barang-barang industri yang telah diproses dan barang-barang modal tetap stabil, sejalan dengan investasi dalam negeri. Neraca minyak dan gas bumi mencatat defisit triwulannya yang pertama, menurut data neraca pembayaran Bank Indonesia, dengan berlanjutnya tren peningkatan impor minyak, terutama produk yang telah diproses. Hal ini sejalan dengan menguatnya permintaan dalam negeri bagi bahan bakar bersubsidi (lihat bagian fiskal di bawah). Data bulanan menunjuk pada berlanjutnya penurunan neraca perdagangan barang-barang, yang turun ke 1,4 miliar dolar Amerika di bulan Juli, walaupun masih 1,5 miliar dolar Amerika lebih tinggi dari defisit kecil bersih yang dicatat pada bulan Juli 2010.

Gambar 9: Aliran masuk neraca keuangan meningkat pada triwulan 2/ 2011 tetapi surplus neraca berjalan menurun (miliar dolar Amerika)



Catatan: Kesalahan dan penghilangan tidak diperlihatkan
Sumber: BI

Tabel 3: Aliran masuk neraca pembayaran diperkirakan menurun di tahun 2011 dan 2012 pada skenario dasar (miliar dolar Amerika)

	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Neraca pembayaran	-1,9	12,5	30,3	25,9	18,8
Neraca berjalan	0,1	10,6	5,6	2,3	0,3
Perdagangan	9,9	21,2	21,3	21,7	19,7
Pendapatan	-15,2	-15,1	-20,3	-23,9	-24,2
Transfer	5,4	4,6	4,6	4,5	4,8
Neraca kapital & keuangan	-1,8	4,9	26,2	23,3	18,5
PMA	3,4	2,6	10,7	12,3	14,8
Portofolio	1,8	10,3	13,2	9,7	10,2
Lain-lain	-7,3	-8,1	2,2	1,3	-6,5
Cadangan devisa^(a)	51,6	66,1	96,2	122,0	

Catatan: Kesalahan dan penghilangan tidak diperlihatkan.^(a)
Cadangan tahun 2011 per akhir bulan Agustus 2011
Sumber: BI dan proyeksi Bank Dunia

Proyeksi terhadap aliran masuk neraca pembayaran sangat peka terhadap aliran masuk portofolio yang akan datang, tetapi pada skenario dasar diperkirakan akan menurun dari nilai 2010 yang tinggi

Penurunan harga komoditas dan aliran portofolio ke pasar-pasar negara sedang berkembang yang terjadi belakangan ini, serta bersamaan dengan penurunan permintaan eksternal, menyebabkan melambatnya aliran masuk neraca pembayaran. Akan tetapi, dengan aliran portofolio yang sensitif terhadap sentimen investor internasional, besarnya perlambatan sangat tidak pasti. Pada proyeksi dasar neraca berjalan tetap melambat sampai dengan sedikit diatas keseimbangan pada tahun 2012 karena disebabkan terjadi tren penurunan neraca perdagangan dan peningkatan defisit pendapatan terus berlanjut (Tabel 3). Aliran masuk portofolio diperkirakan akan turun tapi tetap solid pada tahun 2012 sebagaimana berlanjutnya dorongan fundamental aliran masuk. Proyeksi aliran masuk merupakan suatu tantangan walaupun tanpa ditunjang kepastian pasar yang jelas terlihat. Juga FDI, diproyeksikan memiliki keberlanjutan aliran masuk yang solid yang sangat tergantung kepada kondisi negara-negara investor, meskipun terdapat faktor-faktor menarik seperti kuatnya pasar domestik Indonesia.

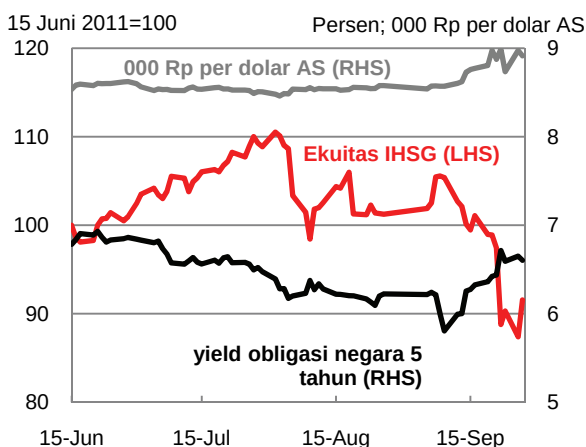
4. Gejolak internasional belakangan ini mempengaruhi pasar keuangan Indonesia

Saham-saham Indonesia melemah dengan tajam sejak Triwulanan Juni 2011 karena peningkatan penghindaran risiko global yang juga memberi tekanan terhadap Rupiah

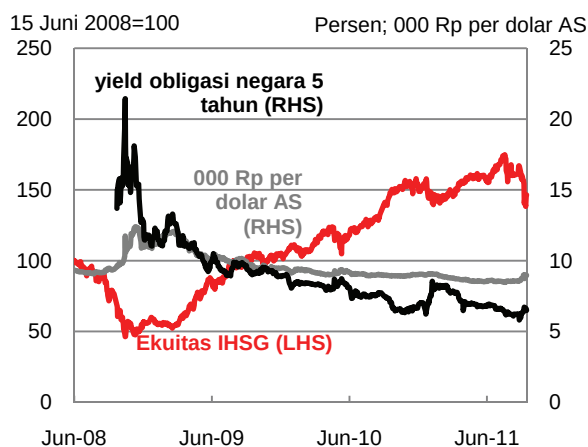
Sejak bulan Agustus, pasar keuangan di Indonesia dan negara-negara lain se-kawasan, mengalami dampak buruk dari peningkatan ketidakpastian prospek dari zona Euro dan AS. Pada awal bulan Agustus, pemicunya adalah penurunan peringkat hutang negara AS oleh Standard and Poor's. Dari awal bulan September terjadi penurunan bertahap yang lebih jauh di pasar saham domestik, beberapa peningkatan *yield* obligasi dan melemahnya kurs tukar mata uang (Gambar 10). Indeks harga saham kemudian jatuh dengan tajam, sebesar 8,9 persen, pada tanggal 22 September 2011. Penurunan ini adalah penurunan harian yang paling besar sejak bulan Oktober 2008 dan diikuti dengan pengumuman pada malam harinya mengenai "Operation Twist" oleh Bank Sentral Amerika Serikat bersama-sama dengan pernyataan yang menyebutkan adanya risiko penurunan yang signifikan terhadap prospek perekonomian global. Pengetatan kondisi pendanaan internasional bagi investor-investor asing yang ikut berpartisipasi di pasar obligasi domestik Indonesia dapat menurunkan kepemilikan mereka, memberikan tekanan terhadap mata uang, yang mengakibatkan turunnya sentimen terhadap ekuitas.

Secara keseluruhan, sejak Triwulanan edisi Juni 2011 (yaitu sejak 15 Juni hingga 27 September) saham-saham Indonesia telah turun sebesar 8,4 persen sementara Rupiah mengalami depresiasi sebesar 4,3 persen terhadap dolar AS. Akan tetapi penurunan tersebut berasal dari nilai yang tertinggi dari harga aset domestik (Gambar 11). *Yield* obligasi pemerintah lima tahun dalam mata uang Rupiah mengecil hampir sebesar 20 basis poin menjadi 6,61 persen dalam satu kuartal. Rata-rata *spread* pada obligasi eksternal Indonesia telah meningkat sebesar 120 basis poin menjadi sedikit di atas 320 basis poin.

Gambar 10: Harga aset turun tajam pada bulan September... Gambar 11: ...turun dari tingkat yang tinggi
(indeks ekuitas, 15 Juni 2011=100; Rp per dolar AS; yield, (indeks ekuitas, 15 Juni 2011=100; Rp per dolar AS; yield, persen)



Sumber: CEIC dan Bank Dunia

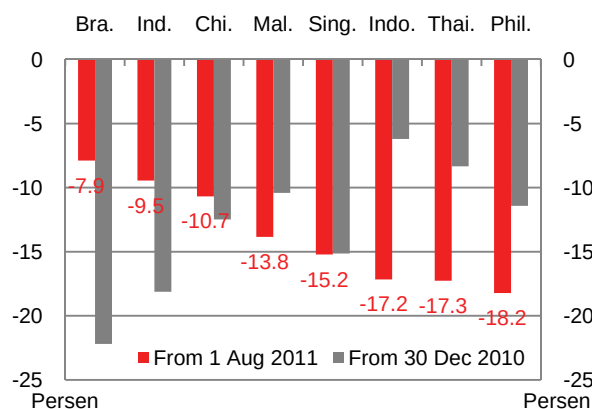


Sumber: CEIC dan Bank Dunia

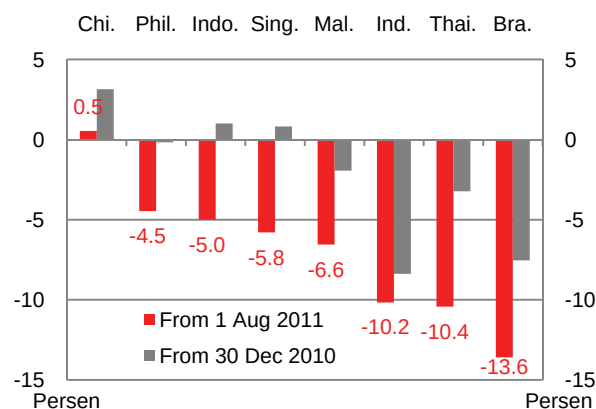
Pergerakan serupa juga terlihat pada pasar-pasar regional lainnya

Aliran masuk modal selama tahun 2010 dan paruh pertama tahun 2011 memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan harga aset di banyak negara ekonomi-ekonomi berkembang utama. Pemindahan berskala besar dari aset yang berisiko menuju obligasi AS dan aset-aset "aman" lainnya pada beberapa bulan terakhir telah menghantam ekuitas dan mata uang ekonomi berkembang dengan kuat. Sejak peningkatan gejolak pasar pada awal bulan Agustus, ekuitas Indonesia menurun tajam secara relatif terhadap negara lainnya di kawasan ukuran besar secara relatif terhadap pembandingan-pembandingnya di dalam satu wilayah (Gambar 12). Akan tetapi, berkat peningkatan yang telah terjadi sebelumnya, penurunan yang terjadi di Indonesia dibanding akhir tahun 2010 masih relatif rendah. Rupiah relatif tidak terpengaruh dibanding mata uang asing lain seperti Thai Baht berkat intervensi dari bank sentral, dan Rupiah tampaknya masih sedikit lebih kuat dibanding tingkat kurs pada akhir tahun 2010.

Gambar 12: Penurunan besar terhadap ekuitas Indonesia tetapi sama dengan yang dialami oleh negara lainnya di kawasan ...
(perubahan pasar ekuitas lokal hingga 27 Sep 2011, persen)



Gambar 13: ... sementara depresiasi Rupiah relatif terbatas dibandingkan dengan negara lainnya di kawasan
(apresiasi terhadap dolar AS hingga 27 Sep 2011, persen)

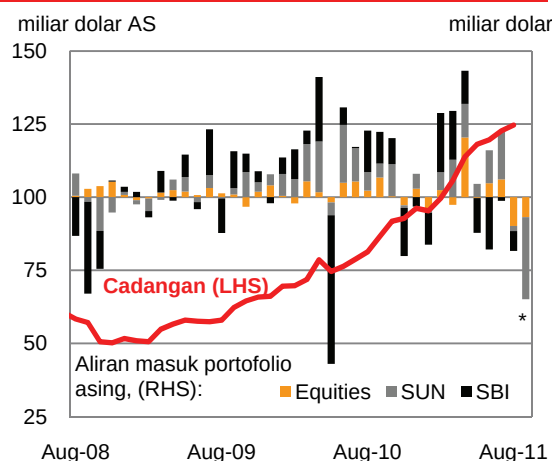


Catatan: Bra.= Brasil; Ind.=India; Chi.=China; Mal.= Malaysia; Sing.= Singapura; Indo=Indonesia; Thai.= Thailand; Phil.= Philippines
Sumber: CEIC dan Bank Dunia

Indonesia mengalami aliran keluar portfolio yang besar oleh investor asing selama bulan Agustus dan September

Di bulan Agustus Indonesia mencatat aliran keluar portfolio sebesar 1.8 miliar dolar Amerika, yang mana hampir 1 miliar dolar Amerika adalah dalam bentuk ekuitas (Gambar 14). Dari akhir bulan Agustus hingga 26 September, tercatat penjualan bersih ekuitas oleh investor asing sebesar 690 juta dolar Amerika akan tetapi penurunan kepemilikan mereka terhadap sekuritas pemerintah dalam mata uang lokal juga mengalami peningkatan, mencapai 2,8 miliar dolar Amerika dibanding penurunan sebesar 170 juta dolar Amerika di bulan Agustus. Rasio kepemilikan investor asing terhadap jumlah SUN yang beredar telah turun menjadi 32 persen dari 35 persen pada akhir bulan Agustus. Data kepemilikan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bulanan tidak tersedia tetapi di bulan Agustus

Gambar 14: Aliran portfolio berbalik arah dengan tajam di bulan Agustus dan September
(miliar dolar Amerika)



Catatan: "Aliran" bagi SUN (Surat Utang Negara) and SBI (Sertifikat BI) menunjukkan perubahan dalam kepemilikan. * Data untuk September adalah hingga 26 September, tidak ada data yang tersedia untuk SBI
Sumber: BI, CEIC dan Bank Dunia

Tanggapan kebijakan yang telah diterapkan terhadap aliran keluar portfolio adalah intervensi pada pasar valuta dan obligasi

tercatat penurunan pada kepemilikan SBI oleh investor asing sebesar 680 juta dolar Amerika. Aliran keluar portfolio mencapai 5.7 miliar dolar Amerika di bulan Mei 2010, terutama dalam bentuk SBI. Di bulan September dan Oktober 2008, aliran keluar portfolio masing-masing mencapai 3 miliar dolar Amerika dan 2 miliar dolar Amerika. Akan tetapi, aliran keluar modal yang belakangan terjadi berasal dari jumlah tingkat kepemilikan yang jauh lebih besar.

Untuk menanggapi tekanan terhadap Rupiah yang berasal dari aliran keluar portfolio asing, Bank Indonesia telah melakukan intervensi, dengan menjual cadangan devisa untuk menopang Rupiah. Cadangan devisa pada pertengahan September berada pada 122 miliar dolar Amerika, turun dari 124,6 miliar dolar Amerika pada akhir bulan Agustus. Bank Indonesia juga membeli obligasi negara secara langsung melalui lelang pasar sekunder pada bulan lalu. Kementerian Keuangan juga telah membeli kembali hutang-hutang. Tindakan-tindakan tersebut mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia pada tahun lalu untuk menghadapi potensi aliran keluar modal dari pasar obligasi dalam negeri, seperti membuat mekanisme pembelian, serta menerapkan upaya kehati-hatian makro seperti peningkatan masa kepemilikan SBI dll. Volatilitas di pasar keuangan internasional dan domestik cenderung belum berakhir dalam waktu dekat. Dengan demikian, pengambil kebijakan perlu memperkuat lebih lanjut mekanisme-mekanisme untuk menghadapi volatilitas yang meningkat, serta dampaknya pada sektor keuangan. Kualitas kebijakan menjadi sangat penting di saat-saat sekarang, mengingat investor sangat sensitif saat langkah-langkah yang diambil tidak tepat.

Kuatnya kinerja sektor perbankan secara keseluruhan terus berlanjut

Indikator utama kinerja sektor perbankan secara umum tidak berbeda dari Triwulanan edisi bulan Juni 2011. Pertumbuhan kredit nominal hanya sedikit di atas 24 persen tahun-ke-tahun di bulan Agustus. Rasio kecukupan modal mengalami sedikit penurunan sejak bulan April tetapi masih bertahan pada 17,2 persen di bulan Juli 2011. Rasio kredit macet bruto tetap stabil pada sedikit di atas 3 persen. Dalam hal perkembangan peraturan, terdapat sedikit ketidakpastian yang disebabkan oleh laporan adanya usulan untuk membatasi kepemilikan saham di bank-bank domestik.

Bank Indonesia telah menurunkan batas bawah koridor suku bunga untuk menstimulasi pasar uang dalam negeri

Pada pertemuan pengumuman kebijakan di bulan September, Bank Indonesia tidak mengubah tingkat suku bunga tetapi menurunkan batas bawah dari koridor suku bunga untuk operasi moneter dari 100 menjadi 150 basis poin di bawah BI Rate untuk menstimulasi transaksi pada pasar uang dalam negeri. Suku bunga Rupiah *overnight* antar bank turun mengikuti batas bawah yang baru. Walaupun masih terdapat likuiditas yang cukup pada keseluruhan sistem, mungkin terdapat bank-bank tertentu yang menghadapi kondisi yang lebih ketat, terutama untuk likuiditas dolar Amerika. Untuk upaya dengan jangka waktu yang lebih panjang yang dapat mempengaruhi likuiditas dolar, Bank Indonesia telah mengisyaratkan kemungkinan peraturan baru untuk meminta repatriasi penghasilan dalam valuta asing yang berasal dari ekspor ke bank-bank umum yang ada di Indonesia.

5. Inflasi IHK terus turun dengan melambatnya guncangan inflasi pangan

Inflasi IHK turun di bawah 5 persen untuk pertama kali selama setahun, melanjutkan penurunannya di tahun 2011 karena melemahnya inflasi bahan pangan pada akhir tahun 2010

Selama triwulan yang lalu, penurunan inflasi IHK terus berlanjut. Inflasi menurun sedikit di atas satu poin persentase dari angkanya di bulan Mei 2011 menjadi 4,8 persen tahun-ke-tahun di bulan Agustus 2011 (Gambar 15). Penurunan ini didorong oleh melambatnya inflasi harga bahan pangan yang tinggi pada akhir tahun 2010. Inflasi harga bahan pangan sudah turun hampir setengahnya sejak bulan Mei 2011 ke 5,8 persen di bulan Agustus 2011. Hal ini selanjutnya menyumbang pada penurunan tingkat inflasi keranjang kemiskinan dari nilai puncaknya sebesar 13 persen pada bulan Desember 2010 menjadi 6,8 persen di bulan Agustus 2011.

Inflasi bulan-ke-bulan meningkat di bulan Juli dan Agustus. Sebagian penyebabnya adalah tekanan harga musiman pada bulan Ramadan dan hari raya Idul-Fitri terhadap beberapa bahan pangan, seperti beras, daging, sayur-mayur dan harga pakaian. Sebagian besar peningkatan musiman itu umumnya menurun pada bulan setelah hari raya Idul-Fitri.

Harga beras dalam negeri telah meningkat dengan berakhirnya panen raya

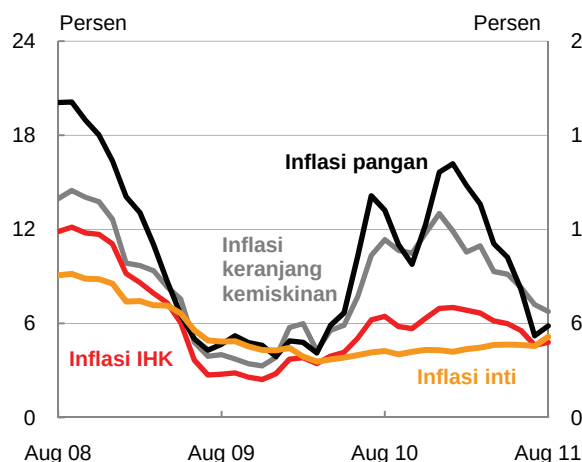
Harga beras dalam negeri mengikuti pola musimannya, meningkat sejak berakhirnya panen raya di bulan April. Dari akhir bulan April hingga pertengahan September, harga kulakan dalam negeri (kualitas menengah) dan harga ritel (kualitas rata-rata) masing-masing meningkat sebesar 14 persen dan 10 persen. Harga beras internasional juga meningkat. Harga beras Thailand meningkat sebesar 5.3 persen pada bulan Agustus setelah pemerintah Thailand yang baru mengumumkan akan peningkatan harga yang dibayarkan kepada petani dan penggiling padi, yang pada gilirannya, mereka mulai menunda penjualan beras menunggu harga yang lebih tinggi. Dengan meningkatnya harga di dalam dan luar negeri, perbedaan antara harga dalam negeri dan internasional tetap bertahan di kisaran 35 persen di bulan Agustus.

Inflasi inti, yang telah meningkat secara bertahap selama tahun 2011, meningkat tajam di bulan Agustus menjadi 5,1 persen, didorong oleh tingginya harga emas

Inflasi inti, yang bertahan pada 4,6 persen tahun-ke-tahun dari bulan April hingga Juli, meningkat tajam ke angka tertinggi dalam dua tahun sebesar 5,1 persen di bulan Agustus. Sekitar sepertiga dari peningkatan harga-harga inti di bulan Agustus disebabkan oleh peningkatan harga perhiasan. Hal ini mencerminkan permintaan dalam negeri yang lebih tinggi di sekitar hari raya Idul-Fitri dan juga karena catatan nilai tertinggi dari harga emas internasional sebagai akibat dari pelarian modal investor ke instrumen yang aman di tengah gejolak pasar keuangan global. Peningkatan harga inti di bulan Agustus menyumbang sekitar dua per tiga peningkatan bulanan pada IHK.

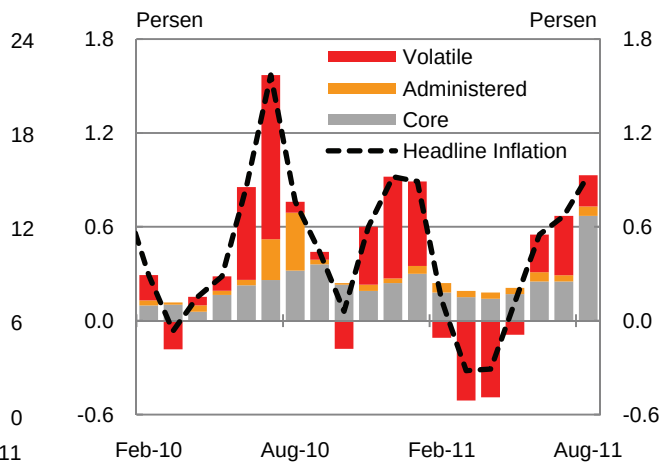
Perkiraan inflasi konsumen, seperti diukur oleh BI, juga telah meningkat, ke nilai tertinggi selama tiga tahun. Beberapa penyebabnya adalah dampak musiman hari raya dan responden yang menyatakan kesulitan untuk mendapatkan barang-barang konsumsi tertentu. Akan tetapi juga terdapat keprihatinan yang dinyatakan tentang dampak inflasi terhadap reformasi pemerintah yang berikut terhadap pengaturan bahan bakar dan tenaga listrik bersubsidi.

Gambar 15: Inflasi telah menurun pada tahun 2011 tetapi merangkak naik di bulan Agustus... (pertumbuhan tahun-ke-tahun)



Sumber: BPS dan Bank Dunia

Gambar 16: ...dengan meningkatnya inflasi bulanan, sebagian karena meningkatnya inflasi inti (poin persentase)



Sumber: BPS

Inflasi diperkirakan akan meningkat di tahun 2012 tetapi proyeksinya tetap peka terhadap kemajuan reformasi subsidi energi, kualitas panen beras pada awal tahun 2012 dan kekuatan kurs tukar valuta

Ketidakpastian pada *outlook* global saat ini, dan bagaimana dampaknya terhadap Indonesia, juga mempengaruhi ramalan inflasi. Jalur lintasan kurs tukar valuta asing sangatlah penting karena depresiasi Rupiah sebesar 10 persen akan menyebabkan peningkatan inflasi IHK sebesar 0,5 poin persentase. Akan tetapi menurut skenario dasar dengan kurs tukar yang stabil dan berlanjutnya fundamental sektor riil dalam negeri yang kuat, inflasi IHK diperkirakan akan berangsur-angsur naik pada triwulan akhir tahun 2011 menjadi 5,0 persen dengan turunnya lonjakan tajam harga bahan pangan yang tercatat pada akhir tahun 2010.

Pada tahun 2012, dengan skenario dasar percepatan pertumbuhan yang melambat, Indonesia masih mengalami ekspansi ekonomi yang kuat bersama dengan sedikit pengetatan pertumbuhan kredit akan menghasilkan peningkatan inflasi secara bertahap, mencapai 5,5 persen pada triwulan akhir tahun 2012. Skenario ini mengasumsikan tidak

adanya perubahan kebijakan untuk reformasi subsidi. Salah satu risiko utama kepada *outlook* inflasi adalah datang dari penyesuaian pada harga bahan bakar dan tenaga listrik yang diatur oleh pemerintah (dengan harga listrik yang direncanakan akan meningkat sebesar 10 persen pada bulan April 2012). Selain itu, kualitas panen pada awal tahun 2012 akan menentukan pergerakan harga beras yang akan menjadi risiko naik maupun turun bagi peramalan inflasi. Hal ini terutama berkaitan dengan inflasi keranjang kemiskinan yang, sesuai skenario garis dasar, diperkirakan akan menurun ke 5,8 persen pada triwulan akhir tahun 2011 sebelum meningkat menjadi 6,4 persen di tahun 2012. Akhirnya, tentang kurs tukar valas, jika aliran masuk modal ke Indonesia kembali terjadi pada tahun 2012, maka hal itu akan menciptakan tekanan naik pada kurs tukar, meredam inflasi.

Pertumbuhan harga secara umum terus melambat, dengan penurunan tajam inflasi harga investasi

Tingkat harga-harga pada ekonomi yang lebih luas telah turun. Inflasi deflator PDB berada pada 7,4 persen tahun-ke-tahun pada triwulan 2/2011, turun dari 8,8 persen pada triwulan 1/2011. Harga-harga meningkat hanya sebesar 0,5 persen pada basis *seasonally adjusted* relatif terhadap triwulan 1/2011, triwulanan yang paling rendah selama hampir satu dekade. Dari pergerakan IHK, penurunan inflasi harga konsumsi swasta menjadi 5,6 persen juga memberi pengaruh. Selain itu, pertumbuhan harga investasi terus menurun, bergerak dari 8,1 persen pada triwulan 1 menjadi 5,3 persen pada triwulan 2/2011, nilai terendah sejak tahun 2002. Inflasi harga bahan-bahan konstruksi juga menurun, yang disebabkan oleh peralatan dan mesin-mesin impor bersumber dari penguatan Rupiah pada paruh pertengahan tahun ini.

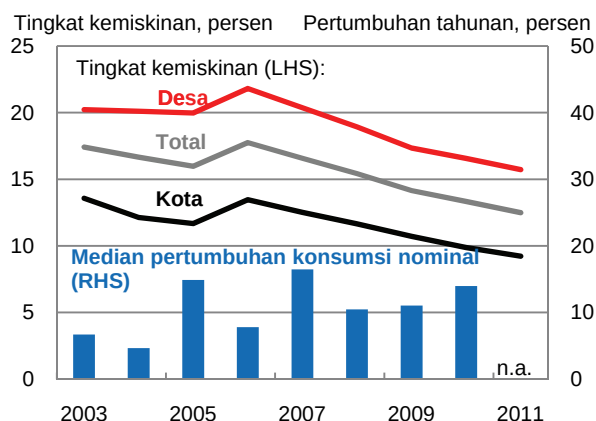
Sebagaimana inflasi IHK, inflasi deflator PDB diperkirakan akan bergerak naik pada triwulan 4/2011, mencapai 8,7 persen. Akan tetapi, proyeksi pertumbuhan rata-rata deflator bagi tahun 2011 telah direvisi turun menjadi 8,3 persen berdasarkan dari hasil-hasil yang sekarang terlihat. Untuk tahun 2012, inflasi deflator PDB diperkirakan akan bertahan pada tingkat yang sama, yang tetap berada di bawah rata-rata sebelum krisis keuangan sebesar 14,5 persen untuk periode tahun 2005-2008.

6. Tingkat kemiskinan tahunan nasional Indonesia turun pada bulan Maret 2011

Tingkat kemiskinan Indonesia terus menurun, mencapai 12,5 persen di bulan Maret 2011 dari 13,3 persen di bulan Maret 2010...

Angka-angka terakhir yang diterbitkan oleh BPS menunjukkan bahwa kemiskinan terus menurun: jumlah individu yang hidup di bawah garis kemiskinan turun dari sekitar 31 juta di bulan Maret 2010 menjadi 30 juta di bulan Maret 2011 (yang diperoleh dari survei rumah tangga Susenas). Penurunan tahun-ke-tahun pada tingkat kemiskinan perkotaan dan pedesaan masing-masing 0,64 dan 0,84 poin persentase menghasilkan penurunan tingkat kemiskinan dari 13,3 menjadi 12,5 persen. Pengentasan kemiskinan selama periode tahun 2010-2011 berlangsung pada laju yang kurang-lebih sama dengan laju yang dicatat dari periode tahun 2007 hingga 2010 (Gambar 17).

Gambar 17: Kemiskinan nasional Indonesia turun di 2011
(Persentase penduduk dibawah di bawah garis kemiskinan, persen; median pertumbuhan konsumsi, persen)



Catatan: Pertumbuhan konsumsi bagi individu
Sumber: Susenas dan Bank Dunia

...dan walaupun tingkat kemiskinan bervariasi antar propinsi, tetapi tingkat penyebarannya telah menurun

Seperti pada tahun 2010, terdapat variasi kedaerahan dalam kinerja pengentasan kemiskinan. Penurunan absolut yang terbesar pada laju kemiskinan di perkotaan, pedesaan dan secara keseluruhan dijumpai di Nusa Tenggara Barat, Gorontalo dan di Papua serta Maluku. Dibandingkan dengan tingkat kemiskinan tahun 2010, propinsi Gorontalo sekali lagi menunjukkan kinerja terbaik. Gorontalo mencatat tingkat kemiskinan sebesar 27,4 persen di tahun 2007 dan berhasil menurunkan ke 18,8 persen empat tahun kemudian. Terdapat daerah-daerah seperti Kalimantan, Sumatera dan Jawa yang

menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan terendah, dengan mencatat penurunan tingkat kemiskinan kurang dari satu poin persentase, walaupun demikian wilayah-wilayah ini sejak tahun 2010 umumnya memiliki angka tingkat kemiskinan sebesar 10 persen atau kurang. Secara keseluruhan penyebaran tingkat kemiskinan (lintas propinsi) telah turun sekitar 20 persen dari tahun 2007 hingga 2011, dengan penurunan sebesar 13 poin persentase tercatat terjadi pada tahun 2011, yang menunjukkan makin membaiknya kinerja pengentasan kemiskinan pada seluruh propinsi.

Kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik telah berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan, mengimbangi dampak kenaikan harga bahan pangan yang terjadi pada akhir 2010 sampai awal tahun 2011

Kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik, dan dampaknya terhadap pendapatan rumah tangga dan hasil-hasil dari pasar tenaga kerja, telah berkontribusi kepada penurunan tingkat kemiskinan, mengimbangi dampak negatif yang dihadapi oleh konsumen bahan pangan bersih (*net food consumers*) yang disebabkan oleh guncangan harga bahan pangan pada paruh kedua tahun 2010 (lihat Triwulanan edisi Maret 2011). Menurut survei angkatan kerja Sakernas, pada bulan Februari 2011 penyerapan tenaga kerja tumbuh sebesar 3,6 persen (3,9 juta orang) dalam satu tahun dan angka median upah nominal meningkat sebesar 7,3 persen. Ini dibandingkan dengan pertumbuhan median upah nominal setahun pada bulan Februari 2010 yang berjumlah 6,1 persen. Ketika dideflasikan dengan IHK, pertumbuhan median upah riil di tahun 2011 berada sedikit di bawah angka tahun 2010. Dari sisi sektor, pertumbuhan upah nominal di tahun 2011 didorong oleh peningkatan upah nominal sebesar 27 persen pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pemburuan dan perikanan, yang merupakan penyerap pekerjaan terbesar, dengan cakupan 40 persen dari seluruh pekerja. Median upah di sektor pertambangan juga kuat, dengan peningkatan sebesar 17 persen.

7. Defisit tahun 2011 direvisi naik karena pengeluaran yang lebih besar untuk subsidi energi

Defisit APBN-P 2011 meningkat ke 2,1 persen PDB karena peningkatan pengeluaran untuk subsidi energi

APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) 2011, yang disahkan pada akhir bulan Juli, meningkatkan defisit menjadi Rp 151 triliun (2,1 persen dari PDB) dibandingkan Rp 125 triliun (1,8 persen dari PDB) dalam APBN awal. Peningkatan ini sebagian besar digunakan untuk membiayai subsidi energi, yang naik sebesar Rp 59 triliun menjadi Rp 195 triliun.

Peningkatan pengeluaran untuk subsidi energi disebabkan oleh peningkatan asumsi harga minyak dan volume konsumsi BBM (Bahan Bakar Minyak) setelah penundaan rencana pembatasan penggunaan bahan bakar bersubsidi untuk mobil pribadi yang sebelumnya akan dimulai pada bulan April. Asumsi harga minyak yang baru untuk tahun 2011 sebesar 95 dolar Amerika per barel, naik dari 80 miliar dolar Amerika, tetaplah relatif konservatif dibandingkan dengan harga rata-rata minyak yang dicatat selama tahun berjalan. Juga terdapat sedikit realokasi terhadap belanja kementerian seperti belanja untuk program pro-kemiskinan dan untuk pendidikan, untuk memenuhi mandat konstitusi 20 persen dari seluruh pengeluaran. Transfer ke daerah juga meningkat sesuai dengan proyeksi pendapatan migas bukan pajak yang lebih tinggi. Peningkatan pendapatan yang berkaitan dengan komoditas, bersama-sama dengan pajak ekspor (terutama bea ekspor minyak sawit mentah) menjelaskan hampir seluruh kenaikan pendapatan sebesar Rp 65 triliun.

Memasuki delapan bulan tahun 2011, realisasi APBN masih mencatat surplus sebesar Rp 41 triliun, mencerminkan kecenderungan belanja yang menumpuk di akhir tahun

Tren fiskal tetap berlanjut pada triwulan terakhir. Lebih tingginya harga minyak telah menambah pendapatan tetapi juga meningkatkan pengeluaran untuk subsidi energi. Masalah pencairan bagi program-program ini tetap berlanjut. Sebagai akibatnya, pendapatan pemerintah pusat pada delapan bulan pertama tahun 2011 mencapai Rp 719 triliun, naik 19 persen dibanding periode yang sama untuk tahun 2010, dan sejalan dengan perkiraan pada Triwulanan edisi bulan Juni 2011. Pendapatan pajak meningkat sebanyak 19,5 persen dan non-pajak naik sebesar 17,7 persen. Jumlah pengeluaran mencapai Rp 678 triliun sehingga surplus bagi delapan bulan pertama tahun 2011 adalah Rp 41 triliun.

Dengan pengecualian untuk subsidi energi dan belanja pegawai, tingkat pencairan belanja dalam delapan bulan pertama tetap lemah relatif terhadap APBN-P

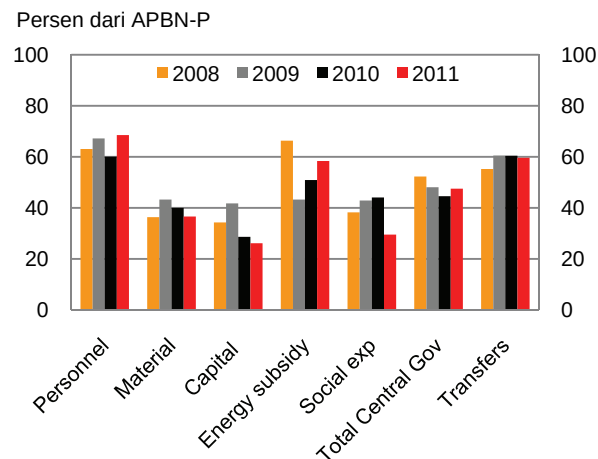
Selama delapan bulan tahun fiskal berjalan, jumlah pengeluaran telah mencapai setengah dari alokasi APBN-P. Di luar transfer ke daerah, tingkat pencairan belanja sebesar 48 persen dibandingkan terhadap APBN-P mengalami peningkatan dibanding tahun 2010 tetapi lebih rendah dari tahun 2008 dan 2009 (Gambar 18).

Tingginya harga minyak mentah dan peningkatan permintaan selama liburan Idul-Fitri berkontribusi kepada peningkatan pengeluaran subsidi energi menjadi Rp 114 triliun per akhir bulan Agustus. Angka itu merupakan seperempat lebih besar dari seluruh belanja pemerintah dan setara dengan 83 persen dari alokasi awal APBN untuk subsidi energi, atau tiga per lima dari alokasi pada APBN-P. Belanja pegawai juga naik oleh tambahan pembayaran gaji ke-13 pada bulan Juli.

Pengeluaran untuk program-program inti (material, modal dan sosial) telah meningkat lebih dari dua kali lipat dalam nilai nominal relatif terhadap belanja pada akhir bulan Mei. Akan tetapi, dilihat dari proporsi terhadap APBN-P sebesar 31 persen masih dibawah tahun-tahun yang lalu, dengan persentase tingkat belanja modal hanya 26 persen (Gambar 19).

Gambar 18: Lemahnya pencairan pada program-program inti dan lebih tingginya pengeluaran subsidi energi terus berlanjut

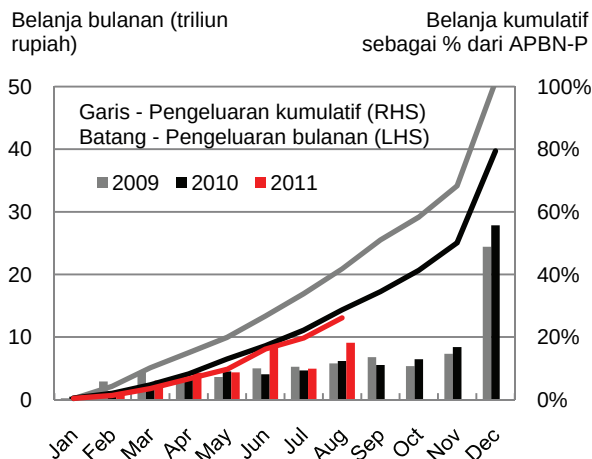
(pengeluaran pada delapan bulan pertama tahun berjalan sebagai proporsi dari APBN-P, persen)



Sumber: Kemenkeu dan staf Bank Dunia

Gambar 19: Belanja modal telah meningkat antara bulan Juni dan Agustus, tetapi masih berada di bawah tingkat tahun yang lalu...

(belanja bulanan, triliun rupiah; pengeluaran kumulatif sebagai proporsi APBN-P, persen)



Sumber: Kemenkeu dan staf Bank Dunia

Pencairan belanja modal masih menjadi tantangan dan sebagai akibatnya, belanja infrastruktur pada sektor-sektor utama seringkali berada di bawah alokasi awal dan penurunan belanja secara nominal bahkan terjadi pada belanja beberapa jenis infrastruktur antara tahun 2009 dan 2010

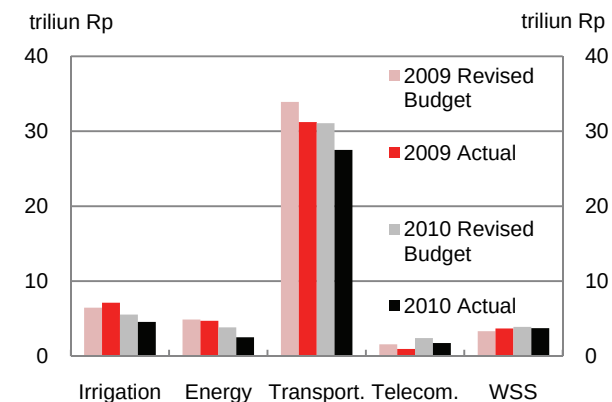
Belanja infrastruktur telah menerima prioritas yang lebih tinggi dalam beberapa APBN terakhir. Akan tetapi, masalah pelaksanaan menghambat realisasi dan pada akhirnya membatasi pencapaian tujuan pembangunan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur. Di tahun 2010, nilai belanja infrastruktur pemerintah pusat hanya sebesar 86 persen dari alokasi APBN-P. Jumlah belanja sebenarnya mengalami penurunan sebesar 16 persen secara relatif dibanding dengan tahun 2009 (Gambar 20). Lemahnya kapasitas pelaksanaan terlihat jelas pada seluruh sub-sektor, terutama pada transportasi dan energi.

Seperti dibicarakan pada Triwulanan edisi Desember 2010, di antara masalah-masalah yang membatasi kemajuan pencairan belanja adalah, sebagai contoh, panjangnya proses revisi anggaran atau transfer dana antar mata anggaran dan kompleksnya proses pembebasan lahan. Juga terdapat kesulitan dengan sistem baru yang dirancang untuk meningkatkan proses-proses pencairan, seperti sistem pengadaan elektronik (e-procurement) yang baru diluncurkan, yang diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan dan meningkatkan transparansi.

Efektivitas beberapa reformasi kebijakan yang ditujukan untuk mempercepat pelaksanaan anggaran telah dihalangi oleh kurangnya sosialisasi dan kurangnya konsistensi dengan peraturan-peraturan lain.

Gambar 20: Belanja infrastruktur pemerintah pusat untuk transportasi, energi dan irigasi menurun di tahun 2010

(Rp triliun)



Catatan: WSS adalah sektor air bersih dan sanitasi
Sumber: Kemenkeu dan staf Bank Dunia

Proyeksi defisit Bank Dunia telah ditingkatkan ke 1,5 persen dari PDB untuk tahun 2011

Bank Dunia telah meningkatkan proyeksi defisit untuk tahun 2011 sebesar 1,5 persen dari PDB dari 1,2 persen pada Triwulan edisi Juni. Pendapatan pada umumnya tidak berubah secara agregat. Akan tetapi, asumsi *lifting* minyak yang lebih rendah (sesuai dengan asumsi terakhir dari Pemerintah) dan sedikit lebih rendahnya perkiraan PDB nominal di tahun 2011, tampaknya akan berpengaruh terhadap penurunan pajak dari migas dan sedikit penurunan terhadap hampir seluruh kelompok pendapatan. Akan tetapi, kuatnya bea ekspor yang tercatat hingga saat ini menjadi faktor pengimbang. Pada sisi pengeluaran, peningkatan pengeluaran untuk subsidi bahan bakar karena revisi naik dari asumsi harga minyak dan peningkatan yang tipis dalam pencairan belanja inti pemerintah akan menyebabkan lebih tingginya pengeluaran belanja secara keseluruhan untuk tahun 2011.

Melihat ke tahun 2012, RAPBN yang diterbitkan pada bulan Agustus menargetkan defisit sebesar Rp 126 triliun atau 1,5 persen dari PDB

Pada bulan Agustus, Pemerintah meluncurkan RAPBN 2012. Rancangan Anggaran itu menargetkan penurunan defisit menjadi Rp 126 triliun atau 1,5 persen dari PDB. Asumsi RAPBN untuk pertumbuhan PDB di tahun 2012 adalah 6,7 persen. Asumsi harga minyak diturunkan relatif terhadap APBN-P tahun 2011 ke 90 dolar Amerika per barel. Untuk menurunkan defisit relatif terhadap APBN-P 2011, pertumbuhan pendapatan sebesar 10,5 persen relatif terhadap tahun 2011 diperkirakan akan lebih tinggi dari pertumbuhan pengeluaran (7,4 persen).

Di tahun 2012 Pemerintah akan meningkatkan belanja modal secara signifikan dan melanjutkan program-program sosial dan kemiskinan

Sementara jumlah belanja direncanakan akan meningkat sebesar 7,4 persen dibandingkan APBN-P 2011, alokasi belanja modal meningkat hingga 19 persen. Belanja kepegawaian juga meningkat, yang mencerminkan kenaikan gaji sebesar 10 persen dan berlanjutnya proses reformasi birokrasi. Dalam hal subsidi, Pemerintah akan meningkatkan tarif listrik sebesar 10 persen pada bulan April 2012, yang akan berkontribusi pada penurunan subsidi listrik sebesar sepertiga dibandingkan tahun 2011. Akan tetapi, alokasi anggaran untuk subsidi bahan bakar, walaupun berada di bawah alokasi untuk tahun 2011 dengan lebih rendahnya asumsi harga minyak, tetap berada di kisaran Rp 124 triliun (13 persen dari seluruh belanja pemerintah pusat). Hal ini

Rasio pajak diproyeksikan akan meningkat di tahun 2012 dan sensus wajib pajak sedang direncanakan

mencerminkan tidak adanya perubahan kebijakan subsidi bahan bakar di tahun 2012 walaupun Presiden telah menegaskan komitmen Pemerintah untuk secara berangsur-angsur membatasi konsumsi bahan bakar bersubsidi dalam rancangan pidato anggarannya di hadapan MPR.

Kuatnya pertumbuhan pajak penghasilan, PPN dan bea ekspor, yang mengikuti kuatnya kondisi ekonomi secara umum seperti yang telah diperkirakan, merupakan pendorong utama proyeksi pertumbuhan pendapatan. Menggunakan perkiraan PDB nominal yang dilakukan pemerintah (yang menggunakan inflasi IHK untuk meningkatkan PDB riil), rasio pajak terhadap PDB diperkirakan akan meningkat dari 12,2 persen pada APBN-P tahun 2011 menjadi 12,6 persen di tahun 2012. Untuk membantu usaha untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak, Kementerian Keuangan juga berencana untuk melakukan sensus pajak nasional bagi setidaknya 1,5 juta wajib pajak, baik badan maupun perorangan, untuk lebih memahami dan mengarahkan kebijakan masa depan untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak.

Untuk menarik lebih banyak investasi asing ke Indonesia, Pemerintah telah mengumumkan rencana pembebasan pajak (tax holiday)

Pemerintah juga telah mengumumkan rencana bagi pembebasan pajak (tax holiday) dan keringanan pajak yang bertujuan untuk menarik investasi asing ke Indonesia. Skema pembebasan pajak, yang berlaku sejak pertengahan bulan Agustus 2011, memberikan pembebasan pajak, dari lima hingga sepuluh tahun, bagi perusahaan-perusahaan yang memenuhi persyaratan tertentu. Termasuk di antaranya adalah beroperasi di dalam satu dari lima sektor industri dan berinvestasi dengan jumlah tidak kurang dari Rp 1 triliun di Indonesia. Keringanan pajak yang diusulkan diperkirakan berupa penurunan pajak penghasilan badan sebesar 5 persen untuk 6 tahun, sekali lagi bagi perusahaan-perusahaan yang memenuhi sejumlah kriteria investasi, penciptaan lapangan kerja, lokasi, dan sektor usaha.

Memperkirakan dampak upaya kebijakan tersebut terhadap pendapatan pajak badan adalah sesuatu yang sulit dengan tidak adanya kontrafaktual yang jelas. Akan tetapi sangat penting untuk memantau secara dekat untuk melihat efektivitasnya dalam menarik investasi dan potensi dampaknya terhadap pendapatan.

Pemerintah telah membiayai sebagian besar defisit APBN-P 2011

Defisit Pemerintah dalam APBN-P tahun 2011 sebesar Rp 151 triliun diperkirakan akan dibiayai dengan penerbitan obligasi pemerintah bersih (Rp 127 triliun) dan dari saldo kas Pemerintah (Rp 40 triliun) yang telah terakumulasi dari kelebihan pembiayaan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini akan mengimbangi kekurangan pembiayaan bersih dari sumber-sumber lainnya.

Total pembiayaan bersih, termasuk pendanaan dari donor dan sumber-sumber lain, telah mencapai Rp 76 triliun pada akhir bulan Agustus. Per tanggal 12 September, penerbitan sekuritas bersih sebesar Rp 90 triliun telah mencapai dua per tiga dari target 2011 penerbitan sekuritas pemerintah bruto sebesar Rp 143 triliun. Posisi pembiayaan bersih sampai saat ini dan ditambah ketersediaan kas yang bersama-sama dengan tingkat hutang pemerintah yang rendah yang semakin menurun dan kebijakan fiskal yang konservatif, mendukung *outlook* pembiayaan jangka pendek Indonesia walaupun potensi gejolak pasar terus berlanjutnya.

Tabel 4: Proyeksi defisit tahun 2011 telah direvisi naik, terutama karena peningkatan pengeluaran subsidi energi (triliun rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2010 Outcome	2011 (p) Budget	2011 (p) Revised Budget	2011 (p) WB June estimates*	2011 (p) WB Sept estimates*	2012 (p) Proposed Budget
A. State revenue and grants	1,014.0	1,104.9	1,169.8	1,189.4	1,185.8	1,292.9
1. Tax revenue	744.1	850.3	878.6	858.6	857.1	1,019.3
a. Domestic tax	715.2	827.2	831.7	813.3	801.5	976.9
i. Income tax	356.6	420.5	431.9	432.3	419.7	512.8
- Oil and gas	58.9	55.6	65.2	77.0	65.4	58.7
- Non oil and gas	297.7	364.9	366.7	355.3	354.4	454.2
ii. Other domestic taxes	358.6	406.8	399.8	381.0	381.8	464.1
b. International trade tax	28.9	23.0	46.9	45.3	55.5	42.4
i. Import duties	20.0	17.9	21.5	24.5	25.4	23.5
ii. Export duties	8.9	5.1	25.4	20.7	30.1	18.9
2. Non-tax revenue	267.5	250.9	286.5	330.8	328.7	272.7
<i>o/w natural resources</i>	170.1	163.1	192.0	217.9	213.1	172.9
i. Oil and gas	152.7	149.3	173.2	197.5	192.8	156.0
ii. Non oil and gas	17.3	13.8	18.8	20.4	20.2	16.9
B. Expenditure	1,053.5	1,229.6	1,320.8	1,280.3	1,296.7	1,418.5
1. Central government	708.7	836.6	908.3	875.7	878.6	954.1
- Personnel	147.7	180.8	182.9	173.6	181.9	215.7
- Material expenditure	94.6	137.9	142.8	117.5	121.8	138.5
- Capital expenditure	75.5	135.9	141.0	116.1	122.6	168.1
- Interest payments	88.3	115.2	106.6	112.8	104.2	123.1
- Subsidies	214.1	187.6	237.2	262.2	256.8	208.9
- Grants expenditure	0.1	0.8	0.4	0.8	0.4	1.8
- Social expenditure	68.4	63.2	81.8	61.3	76.8	63.6
- Other expenditures	20.0	15.3	15.6	31.4	14.1	34.5
2. Transfers to the regions	344.7	393.0	412.5	404.6	418.1	464.4
C. Primary balance	48.9	-9.4	-44.4	21.9	-6.8	-2.5
D. SURPLUS / DEFICIT	(39.5)	(124.7)	(151.0)	(90.9)	(111.0)	(125.6)
(percent of GDP)	(0.6)	(1.8)	(2.1)	(1.2)	(1.5)	(1.5)
Economic assumptions/outcomes						
Gross domestic product (GDP)	6,423	7,020	7,227	7,462	7,399	8,120
Economic growth (percent)	6.1	6.4	6.5	6.4	6.4	6.7
CPI (percent)	5.1	5.3	5.7	5.9	5.6	5.3
Exchange rate (IDR/USD)	9,074	9,250	8,700	8,713	8,662	8,800
Interest rate** (average percent)	6.4	6.5	5.6	6.8	6.8	6.5
Crude oil price (USD/barrel)	79	80	95	105	105	90
Oil production ('000 barrels/day)	954	970	945	952	945	950

Catatan: *Ramalan pendapatan Bank Dunia menggunakan metodologi yang berbeda dari Pemerintah untuk mendapatkan proyeksi PDB nominal (lihat pembahasan lengkap pada Bagian C dari Triwulanan edisi bulan Juni 2010)

** Suku bunga untuk 2010 dan APBN 2011 adalah suku bunga 3 bulan SBI, dan APBN-P 2011 dan R-APBN 2012 adalah tingkat suku bunga 3 bulan SBN. Bank Dunia menggunakan suku bunga BI

Sumber: Kemenkeu dan proyeksi Bank Dunia

8. Seperti kondisi ekonomi global, risiko jangka pendek terhadap outlook Indonesia meningkat

Dampak negative yang berkaitan dengan outlook finansial dan ekonomi global semakin terlihat...

Beberapa risiko yang sebelumnya telah disinggung pada Triwulanan edisi Juni 2011 tentang melemahnya pertumbuhan global dan keluarnya aliran porfolio dari Indonesia telah menjadi kenyataan. Risiko utama jangka pendek terhadap Indonesia tetaplah berasal dari luar negeri dan pertanyaan seberapa jauh dampak penurunan outlook finansial dan ekonomi global terhadap Indonesia akan dibahas pada bagian berikut. Dampak langsung dari penurunan pertumbuhan di AS dan Uni Eropa terhadap ekonomi Indonesia tampaknya akan terbatas. Akan tetapi, jika terjadi penurunan global yang lebih luas, terutama pada ekonomi-ekonomi berkembang utama (*major emerging economies*), dan koreksi tajam pada harga-harga komoditas, maka dampak riil terhadap Indonesia akan lebih kuat.

Dampak ekonomi riil dari berlanjutnya gejolak pasar internasional akan relatif terbatas terhadap Indonesia dengan kuatnya kinerja ekonomi belakangan ini dan ketersediaan penyangga yang siap menghadapi guncangan tersebut, termasuk rendahnya tingkat hutang pemerintah dan peningkatan dalam cadangan devisa. Akan tetapi para investor internasional masih memiliki beberapa keprihatinan akan kualitas kebijakan Indonesia, walaupun kekuatan dan ketahanan ekonominya sudah diterima secara umum. Sehingga, untuk merespon keprihatinan investor tersebut, Pemerintah Indonesia harus melanjutkan penerapan kebijakan dalam negeri yang konsisten dan terkoordinasi dengan baik untuk menghindari perluasan guncangan keuangan masa depan yang berasal dari luar negeri. Seperti disinggung di atas, penghindaran pengambilan kebijakan yang keliru akan menjadi sangat penting di dalam lingkungan yang akan tetap bergolak.

... risiko-risiko yang berkaitan dengan harga-harga komoditas tetap ada...

Risiko terhadap *outlook* yang berkaitan dengan pergerakan harga komoditas, seperti disoroti pada Triwulanan yang lalu, tetap bertahan. Menurunnya harga-harga komoditas karena lingkungan eksternal yang lebih lemah dapat mempengaruhi pertumbuhan PDB Indonesia melalui dampaknya terhadap perdagangan dan investasi dan konsumsi domestik, yang selanjutnya akan menurunkan pendapatan fiskal dari sektor-sektor sumber daya (lihat Bagian B dari Triwulanan edisi bulan Juni 2010).

Outlook inflasi Indonesia juga peka terhadap pergerakan harga komoditas, terutama pada harga beras dalam negeri, dan juga rentan terhadap guncangan buruk hasil panen, seperti terjadi pada tahun 2010, atau terhadap ketersediaan dan harga beras di pasar internasional. Seperti pada saat harga-harga komoditas dunia turun atau stabil pada bulan Agustus dan September, harga beras internasional meningkat secara signifikan.

Penyesuaian terhadap harga-harga energi yang diatur oleh pemerintah (di subsidi) juga membawa risiko kepada outlook inflasi, yang besarnya bergantung pada waktu, sifat dan besaran reformasi. Jika harga minyak internasional bergerak semakin turun maka tekanan fiskal untuk reformasi subsidi dapat dikurangi. Akan tetapi, besaran yang diperlukan untuk menutup celah perbedaan harga pasar dan harga subsidi juga akan lebih rendah, yang selanjutnya menurunkan biaya reformasi, dan dalam hal dampak terhadap inflasi, juga dapat diperkecil.

...sementara itu risiko-risiko jangka menengah difokuskan pada pelaksanaan reformasi dan belanja untuk mendorong tingkat pertumbuhan

Sementara fokusnya adalah pada risiko jangka pendek yang berasal dari perkembangan di dunia internasional, tantangan pembangunan dan pertumbuhan jangka menengah Indonesia masih ada. Termasuk di dalamnya adalah penanganan infrastruktur dan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan iklim investasi. Sementara terdapat peningkatan yang cukup besar pada alokasi belanja modal pada APBN 2011 dan RAPBN 2012, kesulitan dalam pelaksanaan anggaran dapat memunculkan risiko bahwa dana-dana tersebut tidak sepenuhnya dapat dicairkan atau tidak digunakan secara efisien. Sejalan dengan itu, dibutuhkan kemajuan lebih lanjut dalam mendorong peningkatan investasi sektor swasta di bidang infrastruktur, yang dapat berbentuk kerjasama pemerintah swasta (lihat Bagian B). Perkembangan lebih lanjut pada bidang-bidang tersebut diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan dan pembangunan pada jangka menengah juga untuk memelihara kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang kuat.

B. BEBERAPA PERKEMBANGAN TERBARU PEREKONOMIAN INDONESIA

1. Potensi pengaruh penurunan *outlook* dunia terhadap Indonesia

Dengan situasi ekonomi dunia yang kini di “tahap baru yang berbahaya”, apa implikasi yang mungkin terjadi pada Indonesia ?

Menurut *Managing Director* IMF ekonomi dunia saat ini berada pada “tahap baru yang berbahaya; hampir semua negara mengalami peningkatan risiko, dimana sebagian besarnya adalah masalah ekonomi, solusinya adalah masalah politis.” Dimensi politik dan interaksinya dengan sentimen pasar keuangan, terutama yang berhubungan dengan penyelesaian krisis hutang Eropa dan dampaknya pada sektor perbankan, menambah ketidakpastian terhadap ramalan ekonomi jangka pendek manapun. Tak terkecuali untuk Indonesia, walaupun memiliki fundamental domestik yang kuat.

Dengan paparan (exposure) perdagangan langsung Indonesia dengan Eropa dan AS yang relatif rendah, pertumbuhan yang didorong oleh permintaan domestik, dan posisi fiskal yang kuat, ekonomi Indonesia berada dalam posisi yang lebih baik dalam menghadapi guncangan eksternal yang berasal dari negara maju. Akan tetapi, paparan yang tinggi terhadap aliran portfolio asing memberikan risiko terhadap pasar keuangan domestik dan – jika berkepanjangan – akan berdampak terhadap riil ekonomi, apabila terjadi sentimen negatif investor yang signifikan, walaupun semakin besarnya cadangan devisa. Karenanya, kebijakan domestik yang mendukung kepercayaan investor sangat penting dalam jangka pendek, bersama dengan kebijakan untuk meningkatkan pemantauan dan kesiagaan krisis dan terus membangun ketahanan guncangan pasar.

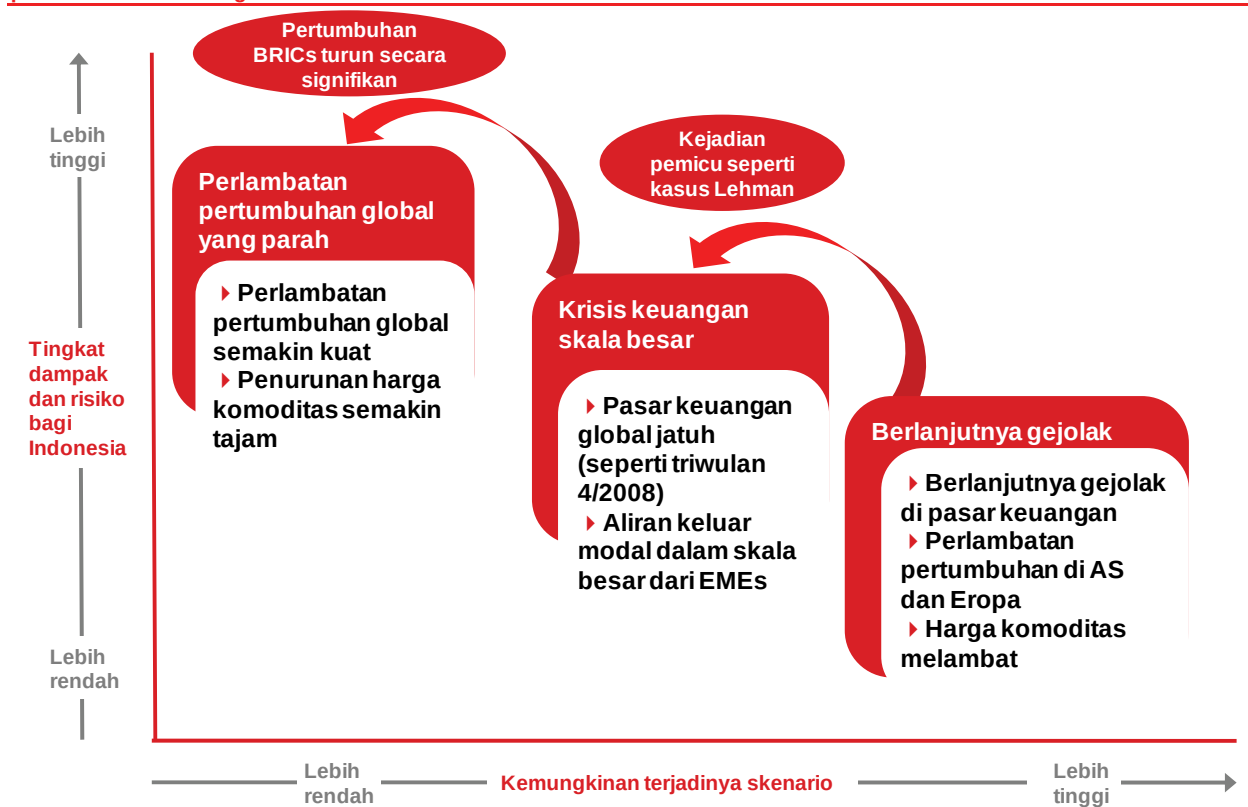
a. Memikirkan beberapa potensi skenario yang berkaitan dengan ekonomi global

Guncangan negatif pasar yang signifikan dapat menggeser *outlook* eksternal dari proyeksi dasar berlanjutnya volatilitas ke skenario krisis keuangan, yang dapat mengarah kepada penurunan pertumbuhan ekonomi global yang lebih parah jika pertumbuhan di ekonomi berkembang utama juga menurun

Dalam ketidakpastian global, bagian ini mencoba memberikan beberapa alternatif skenario jangka pendek mengenai kondisi ekonomi global 12-18 bulan ke depan, serta mempertimbangkan dampaknya bagi Indonesia. Skenario dasar seperti diuraikan pada Bagian A, yaitu k berlanjutnya gejolak pasar keuangan internasional, yang digabungkan dengan perlambatan pertumbuhan di Uni Eropa dan AS dan pelemahan harga-harga komoditas. Hal ini dipandang sebagai skenario dengan kemungkinan yang besar, dan skenario dengan dampak yang lebih rendah bagi Indonesia (Gambar 21).

Akan tetapi, risiko-risiko terhadap *outlook* internasional cenderung memburuk. Alternatif skenario kedua, pemicu seperti krisis Lehman, kemungkinan besar berkaitan dengan kekacauan gagal bayar di zona Eropa; mengakibatkan pembekuan pasar-pasar keuangan di seluruh dunia, seperti yang terjadi di akhir triwulan 2008, menghambat pertumbuhan global dan memicu aliran modal keluar dari pasar ekonomi berkembang utama. Skenario ke tiga, mempunyai kemungkinan terkecil tapi berdampak yang paling besar, yaitu bila perlambatan pertumbuhan dan krisis pasar keuangan di negara maju menyebabkan ekonomi negara berkembang utama mengalami penurunan yang tajam (*hard landing*); menyebabkan perlambatan pertumbuhan global dan penurunan drastis harga – harga komoditas. Tentu saja ada kemungkinan potensi lainnya, tetapi 3 skenario ini mencakup beragam potensi negatif dari risiko-risiko eksternal.

Gambar 21: Skenario untuk outlook eksternal termasuk berlanjutnya gejolak pasar keuangan sampai penurunan tajam pertumbuhan ekonomi global



Sumber: Staf Bank Dunia

Catatan EMEs: Emerging market economies (ekonomi negara berkembang utama)

Dampak terhadap Indonesia akan bergantung dari sifat guncangan eksternal, jalur transmisi, bersama dengan kerentanan atau pertahanan kondisi domestik, dan respon kebijakan

Dampak skenario-skenario tersebut terhadap Indonesia akan banyak bergantung pada ukuran dan cakupan guncangan tersebut terhadap ketidakstabilan pasar keuangan dan permintaan eksternal. Dampaknya juga akan bergantung dari bagaimana mereka ditransmisikan ke Indonesia, apakah melalui jalur perdagangan, pasar keuangan atau sektor perbankan, sesuai tingkat paparan (*exposure*) domestik atau kerentanan terhadap guncangan tersebut, dan bagaimana kebijakan mitigasi atau tanggapan yang dipilih oleh pemerintah Indonesia. Dampak jangka pendek juga dapat berbeda dengan dampak jangka menengah.

Tabel 5 merangkum guncangan-guncangan eksternal dan memperlihatkan dampaknya terhadap Indonesia berdasarkan alternatif skenario yang diperkenalkan di atas. Memang ini tidak terlalu rinci, tapi bertujuan memperjelas faktor-faktor utama yang mungkin mempengaruhi ekonomi Indonesia berdasarkan skenario yang ada. Penilaian ini memperhitungkan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia terhadap guncangan telah meningkat beberapa tahun terakhir, seperti ditunjukkan pada krisis tahun 2008-09. Namun demikian, upaya kebijakan antisipatif dapat berperan penting dalam mengecilkan efek dari guncangan-guncangan dimasa depan.

Tabel 5: Skenario berbeda ekonomi global dapat mengakibatkan berbagai dampak terhadap perekonomian Indonesia

	SKENARIO 1: BERLANJUTNYA GEJOLAK	SKENARIO 2: KRISIS KEUANGAN BESAR	SKENARIO 3: PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL YANG PARAH
GONCANGAN EKSTERNAL:			
PERTUMBUHAN EKONOMI MAJU	Perlambatan pertumbuhan di zona Euro dan pertumbuhan yang lemah di AS	Perlambatan pertumbuhan yang lebih besar karena dampak riil dari krisis keuangan dan pengetatan kredit	Tambahan penurunan relatif terhadap skenario 2
PERTUMBUHAN PASAR BERKEMBANG UTAMA	Perubahan kecil – dukungan dari permintaan domestik dan/atau upaya kebijakan	Hambatan moderat terhadap pertumbuhan akibat pengetatan kredit	Menurunnya permintaan dunia dan pengaruh kepada pasar keuangan memicu perubahan seketika arah pertumbuhan pasar berkembang
HARGA KOMODITAS	Melemah	Penurunan tambahan relatif terhadap skenario 1	...menuju kejatuhan yang lebih dalam untuk harga komoditas dunia Seperti pada skenario 2
PASAR KEUANGAN INTERNASIONAL	Berlanjutnya gejolak, pelarian modal mencari kualitas dan penurunan permintaan akan aset pasar berkembang	Pemecahan masalah krisis hutang zona Euro yang kacau memicu pembekuan pasar kredit internasional, peningkatan tajam dalam penghindaran risiko dan penjualan besar-besaran aset pasar berkembang	
POTENSI DAMPAK PADA INDONESIA	Terbatas melalui jalur perdagangan – hubungan ekspor langsung ke Uni Eropa dan AS yang terbatas tetapi kaitan tidak langsung yang lebih tinggi melalui mitra perdagangan regional. Namun PDB Indonesia relatif kurang bergantung pada permintaan eksternal. Terus berlangsungnya gejolak pasar keuangan (hal serupa yang terjadi pada bulan Mei 2010). Telah meningkatnya ketahanan Indonesia terhadap guncangan keuangan jangka pendek.	Dampak kepercayaan perdagangan dan domestik diperkuat ditambah dampak negatif jika pendanaan perdagangan menerima pengaruh yang sangat kuat Peningkatan pengaruh jalur keuangan – pembatasan akses terhadap pendanaan internasional; penjualan besar-besaran kepemilikan saham dan obligasi pemerintah oleh investor asing; tekanan turunnya kurs tukar dari aliran keluar modal	Dampak sektor riil seperti pada skenario dua dengan tambahan dampak negatif melalui jalur perdagangan karena paparan terhadap pasar berkembang dan permintaan komoditas Pengaruh jalur keuangan dari guncangan eksternal serupa dengan skenario 2 dan tambahan dampak melalui kaitan pasar keuangan domestik dan harga komoditas

Sumber: Staf Bank Dunia

b. Bagaimana guncangan internasional dapat ditransmisikan ke Indonesia?

Guncangan internasional dapat menjalar ke Indonesia melalui tiga jalur utama – perdagangan, aliran keuangan dan sektor perbankan

Ada tiga jalur utama yang menyebabkan guncangan internasional dapat berdampak pada perekonomian suatu negara – yaitu jalur perdagangan dan harga komoditas, aliran modal portofolio dan FDI, dan keterkaitan di sektor perbankan. Dampak dari tiga jalur transmisi ini akan berinteraksi dengan guncangan yang terjadi melalui perekonomian. Juga adanya timbal balik antar dampak tersebut (sebagai contoh, pengetatan di dalam pembiayaan di sektor perbankan di luar negeri dapat berdampak terhadap arus perdagangan). Sebagai langkah awal pemetaan dampak memburuknya perekonomian global, maka ada baiknya jika kita memperhatikan dengan seksama apa pengaruh dari setiap jalur yang telah disebutkan terhadap perekonomian Indonesia.

Perdagangan langsung Indonesia dengan AS dan Uni Eropa relatif terbatas, tetapi melalui mitra dagang lain dampak tak langsung yang ditimbulkan mungkin lebih signifikan

Krisis keuangan global tahun 2008-09 menunjukkan paparan (*exposure*) perekonomian Indonesia terhadap guncangan permintaan eksternal relatif rendah. Namun demikian, perlambatan pertumbuhan di AS dan zona Eropa akan mempengaruhi Indonesia melalui lebih rendahnya perdagangan dengan pasar-pasar tersebut dan juga secara tidak langsung melalui pasar sekunder (seperti Cina). Dampak perdagangan langsung terhadap Indonesia tampaknya akan terbatas, dengan ekspor ke AS dan Uni Eropa masing-masing hanya sekitar 9 persen dari keseluruhan jumlah ekspor Indonesia pada tahun 2010, dibandingkan dengan 16 persen dengan Jepang dan 23 persen dengan ekonomi ASEAN utama lainnya (Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina). Akan tetapi, permintaan dunia yang melemah juga akan menurunkan permintaan ekspor dari mitra

dagang Indonesia lainnya, karena posisi barang Indonesia umumnya merupakan bahan baku / barang setengah jadi dari barang jadi yang akan dikirimkan ke pasar AS dan Uni Eropa, dan juga secara umum jika pertumbuhan pada mitra-mitra dagang itu melemah. Mengambil Cina sebagai contoh, penurunan permintaan dari AS dan Uni Eropa – yang masing-masing memiliki porsi 18 persen dan 16 persen dari ekspor Cina tahun 2009 – secara tidak langsung akan menurunkan permintaan ekspor dari Indonesia ke Cina (sekitar 10 persen dari keseluruhan jumlah ekspor pada tahun 2010, Tabel 6).

Tabel 6: Perlambatan yang terjadi di AS dan Eropa menpengaruhi Indonesia baik langsung dan tak langsung melalui perannya sebagai “pemasok” bahan baku dari mitra dagang lainnya (bagian dari total ekspor tahun 2010, persen)

Ekspor dari:	Ekspor ke:								
	CHN	UE	IND	IDN	JPN	KOR	MYS	SGP	AS
Cina (CHN)	–	16.4	2.6	1.4	7.7	4.4	1.5	2.1	18.0
UE	8.4	–	2.6	0.5	3.2	2.1	0.8	1.8	18.0
India* (IND)	5.9	20.4	–	1.7	1.8	2.1	2.0	3.8	10.8
Indonesia (IDN)	9.9	8.6	6.3	–	16.3	8.0	5.9	8.7	9.1
Jepang (JPN)	19.4	12.2	1.2	2.1	–	8.1	2.3	3.3	15.6
Korea, Rep.* (KOR)	23.9	11.9	2.2	1.7	6.0	–	2.1	3.7	10.4
Malaysia (MYS)	12.6	10.5	3.3	2.8	10.4	0.0	–	13.4	9.5
Singapura* (SGP)	7.5	10.0	3.8	9.4	4.7	4.1	11.0	–	6.5
AS	7.2	20.0	1.5	0.5	4.7	3.0	1.1	2.3	–
Asia Timur-5	14.2	11.4	2.8	4.5	7.5	1.7	5.3	4.9	9.3

Catatan: * bagian perdagangan tahun 2009. EA-5 terdiri dari Korea, Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina

Biru menunjukkan bagian ekspor dari 5 hingga 10 persen dan merah muda di atas 10 persen

Sumber: World Integrated Trade Solution (WITS)

Menurut sektor, ekspor manufaktur kemungkinan terkena dampak yang paling signifikan oleh perlambatan di Uni Eropa dan AS...

Ekspor manufaktur Indonesia tampaknya akan menerima pengaruh yang paling berat dari perlambatan di yang terjadi AS dan Uni Eropa, karena keduanya merupakan pasar utama bagi ekspor tekstil, pakaian, alas kaki dan peralatan transportasi. Ekspor manufaktur juga dapat terpengaruh secara tidak langsung, karena barang-barang yang dikirimkan ke pasar ketiga (seperti Singapura) juga pada akhirnya dikonsumsi oleh pasar-pasar negara maju. Sementara ekspor komoditas umumnya dikirimkan ke Cina, India, Jepang dan Korea, merupakan *input* investasi infrastruktur (Tabel 7). Didorong oleh pertumbuhan regional yang masih kuat, volume ekspor tersebut dapat terpengaruh lebih rendah dari perlambatan yang terjadi di AS dan Uni Eropa. Akan tetapi, seperti dibicarakan di bawah, interaksi ini meningkatkan kekhawatiran akan skenario ketiga di mana akan terjadinya pembalikan arah pada pasar-pasar tersebut, yang kemudian diikuti oleh penurunan pada harga dan permintaan komoditas.

Tabel 7: Industri manufaktur paling terpengaruh langsung terhadap AS dan Uni Eropa sementara komoditas lebih bergantung pada permintaan regional (bagian jumlah ekspor mitra perdagangan utama, 12 bulan hingga bulan Mei 2011, persen)

	Total	Migas	Non-migas	Tani & Hut.	Tambang & Min.	Manu.
CH	10,0	1,0	9,0	2,4	3,8	1,9
UE	7,5	0,0	7,5	2,8	0,8	3,8
IND	6,5	0,0	6,5	3,4	2,4	0,7
JPN	16,8	7,0	9,8	2,2	4,8	2,9
KOR	7,8	3,8	4,0	0,7	2,2	1,2
SGP	7,9	2,2	5,8	1,1	1,1	3,5
AS	8,8	0,5	8,3	2,7	0,2	5,5

Catatan: Tani & Hut. adalah pertanian dan kehutanan; Tambang & Min. adalah pertambangan dan mineral; Manu. adalah produk-produk manufaktur
Sumber: BPS

Pergerakan harga-harga komoditas dunia merupakan jalur penghantar lainnya ke Indonesia

Revisi penurunan pertumbuhan global telah mengakibatkan perlambatan pada harga komoditas internasional (seperti diuraikan pada Bagian A). Jika pemicu penurunan harga komoditas global adalah permintaan dari pasar-pasar ekspor regional utama Indonesia, terutama Cina, maka jatuhnya harga tampaknya berkaitan dengan penurunan volume ekspor. Seperti diuraikan di bawah, penurunan harga komoditas global memiliki dampak yang lebih luas bagi Indonesia dibanding sekedar perannya dalam neraca perdagangan dan neraca eksternal. Ini disebabkan karena komoditas mempunyai pengaruh yang cukup berarti pada posisi fiskal, investasi domestik, konsumsi dan inflasi di Indonesia.

Hubungan PMA langsung ke US atau Eropa relatif kecil

Penurunan global yang didorong oleh AS/Uni Eropa juga akan mempengaruhi aliran modal dunia. Menurut data Bank Indonesia, aliran masuk FDI ke Indonesia dari AS dan Uni Eropa telah menurun pada beberapa tahun terakhir, dengan rata-rata 1,4 miliar dolar Amerika per tahun untuk periode tahun 2008 – 2010, atau sekitar 15 persen dari seluruh jumlah FDI. Lebih dari 60 persen FDI ke Indonesia berasal dari Asia, dengan Singapura dan Jepang memiliki dua per tiga bagian dari aliran masuk tersebut. Akan tetapi beberapa aliran tersebut juga dapat merupakan FDI yang berasal dari perusahaan dengan afiliasi induk di AS atau Uni Eropa.

Menguji bagaimana penurunan pertumbuhan di AS dan Uni Eropa akan mempengaruhi FDI ke Indonesia diperumit dengan berbagai penentu keputusan FDI baik dari sisi pendorong maupun penarik. Dari sisi pendorong berkaitan dengan kondisi pasar asal perusahaan, dengan bukti bahwa aliran FDI lintas negara menunjukkan bahwa penurunan ekonomi di negara asal, dengan hal-hal lain tetap sama, memang cenderung menurunkan aliran keluar FDI. Selain itu terdapat faktor penarik FDI (dibahas pada Triwulanan edisi bulan Juni 2011) yang termasuk kekayaan sumber daya Indonesia, relatif rendahnya upah buruh dan pasar domestik yang besar dan bertumbuh. Dengan pendorong-pendorong fundamental tersebut diperkirakan akan terus berlanjut pada jangka menengah, prospek pertumbuhan Indonesia yang lebih tinggi relatif terhadap AS dan Uni Eropa tampaknya akan makin meningkat, terutama karena adanya *outlook* ekonomi domestik jangka pendek yang positif seperti diuraikan pada Bagian A. Juga perlu dicatat bahwa investasi FDI cenderung bersifat jangka panjang, membatasi kebutuhan penilaian ulang posisi yang seringkali terjadi untuk perkembangan jangka pendek.

...tetapi ekonomi menunjukkan intensitas paparan keterkaitan yang relatif tinggi terhadap aliran modal

Daya tarik tingginya suku bunga, kuatnya ekonomi domestik dan neraca sektor keuangan dan pemerintah yang kuat, menjadikan Indonesia mencatat aliran masuk investasi portofolio asing sebesar lebih dari 26 miliar dolar AS di kurun waktu triwulan 1/2010 dan triwulan 2/2011, sebagaimana yang dicatat oleh data Neraca Pembayaran Bank Indonesia. Data dari Survei Investasi Portofolio Terkoordinasi IMF menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen dari investasi portofolio ke Indonesia berasal dari AS dan Uni Eropa di periode tahun 2008-09. Akan tetapi, *outlook* dari seluruh investor portofolio asing, tanpa melihat negara asalnya, memperlihatkan potensi pelemahan seiring dengan melemahnya pertumbuhan di pasar dunia. Dengan berhentinya perekonomian global, Indonesia – sebagaimana pasar berkembang lainnya – menghadapi risiko-risiko berbaliknya aliran modal yang didorong oleh meningkatnya aksi menghindari risiko global dan motivasi memindahkan aset ke alternatif instrumen yang lebih aman (seperti telah terlihat pada beberapa tingkat selama bulan Agustus dan September di Indonesia dan ekonomi membangun lainnya). Dalam hal ini, pasar-pasar berkembang yang mencatat peningkatan terbesar pada beberapa tahun terakhir (termasuk Indonesia) ternyata juga mencatat koreksi yang terbesar. Mekanisme penghantar lain yang berkaitan adalah dampak badai keuangan di pasar dunia terhadap biaya atau kemampuan untuk melakukan akses kepada sumber-sumber pendanaan internasional, seperti obligasi global, bagi perusahaan-perusahaan atau Pemerintah Indonesia.

Pinjaman bank asing memiliki porsi yang kecil dalam sistem perbankan Indonesia...

Walaupun informasi yang menampilkan interaksi langsung bank-bank Indonesia dengan surat hutang negara zona Euro sangat terbatas, diperkirakan posisi Indonesia untuk hal ini relatif kecil. Akan tetapi, jika perkembangan global membawa pengaruh buruk pada neraca bank-bank internasional berukuran besar, bank-bank tersebut dapat memutuskan untuk menarik dana dari pasar-pasar berkembang, seperti Indonesia, untuk mengisi kembali bagian neraca di negara asalnya (walaupun melawan motivasi untuk memelihara, atau meningkatkan, keberadaan pada pasar dengan potensi prospek pertumbuhan yang tinggi). Sementara sebagian besar bank-bank dan perusahaan-perusahaan utama Indonesia tampaknya akan mampu bertahan dari penarikan kembali dana-dana bank

asing, masih ada kemungkinan bahwa dampaknya pada bank-bank atau perusahaan yang lebih kecil akan lebih nyata. Akhirnya, peningkatan ketidakpastian pada pasar keuangan global dapat mempengaruhi likuiditas pasar antar-bank domestik – seperti terlihat pada akhir tahun 2008. Untuk menangani masalah ini, baru-baru ini BI mengumumkan kebijakan yang lebih fleksibel dalam penentuan batas bawah suku bunga kebijakan, suatu kebijakan yang dirancang untuk mendorong dana jangka pendek untuk tetap tinggal di pasar antar-bank, dibanding disimpan pada bank sentral.

c. Potensi dampak jangka pendek terhadap ekonomi Indonesia

Paparan (exposure) Indonesia terhadap aliran investor asing telah meningkat sejak tahun 2008, tetapi juga cakupan respon kebijakan

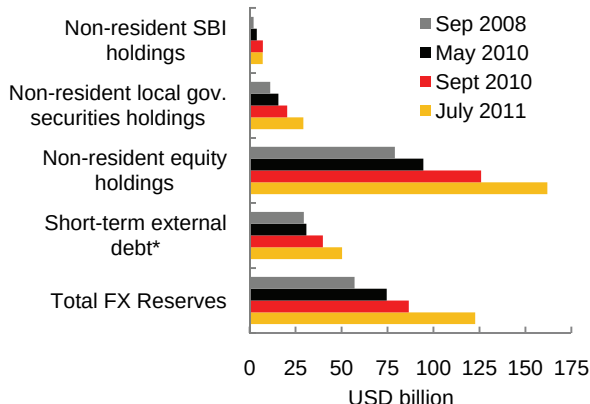
Bagaimana penalaran guncangan tersebut mempengaruhi Indonesia dalam jangka pendek? Hal itu sangat bergantung pada sifat guncangannya, sumber daya yang tersedia bagi Indonesia untuk memitigasi potensi kerentanan, kinerja ekonomi dan perbankan domestik dan kerangka kebijakan Pemerintah.

Seperti diuraikan pada Bagian A, Indonesia memasuki situasi global yang berjalan dengan posisi ekonomi makro yang kuat, dengan penyangga yang cukup besar untuk menyerap guncangan sektor keuangan. Cadangan telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak tahun 2008 menjadi 122 miliar dolar AS pada pertengahan bulan September, yang cukup untuk menutupi 40 persen hutang luar negeri jangka pendek menurut jatuh temponya, dan 7,1 bulan impor dan hutang luar negeri Pemerintah. Namun demikian, potensi keluarnya dana asing dari Indonesia juga meningkat sejak tahun 2008, yang mengharuskan berlanjutnya penerapan kebijakan kehati-hatian (Gambar 22). Pemerintah telah menempatkan suatu mekanisme untuk mendukung pasar obligasi domestik jika dibutuhkan melalui penggunaan sebagian dari surplus uang tunainya, dengan pengesahan DPR, dan BI juga telah mengumumkan suatu mekanisme untuk pembelian obligasi secara langsung. Jika guncangan negatif lebih banyak menyebar melalui jalur riil – seperti penurunan permintaan akan ekspor Indonesia – maka upaya fiskal untuk menstimuli ekonomi domestik mungkin juga dibutuhkan. Setelah melaksanakan kebijakan fiskal yang relatif konservatif selama beberapa tahun, Indonesia memiliki ruang fiskal yang cukup bagi paket fiskal berukuran besar jika memang diperlukan.

...dan sektor perbankan nasional juga telah menguat selama dekade yang lalu

Kinerja terakhir sektor keuangan Indonesia juga bertindak sebagai penyangga ketidakstabilan pasar keuangan yang baru terjadi. Hal ini sebagian disebabkan oleh upaya otoritas sektor keuangan selama dekade yang lalu untuk meningkatkan keseluruhan kerangka peraturan dan pemantauan. Kinerja sektor perbankan menguat sejak tahun 2008, dengan bank-bank menunjukkan kecukupan modal yang tinggi dan tingkat kredit macet yang terus menurun. Aset bank-bank umum terus-menerus meningkat. Walaupun sektor perbankan ditandai oleh tingkat likuiditas yang tinggi, tingkatan tersebut harus dipantau karena perbedaan tingkat likuiditas antar bank. Secara keseluruhan, bank-bank lapis kedua cenderung memiliki likuiditas yang lebih rendah dibanding bank-bank papan atas. Industri asuransi dan pensiun juga telah bertumbuh, walaupun ekspansi terus-menerus dari sektor keuangan non-bank juga akan dibutuhkan untuk memenuhi efisiensi sektor keuangan jangka panjang pada sasaran pemerintah untuk intermediasi dan stabilitas sektor keuangan. Sebagai akibat dari penyangga-penyangga guncangan tersebut, sektor keuangan Indonesia hingga saat ini hanya menerima pengaruh yang terbatas dari perkembangan pasar keuangan.

Gambar 22: Potensi aliran keluar dana asing makin meningkat seiring dengan makin besarnya cadangan devisa (miliar dolar Amerika)



Catatan: * hutang eksternal jangka pendek per jatuh tempo
Sumber: BI, KSEI, CEIC dan Bank Dunia

Juga terdapat risiko terhadap ekonomi Indonesia yang muncul dari harga komoditas dan kurs tukar

Seperti diuraikan sebelumnya, perlambatan global akan berdampak pada perekonomian riil melalui jalur perdagangan langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi ekonomi dengan paparan yang relatif rendah terhadap permintaan eksternal memberikan sedikit perlindungan. Sebagai contoh, ekspor Indonesia terhadap PDB adalah kurang dari 25 persen di tahun 2010, dibanding Malaysia yang mendekati 100 persen ataupun Thailand yang melebihi angka 70 persen.

Gejolak permintaan dan harga komoditas internasional tetap merupakan sumber kerentanan yang harus terus diwaspadai bagi Indonesia, sesuai dengan porsi ekspor dan kepekaan anggaran terhadap harga minyak. Kejatuhan harga komoditas yang tajam dapat membawa pengaruh buruk terhadap neraca perdagangan luar negeri Indonesia. Hal itu juga akan memotong belanja subsidi tetapi pada waktu yang bersamaan mengurangi pendapatan fiskal dari sektor sumber daya alam (analisis yang lalu menunjukkan bahwa defisit fiskal berkurang dengan harga komoditas yang lebih tinggi secara keseluruhan tetapi meningkat mengikuti lebih tingginya harga minyak). Harga komoditas yang lebih rendah juga dapat menurunkan profit di sektor komoditas dan industri terkait, yang selanjutnya dapat menurunkan investasi dalam dan luar negeri, dan melemahkan konsumsi domestik. Pergerakan harga komoditas internasional juga dapat mempengaruhi inflasi dalam negeri yang jalurnya juga akan sangat bergantung pada jalur pergerakan kurs nilai tukar.

Di bawah skenario yang lebih pesimis terhadap ekonomi global, PDB domestik menunjukkan perlambatan dan tekanan terhadap Neraca Pembayaran akan meningkat

Memperhitungkan kerentanan dan pertahanan tersebut, di luar sulitnya membuat ramalan pada kondisi yang sedang bergolak, memperkirakan potensi dampak terhadap ekonomi Indonesia sesuai tiga skenario ekonomi global yang diuraikan sebelumnya dapat memberikan informasi yang berharga bagi para penyusun kebijakan.

Proyeksi dasar Bank Dunia yang diuraikan pada Bagian A disusun berdasarkan Skenario 1. Dalam kondisi ini, pertumbuhan diperkirakan 6,4 persen di tahun 2011, dan melemah ke 6,3 persen di tahun 2012. Neraca Pembayaran diperkirakan akan mencatat surplus yang sehat, walaupun sedikit melambat, selama dua tahun. Pada Skenario 2, dengan skenario krisis keuangan besar, PDB diturunkan hingga 0,8 poin persentase di tahun 2012, mencerminkan tingkat investasi dan ekspor yang lebih rendah (Tabel 8). Surplus Neraca Pembayaran juga diperkirakan akan lebih rendah secara signifikan, karena mengecilnya surplus perdagangan dan lebih rendahnya aliran masuk modal bersih. Pada Skenario 3, yang paling pesimistis, dengan perlambatan pertumbuhan global yang parah, pertumbuhan Indonesia diproyeksikan makin melambat, turun ke 4,1 persen di tahun 2012. Kombinasi pasar keuangan yang lebih ketat dan harga komoditas yang lebih rendah tampaknya akan makin memperkecil Neraca Pembayaran, dan dapat berpotensi menjadi defisit, seperti yang dialami pada waktu krisis tahun 2008. Penting untuk dicatat bahwa proyeksi pertumbuhan ini menggabungkan skenario eksternal dengan perlambatan pendorong ekonomi domestik seperti konsumsi dan investasi. Dalam hal yang mungkin tidak terjadi seperti berhentinya faktor pendorong pertumbuhan tersebut, maka proyeksi tentu saja akan berbeda.

Tabel 8: Penurunan ekonomi global yang parah akan menyebabkan penurunan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi domestik

Skenario:	Skenario 1			Skenario 2			Skenario 3			Hasil	
	Goncangan keuangan internasional yang terus berlanjut			Krisis keuangan internasional besar			Perlambatan global yang parah				
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2008	2009
Pertumbuhan PDB Indonesia (persen)	6,1	6,4	6,3	6,1	6,3	5,5	6,1	6,3	4,1	6,0	4,6
Asumsi skenario:											
Rasio Investasi/PDB (persen)	23,9	24,6	25,3	23,9	24,6	24,6	23,9	24,6	23,6	23,7	23,4
Pertumbuhan PDB mitra dagang utama (persen)	6,8	3,3	3,9	6,8	3,2	2,0	6,8	3,0	-1,8	2,0	-1,4
Pertumbuhan terms of trade (persen)	5,3	10,0	0,0	5,3	8,0	-15,0	5,3	7,0	-30,0	-18,1	-4,2

Catatan: 2011 dan 2012 merupakan hasil proyeksi. Rasio riil investasi terhadap PDB. *Terms of trade* dihitung oleh staf World Bank menggunakan data perdagangan luar negeri bulanan. Sumber: CEIC dan proyeksi staf Bank Dunia

d. Peran kebijakan pendukung dan pentingnya menghindari kesalahan kebijakan

Peristiwa-peristiwa global yang akhir-akhir ini terjadi merupakan pengingat akan pentingnya reformasi berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal dan persiapan kebijakan untuk memitigasi dampaknya...

Gejolak pasar yang baru terjadi berguna sebagai pengingat akan pentingnya memelihara kemajuan reformasi untuk memperkuat ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal, sebagai contoh, semakin kuatnya pengaturan dan pemantauan sektor keuangan. Seperti disinggung pada Bagian A, Pemerintah dan BI baru-baru ini telah menempatkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mendukung pasar obligasi domestik dalam hal terjadinya pembalikan arah aliran modal, yang melengkapi upaya-upaya sebelumnya untuk menurunkan risiko bergulir (*roll-over*) dengan memperpanjang rata-rata jatuh tempo dan meningkatkan periode penyimpanan SBI. BI juga menargetkan kebijakan *macro-prudential* lebih lanjut, seperti mengharuskan eksportir untuk melakukan repatriasi pendapatan ekspor.

Memburuknya situasi ekonomi dunia yang begitu, secara tak langsung bermanfaat kepada Indonesia dalam hal terciptanya kebijakan baru yang mendorong kepercayaan dan kesiapan, serta terus mencegah kejadian atau tindakan yang berdampak buruk pada kepercayaan. Beberapa kemajuan diantaranya pada reformasi kebijakan utama, seperti pada reformasi subsidi, pembebasan lahan dan pendanaan infrastruktur, dapat mendorong kepercayaan investor, baik dalam maupun luar negeri. Juga, seperti baru-baru ini dimuat di surat kabar, Pemerintah dapat menyiapkan upaya anggaran antisipatif untuk mendorong permintaan dalam negeri dalam hal munculnya pengaruh yang lebih merusak. Seperti disinggung sebelumnya, Pemerintah kini memiliki ruang fiskal untuk mendanai stimulus seperti itu. Sebagai contoh, percepatan penerapan rencana belanja infrastruktur pemerintah yang dapat mendukung permintaan, meningkatkan prospek pertumbuhan jangka panjang, mendorong tingkat kepercayaan investor dan memanfaatkan potensi lebih rendah biaya *input* global.

...sementara menghindari upaya-upaya yang dapat memperburuk keprihatinan pasar

Di luar upaya-upaya kebijakan antisipatif tambahan tersebut, fundamental ekonomi makro Indonesia yang kuat dan kebijakan yang telah ada merupakan satu dari beberapa pertahanan terkuat untuk menghadapi gejolak yang kini berlangsung dan yang akan datang. Gejolak yang kini terjadi pada pasar keuangan makin mendorong penghindaran ketidakpastian kebijakan, terutama yang berkaitan dengan perubahan pembatasan dalam investasi asing dan dalam lingkungan peraturan dan pengelolaan.

e. Kembalinya aliran masuk modal pada jangka menengah memberikan insentif lebih lanjut untuk meneruskan kemajuan pada reformasi struktural utama

Pada jangka menengah, kembalinya aliran masuk modal tampaknya akan terus menjadi tantangan kebijakan bagi Indonesia, dan juga ekonomi-ekonomi berkembang utama lainnya

Pada jangka menengah, aliran masuk modal ke pasar-pasar berkembang tampaknya akan pulih kembali (seperti pada akhir tahun 2009 dan 2010 setelah gelombang pertama krisis keuangan dunia). Sekali lagi imbal hasil yang relatif tinggi, prospek pertumbuhan yang lebih tinggi dan kelayakan kredit yang meningkat tampaknya akan menarik likuiditas dari pasar-pasar maju. Dengan demikian Indonesia tampaknya akan tetap menghadapi tantangan berkelanjutan mengenai bagaimana mengelola tekanan lanjutan pada apresiasi kurs tukar valas yang berkaitan dengan aliran masuk tersebut, bagaimana meneruskan upaya menggeser aliran ke aliran masuk FDI yang lebih stabil, dan bagaimana memastikan bahwa aliran masuk itu memberi kontribusi kepada investasi, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan yang produktif menuju masa depan.

Kemajuan reformasi struktural yang berkelanjutan dapat mendukung ketahanan ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan dan inklusif

Walaupun dampaknya dapat terlihat pada jangka menengah, berlanjutnya upaya untuk memajukan agenda reformasi struktural (misalnya, yang berhubungan dengan iklim investasi dan pembatasan infrastruktur) berada pada pusat penanganan tantangan-tantangan tersebut. Reformasi tersebut dapat membantu menggeser keseimbangan aliran masuk agar lebih menuju FDI dari portofolio dan dapat meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan domestik bersama-sama dengan penguatan mata uang. Secara lebih luas mereka dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, inklusif dan lebih tinggi. Sebagai contoh, kemajuan pada reformasi subsidi bahan bakar dapat membebaskan belanja fiskal bagi kebutuhan pembangunan lain atau bagi kebijakan tanggapan untuk guncangan negatif di masa depan. Reformasi sektor perbankan dan keuangan – termasuk penguatan kerangka resolusi bank, penerapan Basel II dan pemeriksaan implikasi Basel III, pembangunan pasar modal, dan pengelolaan sektor keuangan yang baik – dapat mendukung investasi, pembangunan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja, dan juga mendorong stabilitas pasar keuangan yang lebih besar.

2. Menggunakan KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta) untuk menangani tantangan infrastruktur Indonesia

a. KPS merupakan fokus dalam agenda pembangunan Indonesia

Target pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia mengharapkan kontribusi yang signifikan dari sektor swasta

Seperti diuraikan pada Triwulanan edisi bulan Juni 2011, Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk menangani tantangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Komitmen tersebut terlihat dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2010-2014 dan penekanan terhadap infrastruktur dan konektivitas dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2015.

RPJMN dan MP3EI mengantisipasi investasi sektor swasta sebagai pendorong utama dalam percepatan pengadaan layanan infrastruktur. Sektor swasta ditargetkan menyumbang lebih dari 70 persen dari kebutuhan investasi sebesar 150 miliar dolar Amerika yang dinyatakan dalam RPJMN dan 51 persen dari rencana investasi Masterplan sebesar 468 miliar dolar Amerika antara tahun 2011 dan 2025. Salah satu cara untuk memobilisasi pendanaan swasta untuk investasi infrastruktur adalah melalui Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau *Public Private Partnership (PPP)*, yaitu pengaturan kontrak antara pihak pemerintah dan swasta dengan pembagian hak-hak dan kewajiban selama masa kontrak. KPS dapat membawa berbagai manfaat yang tidak hanya terbatas pada akses terhadap pendanaan tetapi juga dalam hal efisiensi, pengelolaan risiko kinerja dan penjaminan kualitas dan pemantauan (Kotak 1). Memperkuat kerangka kerja dan pelaksanaan agenda KPS telah ditekankan sebagai salah satu prioritas kebijakan di dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (R-APBN) tahun 2012.

Karena pentingnya KPS bagi agenda pembangunan Indonesia, bagian ini bertujuan untuk mencatat kemajuan yang telah berhasil dicapai, menyoroti tantangan yang masih ada dan memberikan saran-saran untuk penerapan KPS dimasa depan di Indonesia.¹

Kotak 1: Potensi manfaat KPS bagi penyampaian layanan infrastruktur

Untuk memenuhi sasaran pembangunan yang ambisius dalam investasi infrastruktur, sektor publik pada umumnya memobilisasi pendanaan dari sektor swasta termasuk dalam bentuk KPS karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki pemerintah. Selain untuk menutup celah pendanaan untuk kebutuhan investasi, partisipasi sektor swasta juga dapat membantu menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi. Secara umum, KPS, terutama yang memiliki kontrak jangka panjang, bila diterapkan dengan baik, dapat menawarkan manfaat yang signifikan, seperti:

Efisiensi yang lebih besar dalam penggunaan sumber daya. KPS dapat memungkinkan risiko-risiko dikelola secara optimal antara sektor swasta dan pemerintah, sehingga memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Kontrak jangka panjang juga dapat memberikan kepastian yang lebih besar dalam penentuan harga dari layanan publik.

Modal dalam risiko kinerja. Eksposur modal yang eksplisit terhadap risiko kinerja jangka panjang memberikan suatu insentif kepada pihak swasta untuk merancang dan membangun aset dengan tepat waktu dan sesuai anggaran, dan memperhitungkan biaya untuk pemeliharaan jangka panjang dan pembaruan.

Jaminan kualitas dan pengawasan. Proses KPS umumnya melibatkan tingkat jaminan kualitas yang jauh lebih tinggi dibanding proses umum pengadaan pemerintah. Pemerintah akan menghadapi pengawasan oleh pihak-pihak swasta, pemerintah luar, yang modalnya menghadapi risiko jangka panjang.

Sumber: Edward Farquharson, Clemencia Torres de Mastle, dan E.R Yescombe dengan Javier Encinas (2010). *How to Engage with the Private Sector in Public Private Partnerships in Emerging Markets*. PPIAF- Bank Dunia

b. Kemajuan telah dicapai dalam membangun kerangka aturan dan kelembagaan bagi KPS, tetapi pelaksanaan masih menjadi tantangan utama

Investasi infrastruktur sektor swasta di Indonesia masih terbatas dan belum pulih ke tingkat sebelum krisis tahun 1997

Investasi sektor swasta Indonesia di bidang infrastruktur hanya pulih sebagian setelah merosot tajam setelah krisis tahun 1997-98, dari nilai puncaknya sebesar 6,9 miliar dolar Amerika di tahun 1996 (Gambar 23). Investasi sektor swasta turun dari rata-rata 5,5 miliar dolar Amerika pada periode tahun 1995-1997, menjadi kurang dari 1,6 miliar dolar Amerika antara tahun 1998 dan 2006, sebelum meningkat hingga sedikit di atas 4 miliar dolar Amerika antara tahun 2007 dan 2010 (Gambar 23). Di tahun 2010, Indonesia menarik investasi swasta sebesar 3,4 miliar dolar Amerika, dengan fokus utama pada sektor telekomunikasi dan energi. Investasi swasta pada bidang transportasi berjumlah

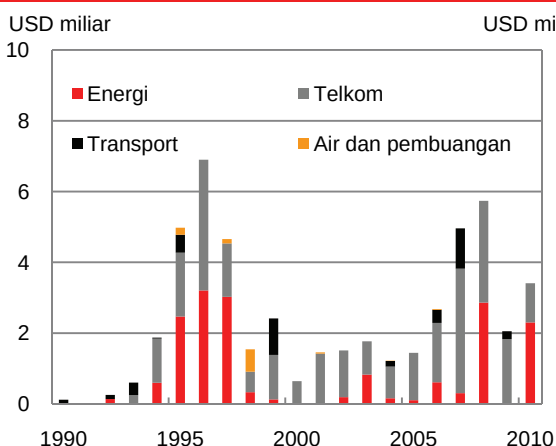
¹ Bagian ini didasarkan dari analisis Bank Dunia terbaru oleh Andri Wibisono, Jeff Delmon, dan Hongjoo Hahm (2011), *Unlocking the Public-Private Partnerships Deadlock in Indonesia*.

relatif kecil dan umumnya bagi pembangunan jalan tol (seperti. jalan tol Trans-Jawa), sementara sektor air bersih dan pembuangan hanya menarik sangat sedikit perhatian dari sektor swasta.

Negara-negara lain di wilayah Asia Timur seperti Malaysia dan Thailand juga mencatat penurunan pasca krisis tahun 1997-98, walaupun tidak sebesar yang terjadi di Indonesia. Selain itu, dibanding negara-negara lain seperti India, Brasil dan Rusia, partisipasi sektor swasta di Indonesia masih relatif terbatas (Gambar 24). India dan Brasil pada khususnya cukup berhasil dalam menggerakkan investasi sektor swasta, dengan menarik lebih dari setengah dari seluruh investasi infrastruktur swasta ke negara-negara berkembang di tahun 2010.

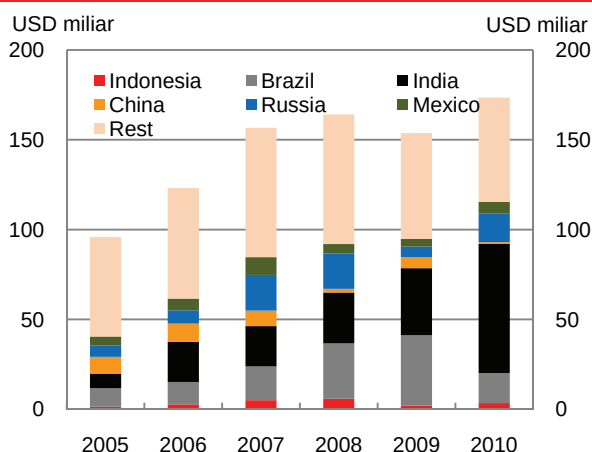
Gambar 23: Investasi infrastruktur swasta Indonesia hanya pulih sebagian sejak krisis tahun 1997-98...

(miliar dolar AS)



Gambar 24: ...dan tetap relatif rendah dibanding ekonomi berkembang lainnya, terutama Brasil dan India

(miliar dolar AS)



Sumber: Bank Dunia dan Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF), pangkalan data proyek Participation in Infrastructure (PPI)

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah mencatat kemajuan dalam penyusunan peraturan yang mendukung kerangka KPS yang membangun landasan bagi pelaksanaan KPS...

...dan telah membentuk berbagai lembaga dan fasilitas pendanaan untuk mendukung transaksi KPS

Dalam upaya untuk menarik partisipasi sektor swasta dalam bidang infrastruktur, Pemerintah telah meninjau kembali dan melakukan revisi atas banyak Undang-Undang (UU) dan peraturan sektoral yang berkaitan dengan pemberian layanan infrastruktur (termasuk bidang transportasi, tenaga listrik, telekomunikasi, dan air dan sanitasi) dan menetapkan kerangka aturan dan kelembagaan bagi penerapan KPS. Di bawah kerangka hukum yang baru, sektor dan pasar infrastruktur terbuka bagi sektor swasta. Sektor swasta dapat berinvestasi pada pembangunan dan operasi proyek-proyek infrastruktur yang layak secara keuangan, tanpa diharuskan untuk membentuk suatu usaha patungan dengan BUMN. Perpres No 13/2010, amandemen dari Perpres No 67/2005 mengenai kerjasama pemerintah-swasta merupakan perkembangan yang positif karena memberikan kejelasan dan dukungan yang lebih baik bagi kerangka KPS dan pemberian jaminan dan dukungan pemerintah. Rancangan UU Pembebasan Tanah, yang sekarang berada pada tahap pembahasan di DPR dan diharapkan akan selesai pada tahun 2011, bertujuan untuk menangani beberapa tantangan pembebasan tanah dengan membuat proses "lebih cepat" dan "lebih adil."

Pembentukan lembaga-lembaga dan fasilitas pendanaan tersebut semakin memperkuat kerangka kelembagaan dan modalitas yang dibutuhkan bagi penerapan KPS. Di Indonesia, rangkaian fasilitas kelembagaan dan pendanaan telah dibangun. Secara khusus, KKPI (Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur) telah didirikan pada tahun 2001 dan merupakan komite koordinasi antar kementerian untuk membantu koordinasi tingkat tinggi untuk urusan KPS. Komite ini dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai wakil pimpinan.

Berbagai badan-badan lain juga telah dibentuk untuk membantu, misalnya, dalam hal persiapan proyek, pemilihan, pendanaan dan pengelolaan risiko sektor publik. Sebagai contoh, Project Development Facility (PDF) dibentuk untuk mendanai persiapan proyek

(mis. studi kelayakan), sementara Public Private Partnership Central Unit (P3CU) didirikan untuk mendukung pemilihan proyek-proyek KPS yang sudah siap. Dalam hal fasilitas pendanaan, PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) adalah lembaga keuangan non-bank yang khusus menangani pendanaan infrastruktur dan PT Indonesia Infrastructure Financing Facility (PT IIF), suatu anak perusahaan PT SMI yang sepenuhnya dimiliki oleh swasta, bertujuan untuk menggerakkan pendanaan jangka panjang untuk proyek-proyek KPS dalam mata uang lokal. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII Persero) atau Indonesia Guarantee Fund, (IGF) juga telah disiapkan untuk mendukung pemberian jaminan atas proyek-proyek KPS. Dana Bergulir Pembebasan Lahan (LARF) telah didirikan, yang digabungkan dengan suatu skema *cost-capping* di mana LARF akan membayar biaya tanah yang melebihi 110% dari nilai yang disepakati dalam perjanjian konsesi. Dana Tanah juga dibentuk untuk membiayai perusahaan-perusahaan swasta yang membeli tanah di tahun 2010 dan 2011. Selain itu, Risk Management Unit (RMU) dari Kementerian Keuangan juga didirikan pada tahun 2005 untuk mengelola tanggung jawab kontingen yang berkaitan dengan proyek-proyek KPS.

Beberapa kemajuan persiapan proyek telah dicapai...

Buku KPS tahun 2011 dari Bappenas menunjukkan bahwa hanya terdapat 13 proyek yang siap untuk ditawarkan dari 79 proyek KPS yang ada dengan jumlah nilai sebesar 53 miliar dolar Amerika (Tabel 9). Beberapa proyek telah mencapai persiapan akhir. Sebagai contoh, kontrak bagi Pembangkit Listrik Jawa Tengah baru saja diberikan dan kontrak bagi proyek rel kereta api batu bara Puruk Cahu – Bangkuang diperkirakan akan diberikan pada tahun ini (2011). Kontrak bagi Pasokan Air Umbulan di Jawa Timur diperkirakan akan diberikan di tahun 2012. Sementara itu, kemajuan pembangunan rel kereta api Bandara Soekarno-Hatta masih sangat lambat karena Kementerian Perhubungan masih merumuskan ulang studi pra-kelayakan karena adanya rute, struktur proyek dan rancangan yang baru. Walaupun beberapa proyek terpilih telah berada pada tahap persiapan akhir seperti disinggung di atas, tahap ini masih jauh dari *financial close* atau perolehan pendanaan.

Tabel 9: Nilai proyek yang siap ditawarkan mencapai setengah dari rencana proyek KPS Indonesia untuk tahun 2011 (jumlah dan nilai proyek, juta dolar Amerika)

Sektor/Sub-sektor	I. Proyek siap ditawarkan		II. Proyek prioritas		III. Proyek potensial		Jumlah	
	No.	juta dolar AS	No.	juta dolar AS	No.	juta dolar AS	No.	juta dolar AS
Transportasi udara	1	214			7	1.973	8	2.186
Transportasi darat					2	274	2	274
Transportasi laut	2	1.199			4	2.860	6	4.059
Rel kereta api					3	4.385	3	4.385
Jalan tol	2	25.670	17	8.221	3	1.811	22	35.702
Sumber daya air								
Pasokan air	6	311			18	1.364	24	1.675
Sanitasi & sampah	2	130	2	120	4	50	8	300
Telekomunikasi								
Listrik			2	2.040	4	2.786	6	4.826
Minyak dan gas bumi								
Jumlah	13	27.524	21	10.381	45	15.503	79	53.408

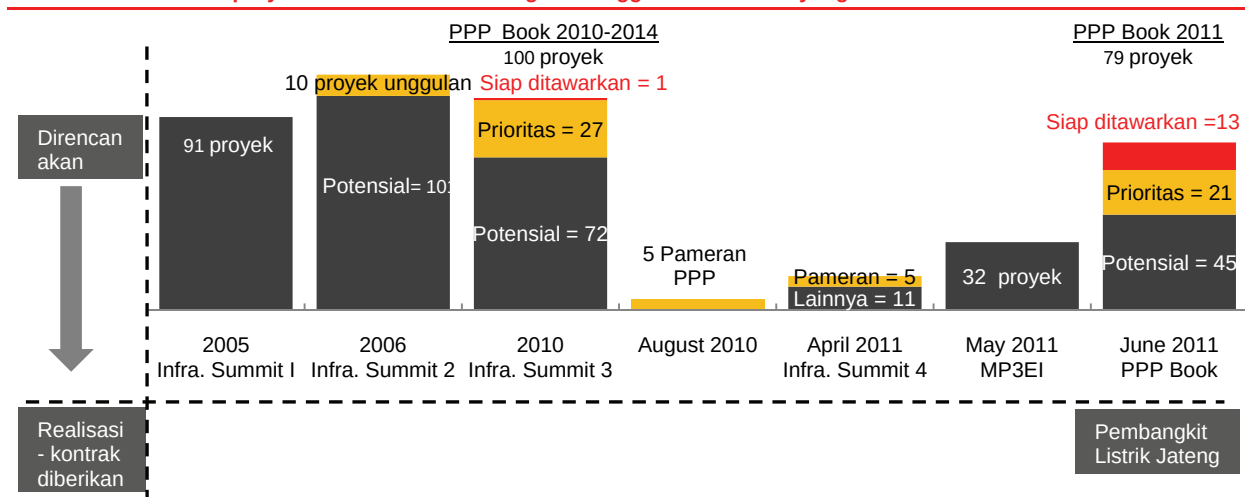
Sumber: Bappenas, PPP Book 2011

Catatan: Proyek potensial: sesuai dengan rencana sektor dan jangka menengah nasional/daerah dan tahap studi awal; Proyek prioritas: tahap pra-studi kelayakan dan dukungan pemerintah telah diidentifikasi; Proyek siap ditawarkan: dokumen penawaran telah selesai dan telah mendapatkan dukungan pemerintah (jika dibutuhkan).

...akan tetapi, hanya sedikit kemajuan yang dicapai dalam transaksi proyek yang sesungguhnya

Pembangunan kelembagaan dan perundangan di atas telah memberikan landasan terhadap kerangka KPS. Akan tetapi kemajuan yang dicatat hanya sedikit sekali dalam hal penerapan yang sesungguhnya sesuai dengan kerangka KPS yang resmi. Sejak tahun 2005, Pemerintah telah menyelenggarakan empat *Infrastructure Summit* untuk mempromosikan proyek-proyek KPS yang potensial dan menarik partisipasi sektor swasta ke dalam skema KPS. Pada pertemuan pertama tahun 2005 Pemerintah memperkenalkan 91 proyek potensial bagi sektor swasta di bawah skema KPS. Pertemuan infrastruktur kedua diselenggarakan pada tahun 2006 dan memperkenalkan 10 proyek unggulan dan 101 proyek potensial. Pertemuan ketiga diselenggarakan pada tahun 2010 dan memperkenalkan sekitar 100 proyek yang mana hanya 1 proyek yang memiliki status "siap untuk ditawarkan" (dengan dokumen penawaran yang lengkap). Pertemuan keempat dilaksanakan pada bulan April 2011, dengan peluncuran PPP Book 2011 (Gambar 25) oleh Pemerintah. Bersama-sama dengan peluncuran MP3EI, pemerintah juga mengumumkan 32 proyek KPS yang siap untuk ditawarkan. Perlu dicatat bahwa daftar proyek KPS tersebut tidaklah selalu sama dari satu pertemuan ke yang lain. Seperti dibahas lebih lanjut di bawah, dibanding daftar proyek yang panjang, faktor keberhasilan utama yang di negara-negara lain adalah kemampuan pemerintah untuk memprioritaskan suatu daftar proyek-proyek yang telah dikembangkan dengan baik yang jelas layak secara keuangan.

Gambar 25: Realisasi proyek KPS di Indonesia sangat tertinggal dari rencana yang diumumkan



Catatan: Proyek unggulan: Tahap penilaian kelayakan; Proyek potensial: sesuai dengan rencana sektor dan jangka menengah nasional/daerah dan tahap studi awal; Proyek prioritas: tahap pra-studi kelayakan dan dukungan pemerintah telah diidentifikasi; Proyek siap ditawarkan: dokumen penawaran telah selesai dan telah mendapatkan dukungan pemerintah (jika dibutuhkan).

Sumber: Disadur dari Sinthya Roesly, 2011. *Challenges in Developing a Robust Project Pipeline – Indonesia Case*. Presentasi pada APEC Finance Ministers' Process Conference: The Framework and Options for Public and Private Financing of Infrastructure and Praptono Djunedji, http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kajian%5Cartikel_KPS_prap.pdf

...mencerminkan tantangan-tantangan koordinasi dan kelembagaan yang masih ada

Terdapat dua tantangan utama yang memperlambat kemajuan proyek-proyek KPS yang ditawarkan ke tahap pelaksanaan: lemahnya persiapan proyek dan lemahnya proses pemilihan proyek. Hal itu menyebabkan terlalu banyaknya proyek yang kurang layak yang ditawarkan dan sulit untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, 33 proyek dihapus dari KPS Book 2010-2014 karena tidak adanya kemajuan yang dibuat oleh *contracting agencies* atau lembaga yang melakukan kontrak (kementerian/lembaga, BUMN atau pemerintah daerah). Proyek-proyek harus disiapkan dengan lebih baik, yang membutuhkan peningkatan alokasi sumber daya bagi persiapan proyek. Karena rumitnya perancangan proyek dan pengaturan kontraknya, kapasitas di tingkat *contracting agencies* mungkin tidak memadai dan membutuhkan perbaikan yang signifikan. Lembaga-lembaga yang melakukan kontrak membutuhkan bantuan dari ahli-ahli yang berpengalaman dalam KPS yang memahami praktik terbaik dan untuk menyusun proyek-proyek dalam bentuk yang akan menarik investor. Saat ini dukungan terhadap persiapan proyek di dalam Pemerintahan sangatlah kurang.

Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga-lembaga yang terlibat selama proses seleksi proyek telah menghasilkan berbagai daftar proyek yang membingungkan investor potensial. Koordinasi KPS pada tingkat pemerintah pusat sangatlah rumit, dengan dua pimpinan KKPP (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bappenas). Seperti dibahas di bawah, di negara-negara dengan kerangka KPS yang berhasil, koordinasi dan pimpinan yang kuat diberikan oleh tingkat teratas pemerintah (seperti Presiden atau Perdana Menteri).

c. Pengalaman internasional memberikan pelajaran bagi keberhasilan penerapan KPS

Ciri-ciri kerangka KPS yang berhasil di negara lain termasuk dasar kebijakan yang kokoh, komitmen politik jangka panjang dan lingkungan hukum dan peraturan yang sehat dan pasti

Pengalaman negara-negara yang telah berhasil menarik investasi sektor swasta melalui pengaturan KPS menunjukkan bahwa KPS harus memiliki landasan kebijakan yang kokoh, komitmen politik jangka panjang dan suatu lingkungan hukum dan peraturan yang sehat dan pasti. Secara khusus, faktor-faktor berikut sangatlah mendukung:

- Dukungan kepemimpinan dan politik yang kuat. Dukungan kepemimpinan tingkat tinggi sangatlah penting untuk mencapai koordinasi yang efektif. Pada banyak negara, seperti Belanda, Australia dan Inggris, keputusan mengenai proyek-proyek KPS utama, dan juga bagi keseluruhan program KPS, dibuat oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri atau Presiden. Di India, Komite Kabinet Infrastruktur, yang dikepalai oleh Perdana Menteri, memutuskan proyek-proyek sektor infrastruktur dan memantau kinerjanya.
- Lembaga pemimpin yang kuat dan penugasan tanggung jawab yang jelas. Negara-negara dengan tradisi KPS yang kuat memiliki suatu badan tunggal yang kuat yang melakukan koordinasi atas keputusan-keputusan KPS, memastikan konsistensi di dalam kebijakan dan pengembangan proyek-proyek KPS. Di Belanda dan Afrika Selatan, dan juga di Inggris dan Australia, badan pemimpin tersebut berada di dalam Kementerian Keuangan. Di Kolombia, Korea Selatan dan Filipina, kebijakan dan pengambilan keputusan KPS dikoordinasi oleh badan perencanaan nasional.
- Dukungan fiskal langsung untuk menarik investasi sektor swasta dan membuat proyek-proyek layak secara komersial. Di India, Pemerintah memberikan dukungan fiskal langsung hingga 40 persen dari biaya atau jumlah yang dibutuhkan untuk membuat proyek-proyek layak secara komersial (yang mana yang lebih rendah), dengan catatan bahwa proyek tersebut memiliki justifikasi cost-benefit.
- Peraturan yang jelas dan konsisten, kebijakan dan pedoman dan aturan yang rinci bagi KPS. Inggris, Australia dan Kolombia telah memperbaiki peraturan dan prosedurnya melalui penerbitan atau amandemen dari peraturan dan prosedur penerapan yang rinci sejalan dengan pengalaman dari penerapan proyek-proyek KPS.
- Proses seleksi proyek yang terintegrasi dan terstruktur. Di negara-negara yang berhasil menerapkan KPS, suatu proyek harus memperlihatkan kelayakan secara teknis dan ekonomi sebelum dipertimbangkan sebagai calon proyek KPS. Sebagai contoh, di Filipina, badan perencanaan menjalankan proses yang melibatkan Kementerian Keuangan dan badan sektor terkait, dan menyajikan seluruh informasi yang berkaitan kepada suatu komite menteri-menteri, yang bersama-sama memutuskan apakah suatu proyek dapat dilanjutkan, apakah disertakan ke dalam KPS dan jenis dukungan fiskal yang diberikan.
- Peningkatan kapasitas badan-badan pelaksana untuk melakukan struktur, pengadaan dan pengelolaan proyek-proyek KPS. Tim-tim multi-lembaga dan multi-disiplin ilmu yang fleksibel merupakan jalan terbaik untuk mengelola dan melaksanakan proyek-proyek KPS. Di Kolombia dan Filipina, petugas-petugas badan perencanaan bekerja dengan erat bersama koleganya dari Kementerian Keuangan di dalam tim-tim multi-lembaga. Keduanya juga memanfaatkan spesialis-spesialis sektoral pada tahap pengembangan proyek. Belanda dan Afrika Selatan membentuk kelompok kerja serupa, tetapi tampaknya lebih banyak mengandalkan badan-badan pelaksana untuk mendapatkan tenaga spesialis sektoral yang dibutuhkan. Inggris mengatur penugasan staf dari bank-bank umum dan firma hukum yang memiliki keahlian dalam pendanaan proyek. Afrika Selatan dan Mesir awalnya menyewa konsultan jangka panjang untuk mengatur unit-unit KPS mereka untuk meningkatkan akses terhadap praktik terbaik dunia.

Kotak 2: Pengalaman KPS di India

Pengalaman sukses India dalam membangun dan menerapkan KPS merupakan studi kasus yang baik bagi Indonesia. India dan Indonesia memiliki banyak kesamaan dalam tantangan pembangunan. Keduanya adalah ekonomi berkembang yang mencoba mempertahankan dan meningkatkan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan memiliki pasar domestik yang sangat besar. India dan Indonesia telah cukup berhasil dalam membangun kepemimpinan demokrasi dengan fungsi desentralisasi yang signifikan pada tingkat Negara Bagian/Propinsi. Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi agar tetap tinggi, kedua negara membutuhkan investasi infrastruktur dalam skala besar, dengan kesempatan yang cukup besar bagi sektor swasta untuk berkontribusi.

India sedang melaksanakan program pembangunan infrastruktur senilai 500 miliar dolar Amerika. Walaupun merupakan "negara berkembang", India menjadi pusat investasi infrastruktur dunia. Investor dan pengembang domestik memimpin inisiatif infrastruktur, dengan sektor-sektor tertentu (seperti pelabuhan dan bandara) mencatat FDI yang tinggi. Komitmen investasi terhadap proyek-proyek infrastruktur dengan partisipasi swasta di India telah meningkat tajam selama lima tahun terakhir, dari 20 miliar dolar Amerika di tahun 2006 menjadi hampir 40 miliar dolar Amerika di tahun 2010. Dengan pendekatannya yang unik, India telah dapat menangani banyak kerumitan yang melekat dalam mengembangkan kerangka kelembagaan KPS yang berhasil.

Untuk menarik partisipasi sektor swasta, pada tahap awal India memusatkan terhadap persiapan sejumlah kecil proyek yang layak, memberikan dukungan yang kuat hingga pelaksanaan dan beroperasi sepenuhnya, untuk memberikan contoh bagi sektor swasta. Pemerintah India menyusun kebijakan dan pedoman yang terintegrasi dan menyeluruh untuk memastikan partisipasi sektor swasta. Kepercayaan investor terhadap kebijakan-kebijakan juga diperkuat dengan prosedur pemilihan yang transparan, dokumen kontrak yang distandardisasi, dan prosedur perijinan yang dipersingkat. Beberapa tindakan terukur untuk meningkatkan kelayakan proyek juga diterapkan dengan menggunakan fasilitas keuangan dan tambahan penerimaan dan mekanisme.

Satu hal yang penting dari keberhasilan penerapan KPS di India adalah penetapan suatu badan quasi-judicial yang independen untuk menentukan tarif di semua sektor seperti Otoritas Pengatur Telekom India, Otoritas Tarif bagi Pelabuhan Utama, Komisi Pusat Air dsb. Melalui pengaturan ini, tarif ditentukan secara independen oleh badan-badan tersebut berdasarkan pertimbangan teknis (di luar proses politik), menjamin keberlanjutan pemberian layanan. Subsidi diberikan bagi konsumen yang membutuhkan sesuai dengan persetujuan dari komisi yang berkaitan pada waktu proses penentuan tarif. Intervensi Pemerintah dalam membangun kapasitas dan kelembagaan dan memberikan pengembangan sumber daya manusia yang terstruktur juga telah berhasil mempertahankan momentum pembangunan.

Sumber: Feedback Ventures, 2010: Learning from KPS Experience in Indian Infrastructure

d. Jalan ke depan

Penekanan pada proyek-proyek KPS yang paling layak dan strategis, dan memastikan sampai pada proses tender dan ditransaksikan dapat menjadi pendekatan yang kuat dalam menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan KPS

Seperti dibahas di atas, tantangan utama bagi Indonesia dalam memajukan agenda KPS adalah pada implementasi. Walaupun setiap negara memiliki pengaturan dan lingkungan kelembagaan dan peraturan usaha yang berbeda untuk mendukung keberhasilan implementasi KPS, pelajaran dari pengalaman India dapat menjadi titik permulaan. Sebagai contoh, walaupun penyelenggaraan forum dan pertemuan internasional dapat menjadi fasilitas yang berguna untuk mempromosikan proyek-proyek KPS, penekanan pada proyek-proyek yang paling layak dan strategis dan membawa mereka hingga tahap implementasi dapat mengirimkan pesan yang kuat kepada investor swasta akan komitmen Pemerintah dalam penerapan KPS. Pengalaman India dalam menunjukkan keberhasilan penerapan beberapa proyek KPS yang layak telah berhasil dalam menarik sektor swasta ke dalam skema KPS dibanding promosi melalui forum/pertemuan internasional.

Untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang terpilih memang layak dan dapat diterapkan, persiapan dan identifikasi proyek harus diperbaiki dengan mengikutsertakan Kementerian Keuangan dan lembaga kunci yang berkaitan dari awal dan selama proses berjalan

Seperti disoroti di atas, salah satu faktor yang memperlambat kemajuan implementasi KPS di Indonesia adalah bahwa sebagian besar proyek KPS yang ditawarkan belum disertai dengan analisis latar belakang yang memadai sebelum proses penawaran. Kerumitan penyusunan proyek-proyek KPS dan pengaturan kontraknya membutuhkan peningkatan kapasitas dari *contracting agencies* (kementerian, BUMN dan pemerintah propinsi dan daerah) untuk membantu persiapan proyek KPS agar menjadi lebih baik, lebih cepat dan lebih murah dan melibatkan Kementerian Keuangan dan badan-badan terkait dari awal dan selama proses berlangsung. Ada beberapa pilihan yang dapat digunakan untuk melembagakan proses persiapan proyek. Sebagai contoh, Tim Khusus Proyek dapat dibentuk untuk setiap proyek KPS, yang dipimpin oleh badan yang akan melakukan kontrak dan terdiri dari para ahli dari badan-badan Pemerintah yang berkaitan untuk mengembangkan proyek tersebut. Tim ahli KPS dapat dibentuk, yang sebagian besar terdiri dari bankir investasi dan pengacara, untuk membantu badan yang melakukan kontrak dan Tim Khusus Proyek dalam membangun proyek-proyek KPS dengan menggunakan praktik terbaik internasional. Usulan lain termasuk mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung persiapan proyek dan juga menutup kesenjangan pendanaan agar proyek menjadi layak dan menyelesaikan masalah pertanahan sebelum dimulainya pengadaan proyek. Juga, karena merupakan hal yang rumit, pembebasan tanah KPS harus didukung oleh pemerintah.

Proses pemilihan proyek harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa proyek yang terpilih menerima dukungan pimpinan tingkat tinggi

Penekanan pada proyek-proyek KPS yang paling strategis dan layak dapat dicapai dengan menetapkan suatu proses pemilihan KPS yang terintegrasi dan terkoordinasi di dalam pemerintahan. Proses ini harus didukung dengan alokasi sumber daya yang cukup dan staf yang ahli dengan implementasi KPS. Proses ini akan mengidentifikasi proyek-proyek yang perlu diangkat ke tingkat pengambil keputusan yang lebih tinggi, sebagai contoh rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden, untuk memastikan perolehan dukungan kepemimpinan tingkat tinggi dalam bentuk yang terkoordinasi. Pengumuman suatu daftar baru dari proyek-proyek KPS (di luar proses yang baru disebutkan) harus di hindari karena dapat menimbulkan kebingungan di antara investor dan membawa risiko terhadap kredibilitas pemerintah.

Akhirnya, untuk memastikan kuatnya persiapan dan penerapan, pemerintah dapat mengidentifikasi “champion atau pemimpin” untuk setiap proyek yang terpilih

Karena penerapan skema KPS akan melibatkan banyak pihak dan kementerian, kurangnya koordinasi dan panjangnya proses birokrasi merupakan dua risiko terhadap keberhasilan. Untuk memastikan persiapan dan penerapan yang kuat dan kelanjutan dukungan pimpinan tingkat tinggi, pemerintah dapat mengidentifikasi “champion” untuk setiap proyek KPS yang diprioritaskan dan diberikan kekuatan/kuasa untuk mendorong proyek itu melewati birokrasi. Selain itu, Pemerintah dapat menetapkan suatu badan pemantau yang kredibel yang dapat ditugaskan ke UKP4 (Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) untuk memantau persiapan dan penerapan proyek secara ketat.

C. INDONESIA 2014 DAN SETERUSNYA: PANDANGAN SELEKTIF

1. Belanja Daerah Tidak Menunjukkan Hasil

Pemerintah daerah berperan penting dalam pembangunan Indonesia sebagai negara ekonomi menengah, terutama pembangunan dalam bidang pendidikan dan infrastruktur²

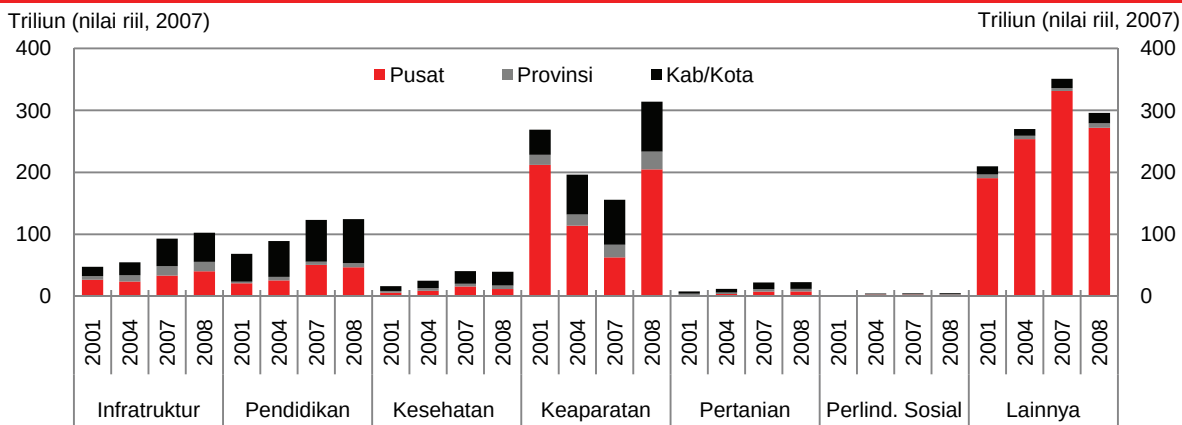
Indonesia telah mengalami perubahan besar secara ekonomi maupun politik dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi meningkat dengan kuat dan konsisten, diikuti oleh keberhasilan reformasi politik dan kelembagaan yang relatif baik selama satu dekade. Di tahun 2011, Indonesia merupakan negara yang kompetitif, dengan demokrasi dan sistem pemilu yang terdesentralisasi. Akan tetapi masih tersisa banyak tantangan pembangunan, termasuk tantangan yang muncul karena peningkatan penduduk perkotaan, naiknya kebutuhan akan peningkatan keahlian dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, serta lemahnya konektivitas antardaerah di Indonesia. Tantangan pembangunan di bidang infrastruktur dan pendidikan adalah termasuk tantangan pembangunan paling penting dan merupakan bidang-bidang di mana pemerintah daerah memiliki peran yang sangat krusial³. Pemerintah daerah mengendalikan setengah belanja inti pemerintah, dan juga mengendalikan sebagian besar fungsi pelayanan masyarakat termasuk di bidang pendidikan dan infrastruktur. Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam rangka meningkatkan taraf hidup penduduk Indonesia, yaitu melalui efisiensi belanja pemerintah di tingkat daerah dalam beberapa tahun ke depan. Bagian ini membahas tantangan yang kini dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut setelah mempertimbangkan pola hubungan antara belanja pemerintah daerah dan hasil-hasil pembangunan.

a. Belanja pemerintah daerah telah meningkat pesat selama satu dekade terakhir

Dengan meningkatnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam fungsi pelayanan, belanja pemerintah daerah juga meningkat hingga 7,2 persen PDB di tahun 2007

Proses desentralisasi di Indonesia pada tahun 2001 telah diikuti dengan perpindahan tanggung jawab dan aliran dana dalam jumlah besar kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengambil alih tanggung jawab utama dalam mengelola pelayanan pada masyarakat, dimana satu dekade berikutnya, mengelola setengah dari seluruh belanja inti pemerintah (di luar pembayaran bunga dan subsidi) di sektor-sektor publik utama (Gambar 26). Peran baru ini disertai dengan peningkatan rasio belanja terhadap PDB sebesar lebih dari 150 persen—belanja daerah terhadap PDB tumbuh, dari 2,7 persen di tahun 2000 menjadi 7,2 persen di tahun 2007 (Gambar 27).

Gambar 26: Pemerintah daerah mengelola lebih dari setengah dari seluruh belanja pemerintah pada sektor-sektor utama (Miliar Rp, nilai riil, 2007=100)



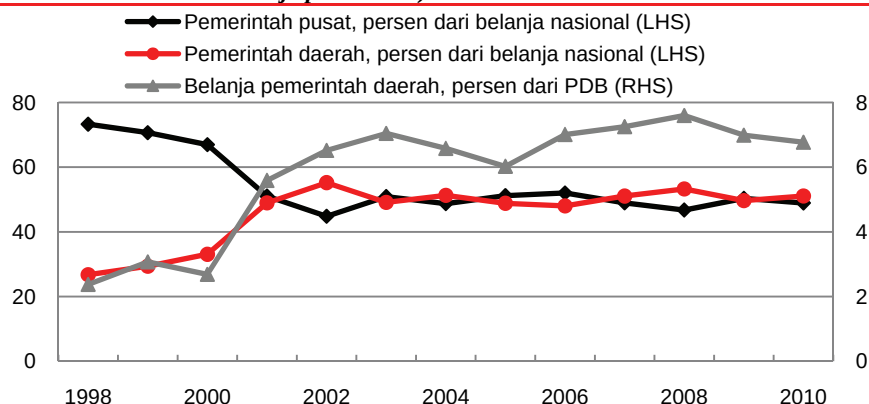
Catatan: Data untuk tahun 2008 adalah rencana anggaran

Sumber: Perhitungan dari staf Bank Dunia berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

² Bagian ini menggunakan laporan *Indonesia Sub-National Public Expenditure Review* (Bank Dunia, edisi mendatang).

³ Sektor kesehatan juga merupakan salah satu bidang yang mempunyai tantangan pembangunan dan ekonomi dalam jangka panjang. Walaupun dikaji pada *Indonesia Sub-National Public Expenditure Review* edisi mendatang, analisis pada sektor kesehatan tidak disertakan di dalam pembahasan kali ini.

Gambar 27: Belanja pemerintah daerah sama dengan belanja inti pemerintah pusat (persentase dari seluruh belanja pemerintah)

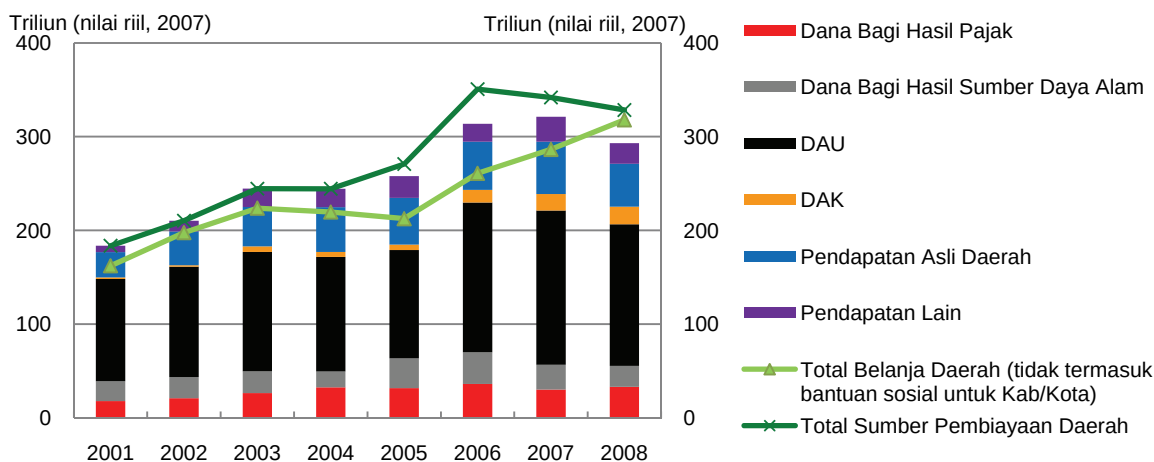


Catatan: Belanja pemerintah pusat tidak termasuk pembayaran bunga, subsidi dan transfer. Data pemerintah daerah tahun 2001-2007 adalah realisasi, 2008 merupakan anggaran, 2009 dan 2010 adalah proyeksi. Sumber: Perhitungan dari staf Bank Dunia berdasarkan data SIKD dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Peningkatan belanja di tingkat daerah dibiayai oleh transfer dari pemerintah pusat

Jumlah transfer ke pemerintah daerah telah meningkat hampir dua kali lipat secara riil sejak desentralisasi. Terdapat berbagai jenis transfer ke daerah, dan tiga yang paling utama adalah **Dana Alokasi Umum (DAU)**, **Dana Alokasi Khusus (DAK)** dan **Dana Bagi Hasil (DBH)** (lihat Kotak 3 untuk jenis-jenis transfer lainnya). Sebagian besar peningkatan belanja daerah didorong oleh DAU (Gambar 28). DAU memiliki dua bagian – Alokasi Umum (yang mencakup bagian belanja daerah untuk kepegawaian) dan Alokasi Celah Fiskal, yang bertujuan untuk menangani masalah kesenjangan antar pemerintah daerah karena perbedaan kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan (Kotak 3). Di tahun 2010, besar DAU, DBH (pajak dan sumber daya alam) dan DAK masing-masing mencapai 63 persen, 18 persen dan 3 persen dari seluruh pendanaan pemerintah daerah⁴.

Gambar 28: Transfer pemerintah pusat, terutama DAU, mendanai sebagian besar pendapatan pemerintah daerah (Milyar Rp, nilai riil, 2007=100)



Catatan: Total sumber-sumber pendanaan pemerintah daerah juga termasuk dana dekonsentrasi (DEKON), tugas pembantuan (TP) dan program pemerintah pusat PNPM, yang tidak dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber: Perhitungan Bank Dunia atas data SIKD, Kemenkeu

⁴ Sementara data pendapatan tersedia setelah selang waktu 1 tahun, data realisasi belanja daerah (SIKD dataset) akan tersedia setelah selang waktu 4 tahun. Pada saat laporan ini ditulis, data pendapatan yang tersedia adalah untuk 2010 dan data pengeluaran daerah tersedia hingga tahun 2007, data 2008 dan 2009 masing-masing merupakan data anggaran dan proyeksi.

Kotak 3: Mekanisme transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang kini berlaku di Indonesia

Kotak ini memberikan uraian singkat mengenai berbagai mekanisme transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Indonesia. Transfer-transfer tersebut merupakan sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah, yang secara umum juga menjelaskan tingkat dan komposisi belanja daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU, menurut Pasal 1 (21) dari UU No 33/2004, adalah dana yang berasal dari Anggaran Pusat (APBN) yang dialokasikan untuk menyamakan kapasitas keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam penerapan desentralisasi. DAU merupakan alokasi *block grant* yang dirancang untuk menyeimbangkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Dana itu ditransfer secara bulanan secara langsung dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. DAU dialokasikan berdasarkan atas suatu rumus nasional dan merupakan jumlah alokasi dasar (yang merupakan bagian dari anggaran belanja daerah untuk gaji pegawai negeri) dan "celah fiskal" pemerintah daerah. Alokasi dasar mencapai sekitar 53 persen dari DAU di tahun 2010. "Celah fiskal" adalah perbedaan antara perkiraan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal dari setiap daerah. Kebutuhan fiskal adalah berdasarkan pada variabel daerah seperti jumlah penduduk, luas daerah, PDB per kapita dan indeks pembangunan manusia. Kapasitas fiskal diukur oleh pendapatan asli daerah dan bagian dari jumlah bagi hasil. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 55/2005, propinsi hanya menerima 10 persen dari jumlah DAU, sementara daerah kabupaten/kota menerima 90 persen.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK, menurut Pasal 1 (23) dari UU No 33/2004, adalah dana yang berasal dari Anggaran Pusat (APBN) yang dialokasikan kepada daerah-daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus di daerah tersebut dalam kaitannya dengan prioritas nasional. Kebijakan alokasi DAK melibatkan komite anggaran DPR dan badan-badan pemerintah pusat, seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Perencanaan (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri dan kementerian-kementerian yang berkaitan dengan sektor-sektor yang menerima DAK. Keputusan akhir mengenai jumlah alokasi DAK per sektor dan pemerintah daerah bergantung pada Kemenkeu setelah konsultasi dengan DPR. Alokasi DAK memiliki suatu komponen rumus yang memperhitungkan celah fiskal dan memiliki persyaratan keturutsertaan pemerintah daerah sebesar 10 persen. Penggunaan DAK tidak diperkenankan untuk riset, pelatihan, administrasi atau perjalanan dinas. Di tahun 2011, 19 sektor ekonomi menerima alokasi DAK, termasuk, antara lain, pendidikan, kesehatan, pertanian, kehutanan, perdagangan dan berbagai sektor infrastruktur (jalan, irigasi, air, sanitasi, listrik pedesaan, perumahan dan pemerintah daerah dan infrastruktur daerah terpencil). DAK dibayarkan sebanyak tiga kali, yang bergantung pada jumlah dana sebelumnya yang masih tersisa. Walaupun DAK ditujukan untuk mendanai belanja modal, pemerintah telah menunjukkan beberapa keluwesan dalam mendefinisikan belanja modal.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Tidak seperti DAU, yang merupakan hibah penyeimbang horisontal, DBH adalah hibah penyeimbang vertikal, yang membagi pendapatan pajak dan sumber daya alam dengan seluruh kabupaten/kota, dengan bagian pendapatan yang lebih besar dibagikan kepada daerah-daerah yang kaya akan sumber daya dari mana pendapatan itu berasal. DBH terdiri dari bagi hasil dari sumber daya alam dan pajak. Di tahun 2007, sebagian besar penerimaan DBH sumber daya alam datang dari minyak bumi (48 persen) dan gas alam dan panas bumi (36 persen) dan lalu dari pertambangan (10 persen), kehutanan (6 persen) dan perikanan (0.7 persen). Pada tahun yang sama, penerimaan DBH pajak datang dari pajak bumi dan bangunan (59 persen), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (17 persen) dan pajak penghasilan (24 persen).

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus termasuk hibah khusus bagi Papua, Papua Barat dan Aceh dan tambahan dana bagi pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Dana Penyesuaian termasuk tunjangan tambahan bagi guru-guru, tunjangan profesi bagi guru-guru, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Insentif Daerah (DID).

Hibah

Hibah adalah suatu sumber pendanaan pemerintah daerah yang dapat berasal dari mitra asing, pemerintah pusat atau mitra dalam negeri. Hibah dapat berupa uang (misalnya Hibah Air) atau dalam bentuk barang dan jasa, seperti bantuan dan pelatihan.

Belanja Pemerintah Pusat pada tingkat daerah yang tidak dicatat dalam Anggaran Daerah (APBD)**Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP)**

Dana dekonsentrasi berasal dari anggaran pemerintah pusat (APBN), dikelola oleh Pemerintah Propinsi dan digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan non-fisik. Termasuk diantaranya adalah rencana koordinasi dan sinkronisasi, fasilitasi, bantuan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, bimbingan dan pengendalian. Dana tugas pembantuan (TP) juga mirip seperti dana dekonsentrasi, tetapi dapat dialokasikan kepada propinsi dan daerah dan dialokasikan untuk mendanai belanja kegiatan fisik, seperti pengadaan barang-barang, tanah, bangunan, peralatan dan mesin-mesin, jalan-jalan dan irigasi.

Sumber: Kemenkeu

b. Hasil-hasil pembangunan tidak menunjukkan pola yang seragam

Peningkatan sumber danapemerintah daerah tidak selalu meghasilkan *outcomes* (pelayanan publik) yang sesuai

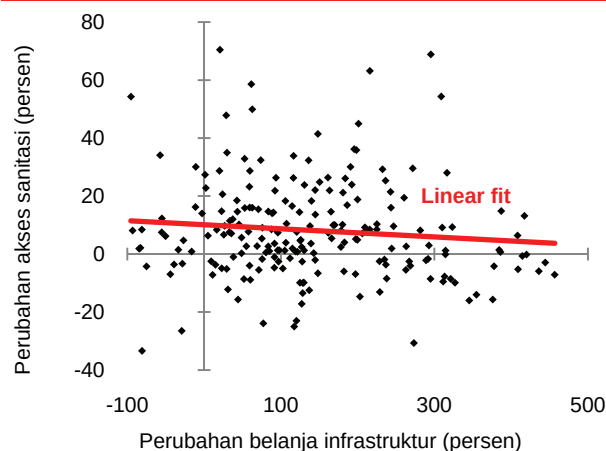
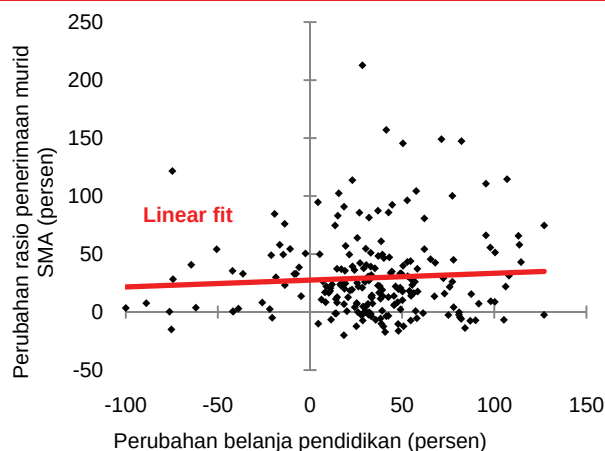
Harapan yang melekat pada proses desentralisasi adalah bahwa pemerintah daerah akan dapat mengidentifikasi kebutuhan pembangunan di daerah mereka sendiri dengan lebih baik, dan peningkatan otoritas dan sumber daya di tangan mereka akan dapat meningkatkan kualitas penyampaian layanan publik secara signifikan. Akan tetapi, setelah satu dekade sejak desentralisasi, peningkatan pada hasil-hasil pelayanan publik yang penting, seperti pendidikan dan infrastruktur, tidak menunjukkan pola yang seragam. Bagian ini akan menunjukkan bahwa secara nasional, beberapa kemajuan telah dicapai pada sebagian besar indikator tetapi masih jauh dari cukup untuk mengejar prestasi dari negara-negara pembanding pada wilayah yang sama. Hubungan antara peningkatan belanja pada pendidikan dan infrastruktur dan peningkatan hasil pelayanan publik di kedua sektor tidak signifikan secara statistik, dan sebagian besar daerah tidak menunjukkan peningkatan atau bahkan mengalami kemunduran pada indikator hasil-hasil pelayanan publik, walaupun jumlah belanja di daerah-daerah tersebut telah ditingkatkan.

Meskipun Indonesia telah mencatat kemajuan pada sebagian besar hasil pelayanan publik di tingkat nasional, Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara tetangga, terutama dalam hal kualitas infrastruktur

Dengan peningkatan yang signifikan pada pendanaan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk pemberian layanan pendidikan dan infrastruktur, tercatat bahwa terdapat kemajuan pada beberapa hasil pelayanan publik utama pada sektor-sektor tersebut. Misalnya, sedikit kemajuan terlihat pada indikator pelayanan di infrastruktur, termasuk akses sumber air bersih yang meningkat dari 77 persen menjadi 80 persen dan akses fasilitas sanitasi yang lebih baik, juga meningkat dari 44 persen menjadi 52 persen dari tahun 2000 hingga 2008 (SUSENAS). Akan tetapi peningkatan tersebut tidaklah cukup bagi Indonesia untuk mengejar negara-negara tetangga. Indonesia masih berada di kelompok terbawah secara regional dalam survei-survei kualitas infrastruktur secara keseluruhan, maupun dalam hal indikator spesifik terhadap kondisi infrastruktur, seperti jalan (lihat Bagian C dari Laporan Triwulanan Ekonomi Indonesia dari Bank Dunia edisi bulan Juni 2011). Dalam hal rasio penerimaan murid di atas tingkat pendidikan dasar, Indonesia juga masih tertinggal di belakang negara-negara tetangga dengan penghasilan menengah. Sebagai contoh, untuk tahun 2008, tingkat penerimaan murid di perguruan tinggi di Indonesia adalah 21 persen dibanding 23 persen di Cina, 29 persen di Filipina dan 36 persen di Malaysia (Data WDI tahun 2008). Sementara, rendahnya perbaikan akses pada pendidikan sekunder dan pendidikan tinggi memperlambat proses kemajuan menuju penciptaan angkatan kerja dengan tingkat keterampilan yang tinggi, dan menghambat peningkatan daya saing Indonesia di tingkat internasional.

Sebagian daerah tidak menunjukkan perbaikan hasil pelayanan publik meskipun belanja telah meningkat

Dalam tren-tren secara umum tersebut, tidak semua kabupaten/kota menunjukkan peningkatan dalam hasil pelayanan publik meskipun belanja telah ditingkatkan. Berdasarkan pada sampel yang terdiri dari 200 kabupaten/kota yang memiliki data belanja dan hasil pelayanan publik dari tahun 2002 hingga 2007, hubungan statistik antara peningkatan belanja pada sektor infrastruktur dan pendidikan terhadap peningkatan hasil pelayanan publik di sektor terkait, tidaklah signifikan. Sebagian besar daerah pada sampel itu meningkatkan belanja pada pendidikan dan infrastruktur hingga 50 persen, meskipun dengan nilai variasi yang besar. Akan tetapi, peningkatan belanja tidak berkorelasi dengan peningkatan hasil pelayanan publik, dan untuk daerah-daerah dengan peningkatan belanja yang sama, daerah-daerah tersebut menunjukkan perubahan hasil pelayanan publik yang beragam (Gambar 29). Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa sebagian daerah tidak menunjukkan peningkatan atau bahkan mengalami penurunan dalam hasil pelayanan publik walaupun tbelanja telah ditingkatkan - sekitar 30 persen dari daerah-daerah di dalam sampel itu mencatat penurunan pada semua indikator hasil pelayanan publik yang diamati (Lihat catatan pada Gambar 29).

Gambar 29: Korelasi yang tidak signifikan antara peningkatan belanja dan peningkatan hasil pelayanan publik**a) Akses terhadap sanitasi****(persentase perubahan tahun 2002-2007)****b) Rasio Penerimaan Murid Sekolah Menengah Atas****(persentase perubahan tahun 2002-2007)**

Sumber: SUSENAS, SIKD

Catatan: Indikator tambahan yang diamati termasuk jalan yang diaspal, akses terhadap air bersih, tingkat penerimaan murid untuk sekolah dasar, menengah pertama dan atas, dan juga jumlah tahun bersekolah dan kemampuan baca-tulis. Ketika pengujian dilakukan dengan menyertakan daerah-daerah yang mengalami pemekaran, hasilnya tidak berbeda dengan pengujian tanpa memisahkan daerah-daerah yang telah mengalami pemekaran.

c. Pelayanan publik bisa meningkat dengan efisiensi dan prioritas yang lebih baik

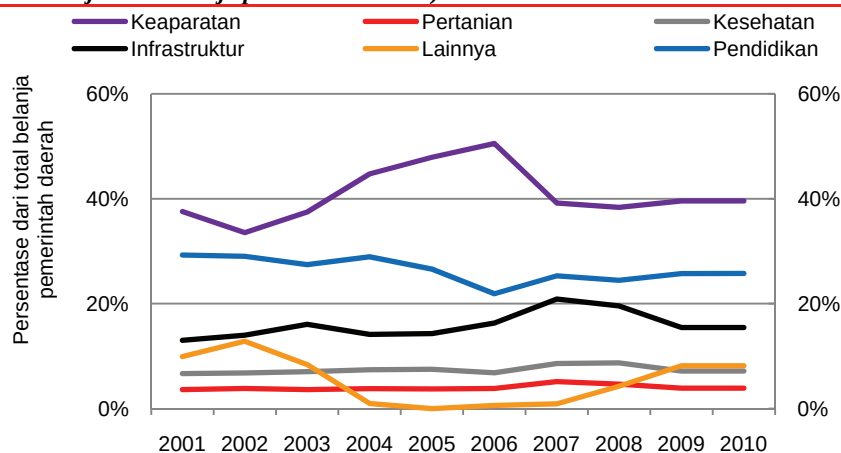
Walaupun belanja daerah pada sektor-sektor utama telah meningkat secara signifikan sejak desentralisasi, belanja daerah terbesar dialokasikan untuk administrasi dan aparatur pemerintahan dan bukan untuk sektor-sektor publik

Alokasi anggaran daerah tidak sejalan dengan kebutuhan sektor pembangunan utama. Bagian terbesar dari belanja pemerintah daerah ditujukan kepada sektor aparat pemerintahan (yaitu administrasi) dan bukan kepada pelayanan publik dan belanja pada bidang-bidang penting seperti infrastruktur tidaklah mencukupi. Peningkatan belanja untuk aparat pemerintahan – sebagian dapat dijelaskan dengan peningkatan jumlah kabupaten/kota dan pegawai negeri sejak desentralisasi. Pada waktu desentralisasi mulai bergulir, Indonesia memiliki 30 propinsi dan 342 kabupaten/kota. Jumlah tersebut berkembang menjadi 490 kabupaten/kota dan 33 propinsi di tahun 2008. Banyak penelitian (lihat USAID, 2009, untuk kajian)⁵ menunjukkan bahwa insentif keuangan dapat mendorong pemekaran wilayah – untuk menyelenggarakan pemerintahan baru, bantuan pemerintah dan transfer per kapita yang diterima oleh daerah setelah pemekaran, akan lebih besar daripada jumlah yang diterima sebelum daerah mengalami pemekaran⁶. Walaupun tingkat belanja pemerintah daerah untuk infrastruktur dan pendidikan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan selama satu dekade terakhir (64 persen bagi pendidikan dan 195 persen untuk infrastruktur, dari tahun 2001 hingga 2008), bagian terbesar belanja telah dihabiskan untuk administrasi pemerintahan. Belanja untuk administrasi tersebut berkisar dari 30 hingga lebih dari 40 persen dari seluruh belanja daerah selama periode tersebut (Gambar 30). Peringkat berdasarkan persentase belanja per sektor terhadap total belanja pemerintah daerah di tahun 2007 adalah pendidikan (25 persen) dan diikuti oleh infrastruktur (21 persen) dan kesehatan (9 persen).

⁵ USAID, 2009. Decentralization 2009. Stock Taking on Indonesia's Recent Decentralization Reforms Update.

⁶ Alasan lain dari maraknya pemekaran pemerintahan adalah administrasi yang tersebar akibat wilayah yurisdiksi yang luas, preferensi untuk mengakomodasi persamaan dengan alasan etnis, agama, bahasa, sifat perkotaan-pedesaan dll, birokrasi dan persekongkolan politik (Kaiser dkk. 2005).

Gambar 30: Walaupun belanja untuk infrastruktur telah meningkat, belanja untuk administrasi pemerintahan masih menjadi bagian terbesar belanja pemerintah daerah (persen dari jumlah belanja pemerintah daerah)



Catatan: Data tahun 2001-2007 adalah realisasi, tahun 2008 adalah anggaran, 2009 dan 2010 adalah proyeksi

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data SIKD, Kemenkeu

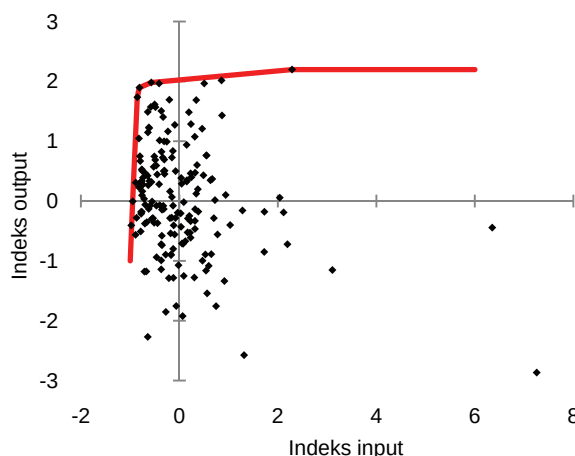
Peningkatan belanja saja tidaklah cukup untuk meningkatkan hasil pelayanan publik dan daerah dapat meningkatkan kinerja mereka secara signifikan dengan jumlah dana yang tersedia, yaitudengan cara meningkatkan efisiensi

Tingkat pendanaan yang tersedia untuk setiap sektor bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan publik. Terdapat bukti bahwa beberapa kabupaten/kota mencatat hasil-hasil pelayanan yang lebih rendah daripada kabupaten/kota dengan taraf *input* belanja yang sama, sehingga menunjukkan perbedaan kapasitas dan efisiensi belanja antar daerah. Analisis yang sedang dilakukan oleh Bank Dunia pada sektor pendidikan dan infrastruktur memberikan pemahaman yang berharga tentang keragaman antardaerah dalam hal pencapaian hasil pelayanan publik meskipun dengan *input* belanja yang sama. Penelitian tersebut menggunakan “Analisis Efisiensi Praktik Terbaik” untuk mengestimasi suatu batasan output berdasarkan fungsi produksi tertentu, atau output terbesar yang dapat dicapai dari seluruh tingkat *input* yang tersedia. “Output” dan “input” diwakili oleh masing-masing indeks yang menggabungkan beberapa indikator menjadi suatu indeks komposit tunggal.

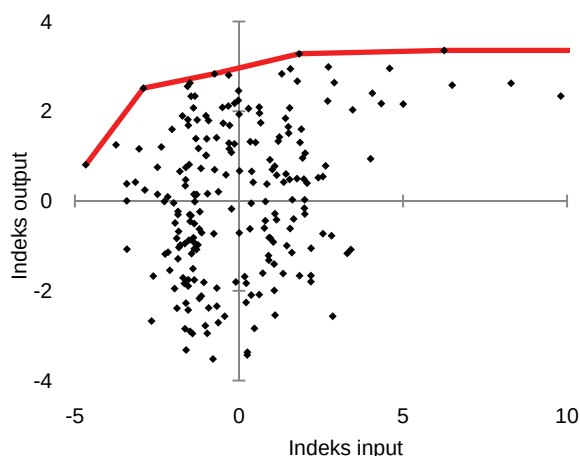
Pada sektor-sektor pendidikan dan infrastruktur, terdapat variasi yang beragam pada kinerja pelayanan publik di tingkat kabupaten/kota walaupun sebagian besar mendapatkan *input* yang sama (Gambar 31). Kenyataan bahwa pada tingkat *input* tertentu, daerah-daerah mencatat tingkat *output* yang sangat berbeda, menunjukkan beragamnya tingkat efisiensi dalam pelayanan publik. Sebagai contoh, perbandingan antara daerah yang berprestasi rata-rata dengan daerah dengan prestasi terbaik (yang mencapai *output* tertinggi dari tingkat *input* yang tersedia) pada analisis di sektor infrastruktur, menunjukkan bahwa daerah dengan prestasi rata-rata dapat meningkatkan aksesnya kepada sanitasi sebesar 43 persen dan menghemat biaya yang berkaitan dengan biaya kepegawaian sebesar 15 persen. Analisis ini tidak menyertakan berbagai *input* penting, tetapi sulit untuk diukur, yang dapat mempengaruhi hasil pengujian, seperti kapasitas pegawai pemerintah, masalah pengelolaan, dan juga titik awal tingkat *input* dan *output* daerah. Tantangan bagi pemerintah daerah dengan prestasi rata-rata adalah bergerak mendekati nilai batas maksimal dengan meningkatkan efisiensi belanjanya pada tingkat pendanaan yang ada saat ini.

Gambar 31: Beberapa daerah dapat menyampaikan hasil yang jauh lebih tinggi pada tingkat input yang serupa

a) **Infrastruktur**
(Nilai efisiensi dari Analisis Efisiensi Praktik Terbaik)



b) **Pendidikan**
(Nilai efisiensi dari Analisis Efisiensi Praktik Terbaik)



Sumber: SIKD, Susenas, Podes

Catatan: Input infrastruktur: Belanja Dinas Pekerjaan Umum, jumlah pegawai negeri tiap 1.000 penduduk. Hasil-hasil infrastruktur: kualitas jalan, akses ke jaringan jalan, air dan sanitasi. Input pendidikan: penggunaan belanja pendidikan; rata-rata daerah yang dilayani sekolah (tingkat dasar, menengah dan tinggi, dalam km persegi); jumlah guru untuk setiap tingkatan sekolah; dan jumlah sekolah per 1.000 murid pada setiap kelompok umur. Output pendidikan: tingkat penerimaan murid bersih, tingkat orang dewasa yang bisa membaca dan menulis, rata-rata lama tahun bersekolah.

d. Apa yang mendorong ketidakefisienan belanja dan kurangnya kualitas pelayanan publik?

Tantangan untuk meningkatkan tingkat dan kualitas belanja daerah dan meningkatkan pelayanan terletak pada kendala-kendala insentif, pendanaan dan sistem

Berdasarkan pengamatan pada berbagai sektor, terdapat bukti bahwa kombinasi dari kendala-kendala terkait insentif, pendanaan dan sistem telah mempengaruhi tingkat dan efisiensi belanja pemerintah daerah dan dapat menjelaskan mengapa peningkatan belanja tidak menghasilkan peningkatan hasil pelayanan publik yang setara. Pertama, kendala insentif mencerminkan adanya insentif negatif yang muncul dari pengaturan kelembagaan secara umum. Kedua, kendala pendanaan merujuk kepada dua hal: satu, pendanaan untuk investasi belanja modal dan, dua, jumlah sumber dana yang tersedia untuk membiayai program-program utama. Kendala tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya mekanisme pendanaan yang memadai untuk melakukan investasi belanja modal, dan untuk meningkatkan dana transfer yang telah ditentukan penggunaannya, yang dapat membatasi jumlah sumber dana beberapa daerah untuk membiayai program-program baru. Akhirnya, pembatasan sistem merujuk pada sistem dan kelembagaan yang rumit terkait pada proses transfer dana antartingkatan pemerintah, penganggaran, dan proses pelaksanaan. Mengatasi ketiga kendala tersebut tersebut dapat meningkatkan secara signifikan kualitas belanja pemerintah daerah dan hasil pelayanan publik.

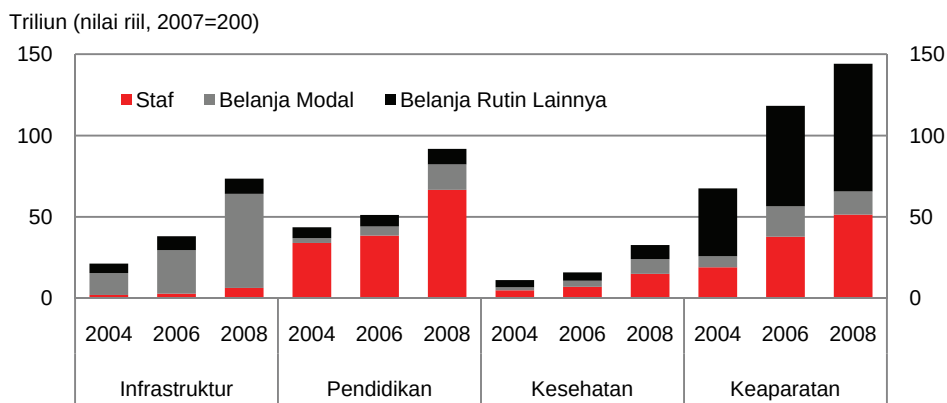
Mekanisme transfer fiskal dapat memunculkan insentif yang tidak dikehendaki, seperti peningkatan jumlah pegawai dan penurunan upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah

Beberapa mekanisme yang terkait dengan transfer fiskal dan pembelanjaannya, seperti DAU, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan masing-masing dapat memunculkan insentif yang tidak dikehendaki, yaitu terhadap kepegawaian, upaya peningkatan pendapatan dan investasi belanja modal, dan operasi dan pemeliharaan (O&M).

Rumus untuk menentukan jumlah transfer terbesar dari pemerintah pusat, DAU, memiliki hubungan yang positif dengan jumlah pegawai pada tingkat daerah. Hal ini berdampak pada tingginya tingkat pengeluaran kepegawaian di daerah, sekitar 52 persen dari pengeluaran rutin di tahun 2007, hampir dua kali lipat tingkat pengeluaran terkait dari pemerintah pusat. Hal ini terutama didorong oleh sektor pendidikan dan administrasi (atau aparat) pemerintah (Gambar 32) yang masing-masing mengambil 43 persen dan 32 persen dari pengeluaran kepegawaian pemerintah daerah di tahun 2008.

Selain itu, koefisien yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dalam rumus DAU menunjukkan tanda negatif, menimbulkan insentif negatif pada tingkat daerah karena pemerintah lokal akan menerima DAU yang lebih rendah ketika pendapatan asli mereka meningkat (DAU berkurang sekitar 60 sen untuk setiap peningkatan 1 rupiah pendapatan asli daerah). Akibatnya, kebijakan desentralisasi pendapatan yang bertujuan untuk memperkuat pendapatan asli daerah – seperti devolusi pajak properti – tidak berjalan optimal.

Gambar 32: Belanja kepegawaian yang tinggi pada tingkat pemerintah daerah didorong oleh sektor aparat pemerintahan dan pendidikan
(Miliar Rp, nilai riil, 2007=100)



Catatan: Angka tahun 2001-2007 adalah realisasi, tahun 2008 adalah anggaran
Sumber: Perhitungan dari staf Bank Dunia berdasarkan SIKD, Kemenkeu

Belanja kementerian pada fungsi daerah melalui dana DEKON/TP dapat mengganggu perencanaan pembangunan pemerintah daerah untuk kegiatan yang serupa

Seperti diuraikan pada Kotak 1, dana dekonsentrasi (DEKON) dan tugas pembantuan (TP) masing-masing adalah pengeluaran untuk investasi non-modal dan modal di tingkat daerah oleh pemerintah pusat melalui kementerian bagi masing-masing investasi non-modal dan investasi modal. Dana itu tercatat pada tingkat pusat (APBN) tetapi tidak pada tingkat daerah (APBD). Di tahun 2010, DEKON dan TP merupakan 12 persen dari total pendapatan pemerintah daerah. Mekanisme pendanaan tersebut dapat mengganggu kegiatan belanja dan perencanaan dan mendorong persekongkolan pada tingkat pusat maupun daerah⁷. Pertama, pemerintah daerah dapat menunda pencairan dana mereka hingga akhir tahun fiskal untuk mendapatkan bunga dengan menempatkan dana itu pada bank umum sebagai deposito. Kedua, pemerintah daerah dapat memperkirakan bahwa pemerintah pusat akan mengambil alih beberapa proyek pemerintah daerah melalui belanja DEKON/TP jika proyek-proyek itu masuk ke dalam prioritas pemerintah pusat. Selain itu, di tingkat pusat, tidak seperti pengaturan DAK, distribusi DEKON/TP tidak diungkapkan secara resmi lewat peraturan kementerian sehingga transparansi dan tanggung jawab DEKON/TP masih merupakan suatu tantangan.

Karena pemerintah pusat mendanai investasi modal melalui berbagai mekanisme, pemerintah daerah cenderung menunggu dana rehabilitasi daripada mengeluarkan dana untuk O&M. Salah satu contohnya adalah pada pembiayaan sistem irigasi

Sektor irigasi memberikan pemahaman akan bagaimana pelaksanaan pembiayaan investasi modal dari pemerintah pusat. Terdapat tiga jenis jaringan irigasi, sesuai dengan ukuran jaringannya, yang masing-masing dikelola oleh tingkat pemerintah yang berbeda. Kurangnya pendanaan bagi operasi & pemeliharaan (O&M) pada tingkat daerah sangat jelas terlihat pada kualitas jaringan irigasi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dikarenakan setiap tingkat pemerintahan masing-masing bertanggung jawab atas O&M sistem irigasi untuk yurisdiksi mereka sendiri-sendiri, jaringan irigasi yang berada di bawah pemerintah kabupaten/kota dan propinsi berada dalam keadaan yang lebih buruk dibanding yang berada di bawah pengelolaan pemerintah pusat di tahun 2009 (Bank Dunia, tahun 2010). Lemahnya kepemilikan dan insentif untuk mendanai O&M bagi jaringan irigasi adalah masalah utama, karena pemerintah daerah mengharapkan dana rehabilitasi (investasi modal) dari pemerintah pusat untuk “memperbaiki kondisi sistem irigasi yang di kelola daerah.

⁷ Lewis, B.D., Chakeri, J., 2004. *Central Development Spending in the Regions Post-Decentralization*. Bulletin of Indonesian Economic Studies Vol. 40 (3), 379-394.

Dengan anggaran yang tujuannya telah ditetapkan dengan ketat, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas yang sangat terbatas untuk mendanai program baru

Beralih pada kendala pendanaan, dengan penggunaan DAU yang umumnya dialokasikan untuk belanja gaji dan jumlah DAK yang relatif rendah (berkisar 3 persen dari total pendapatan daerah), beberapa pemerintah daerah hanya dapat memiliki dana diskresioner (tidak mengikat) yang terbatas untuk mendanai program-program baru. Selain itu, dana yang tujuannya telah ditetapkan oleh pemerintah pusat seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Sebagai contoh, dalam suatu kunjungan lapangan ke kabupaten Pasuruan, propinsi Jawa Timur, tim Bank Dunia menemukan bahwa transfer yang berjumlah besar dari pendapatan bagi hasil pajak tembakau yang ditetapkan bagi proyek-proyek yang melibatkan perkebunan tembakau, tidak dapat digunakan karena kabupaten Pasuruan tidak memiliki industri tembakau. Akhirnya pemerintah daerah hanya memiliki pilihan yang terbatas untuk jangka pendek dalam rangka untuk mengatasi kendala pendanaan dan meningkatkan pendanaan bagi proyek-proyek investasi. Potensi pendapatan asli yang tersedia sekarang sangat terbatas, terutama untuk daerah-daerah metropolitan yang besar⁸. Untuk jangka menengah, pinjaman dapat menjadi instrumen pendanaan yang potensial bagi pemerintah daerah, namun potensi ini hanya bagi daerah-daerah di pusat kota besar dengan kebutuhan akan investasi yang lebih besar dan kapasitas yang lebih baik.

Sistem transfer antar pemerintahan sangatlah rumit dan melibatkan beban biaya transaksi dan koordinasi yang tinggi

Konflik koordinasi terjadi secara vertikal (antara tingkat pemerintah daerah dan pemerintah pusat), horisontal (misalnya, antar badan-badan pemerintahan dan dinas di tingkat daerah) dan antar daerah (misalnya antara beberapa pemerintah daerah di dalam suatu daerah metropolitan). Banyaknya badan dan anggaran yang terlibat di dalam belanja pemerintah daerah dapat menimbulkan biaya transaksi dan beban koordinasi yang tinggi. Misalnya, potensi kesulitan koordinasi pada bidang pendidikan dapat terjadi, dikarenakan sekolah-sekolah, sebagai pintu pelayanan publik yang utama, menerima tujuh transfer yang berbeda yang berasal dari empat pos anggaran yang berlainan, yang kadang-kadang memiliki fungsi yang tumpang-tindih.

e. Catatan penutup

Terdapat rangkaian reformasi kebijakan yang dapat mendorong peningkatan efisiensi belanja daerah, termasuk memperbaiki insentif negatif dari sistem transfer yang berlaku sekarang dan mengambil langkah-langkah menuju mekanisme berbasis kinerja

Untuk meringkas, efisiensi belanja dan pelayanan publik di tingkat daerah dibatasi oleh insentif negatif, mekanisme pendanaan yang tidak memadai dan sistem transfer antar-pemerintahan yang kompleks. Dengan adanya amandemen yang sedang berlangsung terhadap UU No 32 tentang Pemerintahan Daerah dan No.33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kini adalah waktu yang tepat untuk menangani beberapa kendala tersebut. Diskusi di atas memberikan beberapa pemahaman terhadap pilihan kebijakan yang dapat dipertimbangkan. Sebagai contoh, langkah awal menuju penanganan keterbatasan sistem dan pendanaan dapat mencakup perbaikan atas beberapa insentif negatif yang timbul pada mekanisme transfer yang kini berlaku. Revisi pada rumus DAU dapat digunakan untuk menangani masalah disinsentif dalam rangka mengoptimalkan jumlah pegawai dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pada jangka menengah, efisiensi belanja juga dapat didorong dengan memberikan insentif yang tepat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, melalui transfer berbasis kinerja. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa sistem transfer fiskal antar pemerintahan telah berubah dari instrumen yang berbasis *input* ke instrumen berbasis kinerja, yang menghasilkan sistem yang jauh lebih efisien. Indonesia dapat memulainya dengan membangun beberapa unsur yang dibutuhkan, seperti basis data fiskal dan non-fiskal yang memuat hasil-hasil pelayanan, dan untuk jangka menengah, dapat dilakukan proyek percontohan dan memperluas secara sektoral beberapa sistem transfer yang kini telah berbasis pada hasil-hasil pelayanan. Akhirnya, sistem transfer yang terlalu kompleks perlu difokuskan dan disederhanakan serta dibuat lebih transparan dalam jangka panjang.

⁸ Kajian Pengeluaran Pemerintah Daerah dari Bank Dunia (edisi mendatang)

2. Identifikasi hambatan-hambatan untuk pertumbuhan inklusif di Jawa Timur

Membuat pertumbuhan menjadi inklusif, dan juga makin meningkat, merupakan tantangan utama pembangunan Indonesia pada tingkat nasional dan provinsi

Tantangan pembangunan bagi kebanyakan negara berkembang seperti Indonesia tidak hanya terbatas pada menaikkan tingkat pertumbuhan tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan itu juga inklusif, dengan manfaat yang diterima bersama-sama oleh seluruh penduduk. Bagian ini bertujuan untuk melihat hambatan-hambatan bagi pertumbuhan inklusif di Jawa Timur, suatu daerah yang dinamis dan penting secara ekonomi di Indonesia.⁹ Memandang masalah ini pada tingkat daerah dapat memberikan pemahaman yang lebih baik akan jenis-jenis masalah yang berbeda yang merintangi terjadinya pertumbuhan inklusif di Indonesia, mengingat adanya perbedaan dalam tingkat dan pola pertumbuhan antar provinsi. Kerangka kerja pertumbuhan inklusif yang digunakan berfokus pada cara-cara untuk meningkatkan laju pertumbuhan dengan meningkatkan tingkat investasi swasta dan memanfaatkan bagian angkatan kerja yang terjebak pada kegiatan dengan tingkat produktivitas yang rendah atau yang sama sekali tidak ikut serta dalam proses pertumbuhan secara lebih baik. Dengan menggunakan suatu "kerangka kerja diagnosis pertumbuhan", masalah ini dianalisis melalui suatu pengkajian atas hambatan-hambatan akan kemampuan kaum miskin dan mayoritas angkatan kerja untuk memberi kontribusi dan mendapat manfaat dari pertumbuhan (Kotak 4).

a. Kinerja ekonomi Jawa Timur

Jawa Timur adalah salah satu provinsi terbesar dan memiliki pendapatan tertinggi di Indonesia...

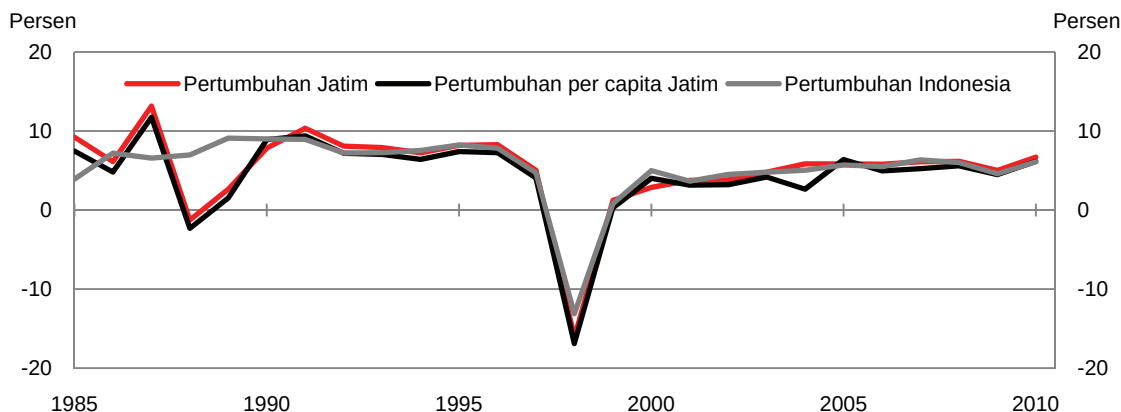
Jawa Timur merupakan provinsi kedua terbesar di Indonesia menurut jumlah penduduk, dengan 16 persen dari seluruh jumlah penduduk Indonesia, yang hampir 50 persennya tinggal di daerah perkotaan, sedikit lebih tinggi dari tingkat nasional sebesar 44 persen di tahun 2010. Rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun mencapai 5,4 persen antara periode 2001 dan 2010, serupa dengan rata-rata tingkat pertumbuhan nasional. PDB per kapita provinsi itu merupakan yang kedua tertinggi di pulau Jawa sebesar Rp 20,8 juta di tahun 2010 dan termasuk di dalam peringkat sepuluh provinsi tertinggi di Indonesia. Di dalam provinsi Jawa Timur sendiri, terdapat variasi yang substansial pada PDB per kapita antar kabupaten/kota, pada kisaran IDR 2.2 juta hingga 79.9 juta/provinsi.

...akan tetapi, laju pertumbuhan akhir-akhir ini masih di bawah tingkat sebelum krisis tahun 1997/1998 dan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia telah sedikit menurun

Walaupun laju pertumbuhan di Jawa Timur tetap terjaga selama periode tahun 2003 hingga 2010, pada kisaran 5,8 hingga 6,7 persen, laju itu masih berada di bawah tingkat yang dicatat pada awal tahun 90an, serupa dengan pola nasional (Gambar 33). Sebelum krisis di akhir tahun 90an, rata-rata pertumbuhan tercatat pada angka 8,3 persen pada periode tahun 1990-1996. Selain itu, kontribusi Jawa Timur ke PDB Indonesia telah menurun. Antara tahun 1976 dan 1983, proporsi Jawa Timur dalam PDB nasional lebih tinggi daripada provinsi-provinsi lain di Indonesia dengan rata-rata 16.1 persen dari PDB. Sebagai perbandingan, Jakarta dan Jawa Barat yang merupakan pusat ekonomi lainnya di Indonesia, masing-masing hanya memberikan kontribusi sebesar 14 dan 14.8 persen dari PDB nasional. Namun, pada pertengahan 1980-an baik Jakarta maupun Jawa Barat melampaui Jawa Timur. Selama periode antara tahun 1992 hingga 1999, Kontribusi Jawa Timur dalam total PDB masih sebesar 16.1 persen, tetapi Jawa Barat telah meningkat menjadi 17.4 persen dan Jakarta meningkat menjadi 18.2 persen. Pemisahan Jawa Barat menjadi dua provinsi (Jawa Barat dan Banten) tahun 2000, telah menempatkan Jawa Timur kembali menjadi kontributor tertinggi kedua, walaupun kontribusinya menurun dibandingkan dengan tahun 1990-an. Pada tahun 2010 Jawa Timur memberikan kontribusi sebesar 14.7 persen dari PDB nasional, dengan bagian terbesar dari perekonomian (73 persen pada 2010) berasal dari sektor-sektor industri manufaktur, perdagangan dan pertanian.

⁹ Bagian ini disusun berdasar laporan Bank Dunia (2011), *East Java Growth Diagnostic*, <http://go.worldbank.org/BA4F5OCZBO>.

Gambar 33: Laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur mengikuti laju pertumbuhan nasional pada beberapa tahun terakhir (pertumbuhan riil per tahun, persen)



Sumber: Perhitungan Bank Dunia berdasarkan BPS

Tren kemiskinan dan lapangan kerja di Jawa Timur menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi perlu lebih jauh mencapai kaum miskin

Walaupun menurun, tingkat kemiskinan Jawa Timur sebesar 15,3 persen di tahun 2010 tetap berada di atas tingkat kemiskinan nasional sebesar 13,3 persen dan secara signifikan lebih tinggi dibanding Jakarta (3,5 persen) atau Banten (7,2 persen). Dalam hal pengangguran, Jawa Timur menghadapi peningkatan pengangguran yang pesat selama krisis ekonomi Asia di tahun 1997. Namun tingkat pengangguran sebesar 4,3 persen di tahun 2010 telah kembali ke tingkat yang sama dengan sebelum tahun 1997. Akan tetapi masih terdapat tingkat setengah pengangguran (*underemployment*) yang besar dalam kelompok mereka yang bekerja, dan sebagian besar pekerja berada di sektor pertanian, yang merupakan sektor dengan produktivitas yang paling rendah di provinsi tersebut.

b. Menelusuri hambatan-hambatan pertumbuhan inklusif di Jawa Timur

Jawa Timur memiliki proporsi investasi swasta domestik yang relatif kecil dan tingkat investasi yang rendah merintangi provinsi itu dari capaian laju pertumbuhan yang lebih tinggi

Rendahnya investasi swasta di Jawa Timur merupakan faktor utama yang merintangi provinsi itu dari pencapaian laju pertumbuhan yang lebih tinggi. Tingkat investasi swasta di Jawa Timur, menurut data BKPM, telah lama berada di belakang Jakarta dan Jawa Barat, dan beberapa tahun terakhir juga tertinggal di belakang Banten. Hal itu juga tercermin dari proporsi jumlah investasi swasta domestik di Jawa Timur. Pada tahun 2010, Jawa Timur hanya mendapat 12 persen dari seluruh investasi tersebut, yang lebih rendah dari Jakarta (30 persen) dan Jawa Barat (15 persen).¹⁰ Pola yang serupa juga terlihat pada rasio investasi terhadap PDB dengan Jawa Timur yang selalu berada di belakang Jakarta, Banten dan Indonesia secara keseluruhan. Sebagai contoh, rasio investasi terhadap PDB tahun 2009 di Jawa Timur adalah 18 persen dibanding 35 persen di Jakarta dan 28 persen di Banten. Dekatnya Banten dan Jawa Barat ke ibukota negara (Jakarta) mungkin membantu menarik lebih banyak investasi swasta.

Tabel 10: Bagian Jawa Timur dalam total investasi swasta nasional masih tetap rendah (bagian dari jumlah investasi swasta domestik, persen)

	2001	2003	2005	2007	2010
Jakarta	27	48	29	36	30
Jawa Barat	16	20	24	18	15
Jawa Tengah	3	1	1	1	1
Jawa Timur	6	4	9	13	12
Banten	16	8	9	6	10

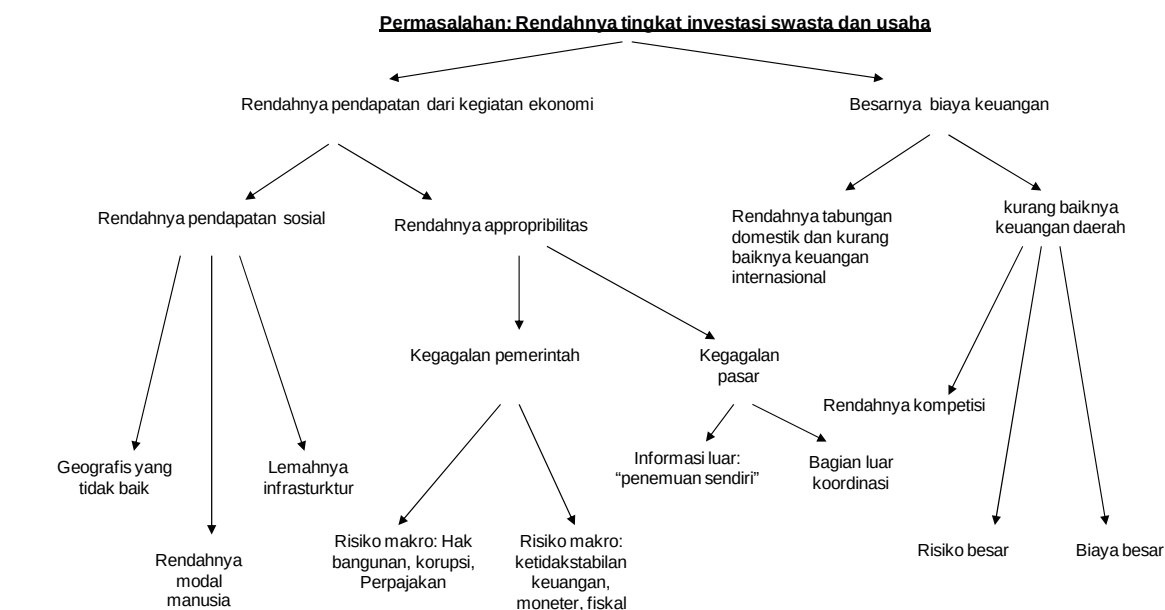
Sumber: Perhitungan Bank Dunia berdasarkan data BKPM

¹⁰ Investasi swasta keseluruhan yang terealisasi di Jawa Timur meningkat secara signifikan, lebih dari dua kali lipat antara tahun 2009 dan 2010. Dalam hal sumbangan terhadap total investasi tingkat nasional, bagian Jawa Timur meningkat dari 5 persen di tahun 2009 menjadi 12 persen di tahun 2010. Peningkatan ini terjadi baik pada investasi dari domestik maupun asing. Di tahun 2009, bagian investasi swasta di Banten lebih tinggi 8 persen daripada Jawa Timur.

Kotak 4: Pengantar singkat kerangka diagnosis pertumbuhan inklusif

Analisis pertumbuhan ekonomi inklusif menekankan pada cara-cara untuk meningkatkan laju pertumbuhan dengan memanfaatkan atau mendayagunakan secara lebih baik angkatan kerja yang terperangkap dalam kegiatan dengan tingkat produktivitas yang rendah atau yang samasekali tidak diikutsertakan dalam proses pertumbuhan ekonomi. Konsep itu menekankan pada penciptaan lapangan yang produktif yang mencakup baik 'pertumbuhan peluang kerja' untuk menghasilkan pekerjaan-pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan bagi orang-orang tersebut dan juga 'pertumbuhan produktivitas' yang dapat meningkatkan upah para pekerja serta tingkat pengembalian investasi bagi para wiraswastawan. Hal ini mencakup kajian untuk melihat tingkat kelayakan seseorang untuk dipekerjakan dan juga kesempatan-kesempatan yang tersedia bagi mereka untuk dipekerjakan. Dengan demikian mempelajari pertumbuhan ekonomi inklusif berarti melihat kemampuan seseorang untuk dapat dipekerjakan secara produktif (sisi penawaran angkatan kerja) dan kesempatan untuk sepenuhnya memanfaatkan sumber-sumber daya yang tersedia pada saat kondisi ekonomi semakin berkembang.

Analisis dari perspektif lingkungan bisnis dalam studi Jawa Timur ini menggunakan kerangka diagnostik pertumbuhan yang dikembangkan oleh Hausmann, Rodrik dan Velasco (HRV, 2005). Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kemungkinan terdapat banyak alasan mengapa suatu ekonomi tidak tumbuh, tetapi setiap alasan menghasilkan suatu kumpulan gejala yang khas (Gambar 34). Pendekatan ini mengakui pentingnya sektor swasta untuk pertumbuhan. Pendekatan ini juga memberikan suatu strategi yang bertujuan untuk menunjukkan kendala-kendala mana yang paling membatasi kegiatan ekonomi dan kemudian membuat serangkaian kebijakan yang mana bila diarahkan kepada kendala-kendala tersebut pada suatu waktu tertentu, akan paling memungkinkan untuk memberikan dampak terbesar pada reformasi tersebut. Tidak ada metode kuantitatif yang bisa dipakai untuk menilai tingkat pengikatan/pembatasan atas kendala-kendala yang mempunyai potensi tersebut, tetapi suatu kombinasi dari analisis ekonomi dan pengetahuan tentang situasi ekonomi di daerah dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendala mana yang paling membatasi.

Gambar 34: Contoh kerangka pemeriksaan pertumbuhan HRV

Sumber: Hausmann, Rodrik dan Velasco (2005), "Growth Diagnostics", Inter-American Development Bank, mimeo

Analisis HRV mengikuti suatu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi hal-hal yang dianggap menghambat pertumbuhan dan investasi dengan menggunakan pohon diagnosa pertumbuhan (Gambar 34). Analisis di mulai dari bagian atas pohon dan kemudian terus ke bawah, berupaya untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang menghambat investasi sektor swasta pada setiap tahap. Setiap cabang mewakili gejala potensial atau 'penyakit' ekonomi yang dapat menjelaskan rendahnya tingkat investasi swasta dan kewiraswastawan. Analisis ini juga mempertanyakan apakah kendala yang membatasi ini disebabkan oleh rendahnya pengembalian investasi untuk kegiatan ekonomi atau tingginya biaya keuangan. Jika kendala yang membatasi ini menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah, apakah masalahnya adalah pendapatan sosial (karena kurangnya faktor pendukung seperti keadaan geografis yang baik, kapasitas modal manusia atau infrastruktur) atau apakah karena kesulitan pihak-pihak swasta untuk memastikan adanya nilai keuntungan kembali dari investasi (akibat kegagalan pemerintah atau pasar)? Jika masalahnya terletak pada tingginya biaya kredit perbankan, apakah itu karena rendahnya tabungan atau sistem keuangan dalam negeri yang buruk dimana fungsi intermediasi tidak berjalan secara efisien? Untuk menunjukkan kendala yang paling membatasi, maka kita harus melalui proses yang iteratif (berulang): diagnosa pertumbuhan itu sendiri.

Catatan: Untuk informasi lebih lanjut mengenai pertumbuhan inklusif, lihat pada situs web Bank Dunia <http://go.worldbank.org/KMA81PV60>

Ada beberapa faktor yang menghambat peningkatan investasi swasta di provinsi Jawa Timur, infrastruktur dan iklim investasi merupakan hambatan terbesar

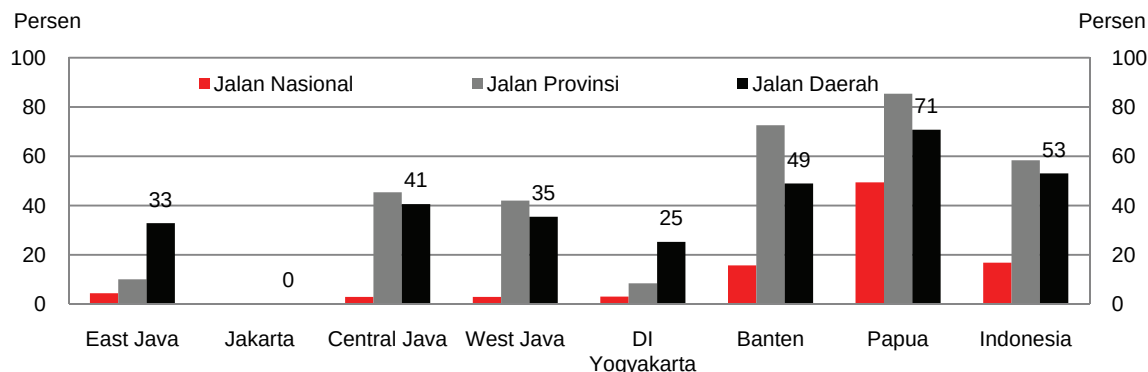
Jenis-jenis infrastruktur yang membatasi operasi usaha adalah jalan-jalan kabupaten, pelabuhan dan listrik

Jawa Timur menawarkan banyak keunggulan ekonomi bagi para investor seperti lokasi geografis yang strategis, memadainya fasilitas kredit, angkatan kerja yang melimpah dengan tingkat upah yang bersaing, tingkat keamanan yang kondusif dan kondisi ekonomi makro yang sehat secara keseluruhan. Akan tetapi, analisis diagnosis pertumbuhan menemukan beberapa hambatan yang membatasi pertumbuhan dan investasi swasta, terutama yang berhubungan dengan infrastruktur dan iklim investasi, yang mengakibatkan rendahnya tingkat pengembalian kepada kegiatan ekonomi. Relatif rendahnya kualitas tenaga kerja juga perlu mendapat perhatian bagi pertumbuhan inklusif, terutama bila kelompok dengan penghasilan yang lebih rendah hendak meningkatkan tingkat pengembalian dan produktivitas mereka.

Seperti pada bagian-bagian lain di negara ini (lihat Triwulanan edisi bulan Juni 2011), lemahnya infrastruktur yang membatasi operasi usaha di Jawa Timur adalah termasuk buruknya kualitas jalan-jalan kabupaten, tidak efisiennya operasi pelabuhan dan masalah kehandalan pasokan tenaga listrik bagi usaha. Buruknya keadaan jalan-jalan kabupaten dibandingkan dengan jaringan jalan-jalan provinsi dan nasional dan kemungkinan terjadinya kemacetan pada pusat-pusat ekonomi utama adalah dua pendorong utama tingginya biaya transportasi, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat pengembalian investasi. Pada tahun 2008, meskipun kondisi jaringan jalan-jalan di Jawa Timur lebih baik daripada daerah-daerah lain di Indonesia, 33 persen dari seluruh jaringan jalan-jalan kabupaten berada pada kondisi yang buruk atau sangat buruk (Jalan-jalan kabupaten juga dalam kondisi yang lebih buruk dibandingkan dengan 10 persen dari jalan provinsi dan 4 persen dari jaringan jalan nasional yang berada dalam kondisi buruk (Gambar 35). Kualitas jalan kabupaten yang buruk bisa menambah biaya transportasi karena mayoritas usaha kecil di sektor manufaktur dan pertanian menggunakan jalan-jalan ini untuk mengangkut produk mereka ke pasar-pasar utama di kota-kota besar. Jalan-jalan ini sering digunakan untuk membawa bahan baku atau bahan perantara untuk diproses lebih lanjut di pusat-pusat industri utama. Penelitian LPEM (2005) menemukan bahwa penyebab utama biaya logistik yang besar di Indonesia adalah biaya logistik bahan baku (dari pemasok ke pengolah), yang menyumbang sebesar 7 persen biaya produksi (atau sekitar 50% dari biaya logistik), hal tersebut meningkatkan biaya input dan terkadang menurunkan ketersediaan barang input. Jalan Kabupaten yang buruk menjadi penyebab utama besarnya jumlah biaya logistik, khususnya dapat menjadi masalah bagi provinsi yang hendak berkompetisi sebagai pusat ekonomi di negara ini.

Fasilitas pelabuhan utama di Jawa Timur juga beroperasi pada kapasitas yang hampir penuh dan masalah kapasitas juga diperparah oleh ketidakefisienan operasi. Kehandalan pasokan tenaga listrik, dan bukannya pasokan daya listrik itu sendiri, juga menjadi suatu masalah bagi sektor swasta di Jawa Timur, terutama karena rendahnya kapasitas jaringan transmisi dan distribusi. Sebagian besar hambatan ini telah diketahui oleh pemerintah provinsi dan daerah kabupaten/kota di Jawa Timur, dan beberapa tindakan perbaikan telah dilaksanakan seperti memperlebar kanal bagi pintu masuk pelabuhan dan juga investasi peralatan dan jaringan tenaga listrik.

Gambar 35: Pada tahun 2008, sepertiga jalan kabupaten/kota di Jawa Timur dalam kondisi buruk dan sangat buruk (bagian dari seluruh jalan di provinsi dalam kondisi buruk dan sangat buruk, persen)



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2008

Rumitnya proses pendaftaran usaha dan persepsi korupsi di pusat ekonomi utama di Jawa Timur merupakan hambatan utama lainnya

Menurut survei “Doing Business” di tahun 2010, pendaftaran usaha di Surabaya (sebagai wakil untuk Jawa Timur) melibatkan lebih banyak prosedur dan berbiaya lebih mahal dibanding banyak kota-kota lain di Indonesia. Sebagai contoh, proses pendaftaran usaha di Surabaya melibatkan 10 prosedur, dibanding 9 di Jakarta dan 8 bagi rata-rata kota di wilayah Asia Timur dan Pasifik. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 10 prosedur (50 hari) juga berada dibelakang kota-kota dengan praktik terbaik, yaitu Bandung dan Yogyakarta (43 hari), tetapi lebih cepat dibanding Jakarta (60 hari). Biaya pendaftaran suatu perusahaan di Surabaya setara dengan 32 persen dari pendapatan per kapita dan termasuk yang tertinggi di Indonesia. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan ijin pembangunan di Surabaya adalah 230 hari. Terdapat persepsi yang kuat akan korupsi di Surabaya, pusat ekonomi utama provinsi tersebut, yang juga akan meningkatkan biaya efektif dan ketidakpastian dalam melakukan usaha.

Ketersediaan tenaga kerja dan biayanya tampaknya bukan merupakan hambatan terhadap investasi yang lebih tinggi di Jawa Timur, terutama pada industri-industri padat karya

Jawa Timur memiliki angkatan kerja tingkat provinsi yang paling besar di Indonesia, dan dapat dianggap sebagai provinsi dengan “surplus tenaga kerja”, terutama bagi industri-industri padat karya yang membutuhkan keterampilan yang rendah. Investasi padat karya dapat memanfaatkan kelompok pekerja dalam jumlah yang besar dengan tingkat keterampilan menengah, yaitu mereka yang setidaknya memiliki pendidikan sekolah menengah. Tingkat pengangguran bagi angkatan kerja dengan pendidikan sekolah menengah ke atas kini berada pada 11.3 persen, yang menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja masih jauh dari jenuh. Jawa Timur juga memiliki salah satu tingkat upah minimum dan rata-rata upah bulanan yang paling rendah dibanding seluruh provinsi-provinsi lain di Indonesia. Nilai upah premium untuk mempekerjakan seorang pekerja trampil juga lebih rendah dibanding sebagian besar daerah di Indonesia, menunjukkan tidak adanya kekurangan tenaga terampil.

....akan tetapi, tingginya proporsi pekerja tanpa keterampilan di dalam angkatan kerja dapat membatasi tingkat inklusif dari pertumbuhan

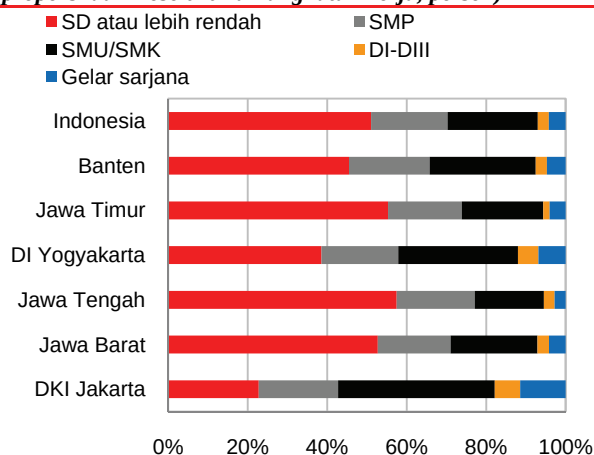
Di tahun 2009, lebih dari setengah (55 persen) dari angkatan kerja di Jawa Timur hanya memiliki pendidikan sekolah dasar atau lebih rendah, termasuk 21 persen dari seluruh angkatan kerja yang tidak pernah mengenyam pendidikan di sekolah atau tidak menyelesaikan sekolah dasar (Gambar 36). Hanya sekitar 6 persen dari angkatan kerja pernah mengenyam pendidikan lanjutan setelah sekolah menengah. Mayoritas tenaga kerja tidak terampil dipekerjakan pada sektor pertanian yang memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Para pekerja di sektor ini mendapatkan upah yang paling rendah. Sekitar 52 persen dari pekerja pertanian berada pada kelompok umur yang lebih tinggi (di atas 40 tahun) dengan sekolah dasar sebagai tingkat pendidikan tertinggi yang pernah dikecap.

...tingginya proporsi tenaga kerja yang tidak terampil dapat disebabkan oleh masih rendahnya akses terhadap pendidikan menengah di banyak daerah

Hambatan utama untuk memiliki lebih banyak angkatan kerja yang lebih terampil adalah rendahnya akses terhadap pendidikan menengah, yang menyebabkan rendahnya capaian pendidikan di provinsi tersebut. Terdapat jurang yang lebar antara kaum berada dan kaum miskin, dan juga antara penduduk pedesaan dan perkotaan dalam hal akses terhadap pendidikan menengah. Akses yang timpang ini dapat disebabkan oleh terbatasnya jumlah sekolah menengah, distribusi sekolah yang tidak merata dan relatif tingginya biaya pendidikan menengah. Di tahun 2009, angka partisipasi murni di Jawa Timur berada pada 95 persen untuk tingkat dasar, 70 persen untuk menengah pertama

Gambar 36: Angkatan kerja per pencapaian pendidikan di tahun 2009

(proporsi dari keseluruhan angkatan kerja, persen)



Catatan: SD adalah sekolah dasar; SMP adalah sekolah menengah pertama; SMU adalah sekolah menengah atas dan SMK adalah sekolah menengah kejuruan; DI-DIII adalah diploma

Sumber: Perhitungan Bank Dunia berdasarkan Sakernas

dan 48 persen bagi tingkat menengah atas. Tren ini serupa dengan angka partisipasi murni di Indonesia, dimana angka partisipasi bagi tingkat menengah pertama dan menengah atas masih jauh dari tingkat universal. Di tingkat kabupaten/kota, banyak kabupaten/kota mencatat angka partisipasi murni sekolah dasar di atas 90 persen. Akan tetapi variasi angka partisipasi yang lebih besar dapat dijumpai pada tingkat menengah pertama. Sebagai contoh, tingkat angka partisipasi rata-rata di Kabupaten Magetan adalah 85 persen, sementara Kabupaten Sampang hanya mencatat 45 persen. Variasi itu akan lebih menyolok pada tingkat menengah atas - Kota Madiun memiliki angka partisipasi dengan rata-rata yang paling tinggi di Jawa Timur pada 80 persen; sementara angka partisipasi menengah atas di Kabupaten Sampang hanyalah 18 persen, yang paling rendah di provinsi tersebut.

Di lain pihak, beberapa faktor tampaknya mendukung pertumbuhan dan investasi swasta di Jawa Timur, seperti pasokan (*supply*), biaya, dan akses terhadap pembiayaan

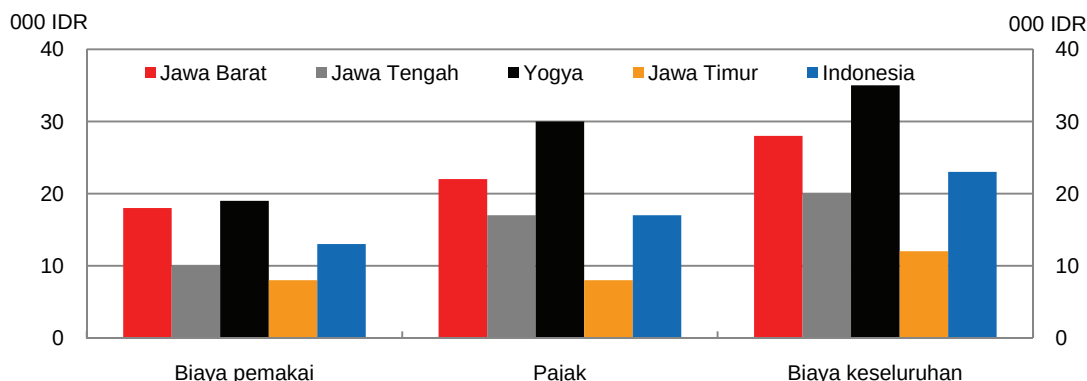
Rasio kredit terhadap PDB di Jawa Timur sedikit lebih rendah dari angka nasional, tetapi hal ini lebih disebabkan oleh kurangnya permintaan dan bukan karena kurangnya penawaran. Dari kredit yang dialokasikan, sebagian besar digunakan untuk investasi dan modal kerja. Tidak ada hubungan antara perubahan suku bunga kredit dan tingkat pertumbuhan di Jawa Timur, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak sensitif terhadap perubahan pada suku bunga, sehingga biaya pinjaman tampaknya bukan merupakan suatu hambatan bagi pertumbuhan. Suku bunga pinjaman di Jawa Timur juga serupa dengan suku bunga rata-rata nasional, yang menunjukkan bahwa bank-bank tidak mengenakan premium biaya pinjaman terhadap risiko usaha yang diketahui. Selain itu, tingginya rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR), rendahnya tingkat kredit macet (NPL) dan ketersediaan bank-bank di Jawa Timur menunjukkan bahwa bank-bank menjalankan fungsi intermediasi keuangan mereka secara memadai. Akan tetapi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tampaknya masih menghadapi tantangan dalam mendapatkan kredit seperti daerah lain di Indonesia karena ketidakmampuan mereka dalam memenuhi persyaratan-persyaratan utama pemberian pinjaman seperti kepemilikan status hukum yang resmi maupun agunan, dan juga menghadapi suku bunga yang lebih tinggi karena lebih tingginya biaya untuk mengelola kredit mikro (termasuk biaya *overhead* yang lebih tinggi, risiko gagal bayar yang lebih besar dan kebutuhan investasi khusus dari pihak bank). Secara keseluruhan, akses terhadap pembiayaan bagi UMKM masih menghadapi masalah, yang membutuhkan dukungan dari Pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan. Beberapa upaya telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah ini seperti misalnya melalui skema kredit khusus yang disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema penjaminan kredit pemerintah provinsi.

Tingkat pajak dan retribusi daerah di Jawa Timur juga tidak secara khusus dianggap sebagai beban yang memberatkan

Tingkat pajak dan retribusi daerah di Jawa Timur cukup rendah dibanding daerah-daerah lain (Gambar 37). Pajak dan retribusi daerah, seperti biaya IMB dan pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur merupakan salah satu yang paling rendah di pulau Jawa dan berada di bawah rata-rata nasional. Selain itu, hanya sebagian kecil dari perusahaan-perusahaan yang diteliti pada beberapa survei iklim investasi, seperti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD, tahun 2007) dan Monitoring Investment Climate in Indonesia (MICI, tahun 2006), menyebutkan bahwa jumlah pajak dan pungutan merupakan sesuatu yang memberatkan.

Gambar 37: Pajak dan Retribusi Daerah relatif rendah di Jawa Timur

(Median Pajak dan Retribusi Daerah yang dibayar oleh perusahaan per tahun per pegawai, tahun 2007, ribuan rupiah)



Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan pada survei KPPOD dan Asia Foundation

c. Pilihan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan inklusif yang lebih tinggi di Jawa Timur

Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan penciptaan iklim investasi yang mendukung sangatlah penting untuk mendorong investasi dan pertumbuhan di Jawa Timur

Kajian diagnostik seperti diuraikan di atas menunjukkan tiga bidang infrastruktur utama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah, yaitu jalan kabupaten, pelabuhan dan jaringan listrik, agar Jawa Timur dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Beberapa upaya sedang dilakukan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur tersebut, seperti rencana untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan dan peningkatan kapasitas tenaga listrik. Penerapan rencana-rencana itu dapat dipercepat dan pemerintah bisa melakukan lebih banyak hal untuk memperbaiki infrastruktur lebih lanjut sebagai contoh, meningkatkan kualitas jalan-jalan kabupaten dengan memberikan alokasi anggaran yang memadai bagi pemeliharaan jaringan jalan atau dengan memberikan insentif kepada kabupaten/kota untuk memelihara jaringan jalan. Untuk menciptakan iklim investasi yang lebih mendukung, akan dibutuhkan, antara lain, penyederhanaan prosedur pendaftaran usaha, pemantauan dan evaluasi kinerja layanan perijinan satu atap di provinsi dan kabupaten/kota, dan meningkatkan profesionalisme dan orientasi usaha pada lembaga-lembaga pemerintahan yang relevan.

Peningkatan tingkat inklusivitas pertumbuhan akan membutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan revitalisasi sektor pertanian

Pemberian akses yang lebih besar bagi pendidikan menengah dapat meningkatkan jumlah pekerja terampil di provinsi Jatim. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan alokasi dana bagi pendidikan menengah dan juga memperluas dan mengoptimalkan sekolah-sekolah kejuruan dan lembaga pendidikan non formal.

Sektor pertanian, yang memiliki produktivitas tenaga kerja yang paling rendah tetapi menyerap bagian pekerja tidak terampil yang paling besar di provinsi Jatim, juga berada di jantung pergerakan menuju pertumbuhan yang inklusif. Untuk menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur, provinsi itu harus memiliki strategi untuk mendukung transisi menuju sektor dengan produktivitas yang lebih tinggi bagi angkatan kerja yang lebih muda, dan juga menempatkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, meningkatkan nilai tambah pertanian, dan mendorong kesempatan kerja pedesaan non pertanian, seperti pada agro industri dan industri kecil pedesaan, bagi mereka yang hanya memiliki lebih sedikit kesempatan (seperti angkatan kerja yang lebih tua dan berpendidikan rendah) untuk masuk ke sektor-sektor non-pertanian.

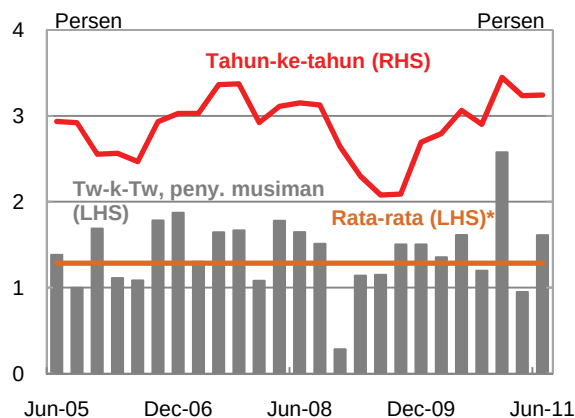
Menghubungkan daerah yang maju dan tertinggal juga dapat membantu mendorong pertumbuhan inklusif di Jawa Timur

Mendorong integrasi daerah-daerah maju dan tertinggal di dalam provinsi Jatim dapat membantu membuka akses kepada masyarakat untuk bergerak menuju kesempatan ekonomi yang lebih baik. Pola pertumbuhan spasial di Jawa Timur menunjukkan keberadaan daerah-daerah yang maju dan tertinggal. Daerah-daerah maju terletak pada daerah pusat Jawa Timur yang termasuk daerah industri seperti Gresik, Kediri, Sidoarjo dan Surabaya. Sementara itu, daerah tertinggal memiliki ciri PDB per kapita yang selalu rendah, terletak pada bagian Selatan provinsi Jatim dan di pulau Madura, seperti Pacitan, Trenggalek, Pamekasan dan Sampang.

Menghubungkan daerah pedesaan ke pasar-pasar dan kota-kota setempat akan memberikan akses terhadap barang-barang dan jasa kepada rumah tangga pada harga yang lebih rendah dan lebih stabil, dan juga memberikan akses kepada pasar dan kesempatan kerja yang lebih besar. Hal itu dapat mendukung aglomerasi dan skala ekonomi. Pola pertumbuhan yang tidak seimbang tidaklah membutuhkan intervensi khusus untuk memindahkan kegiatan ekonomi ke daerah-daerah tertinggal, tetapi pemerintah harus melaksanakan program pembangunan universal atau netral secara spasial, seperti memberikan akses yang lebih baik kepada kesehatan dan pendidikan untuk membantu penduduk daerah tertinggal memanfaatkan dan bergerak ke arah peluang yang lebih baik dan juga membangun infrastruktur penghubung spasial untuk meningkatkan arus barang, uang dan informasi ke pusat-pusat ekonomi. Secara keseluruhan, hanya terdapat sedikit hambatan terhadap pergerakan tenaga kerja dan modal dalam provinsi Jatim. Pembangunan jembatan Suramadu adalah awal yang baik dalam memberikan contoh untuk memperbaiki perhubungan antara daerah-daerah yang tertinggal di pulau Madura dengan pusat ekonomi di Surabaya dan daerah-daerah sekitarnya.

LAMPIRAN: GAMBARAN EKONOMI INDONESIA

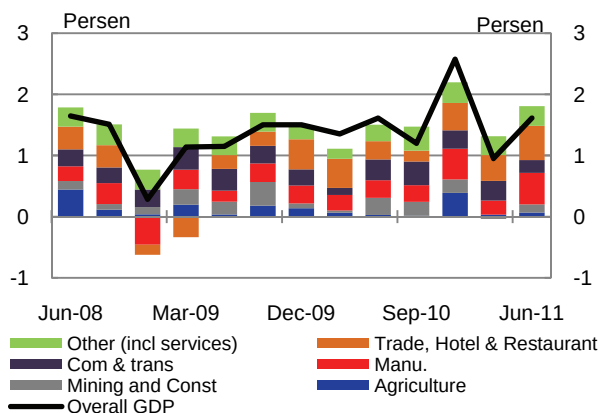
Gambar lampiran 1: Pertumbuhan PDB triwulanan dan tahunan
(persen pertumbuhan)



Catatan: * Rata-rata pertumbuhan Tw-k-Tw sejak Triwulan 2/2001

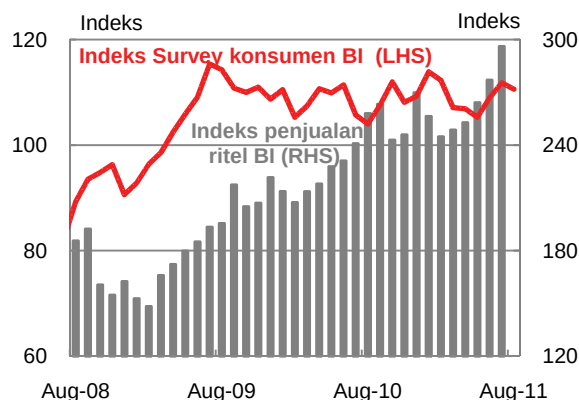
Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia

Gambar lampiran 3: Kontribusi terhadap PDB (sektor)
(pertumbuhan trimulan-ke-triwulan, seasonally adjusted)



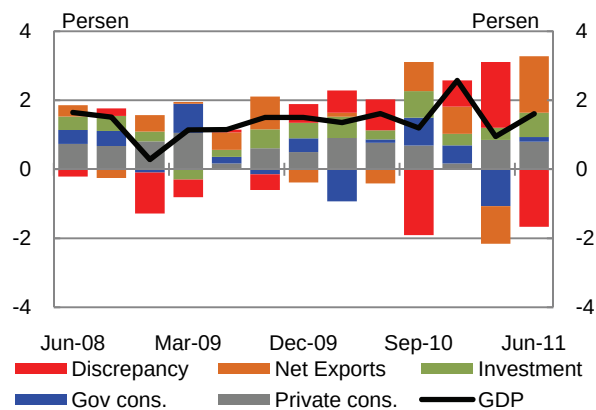
Sumber: BPS via CEIC

Gambar lampiran 5: Indikator konsumen
(indeks)



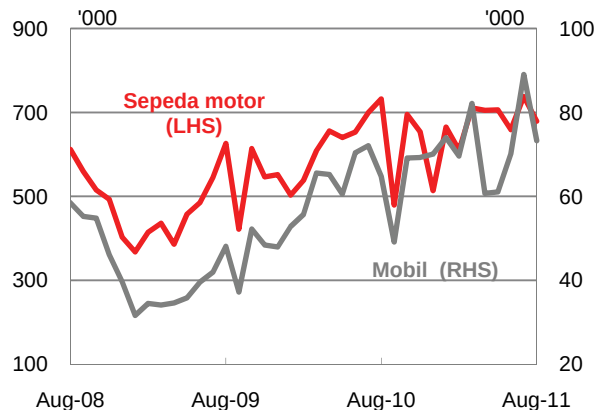
Sumber: BI via CEIC

Gambar lampiran 2: Kontribusi terhadap PDB (pengeluaran)
(pertumbuhan trimulan-ke-triwulan, seasonally adjusted)



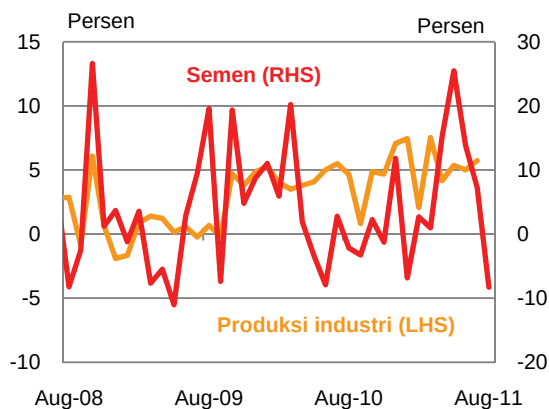
Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia

Gambar lampiran 4: Penjualan sepeda motor dan mobil
(unit)



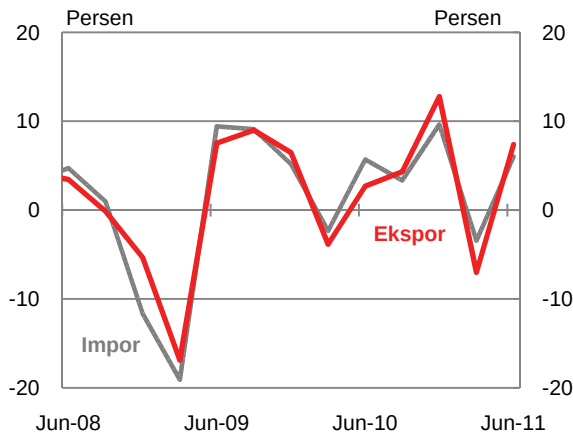
Sumber: CEIC

Gambar lampiran 6: Indikator kegiatan industri
(pertumbuhan tahun-ke-tahun)



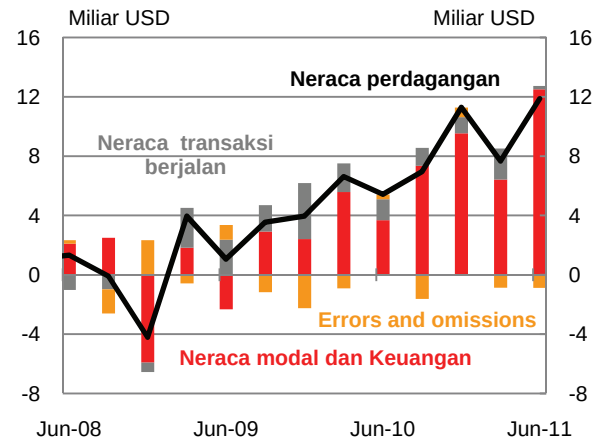
Sumber: CEIC

**Gambar lampiran 7: Aliran perdagangan riil
(pertumbuhan trimulan-ke-triwulan)**



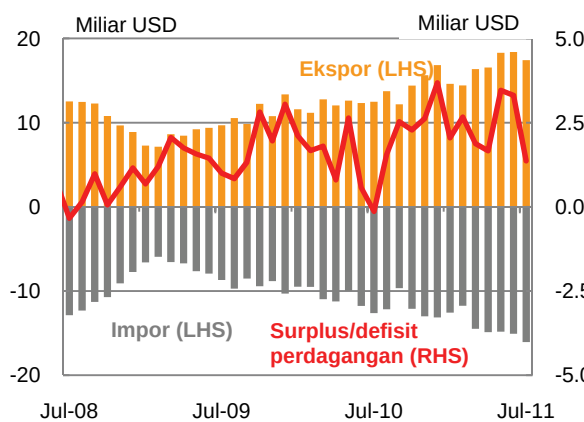
Sumber: CEIC

**Gambar lampiran 8: Neraca pembayaran
(miliar dolar Amerika)**



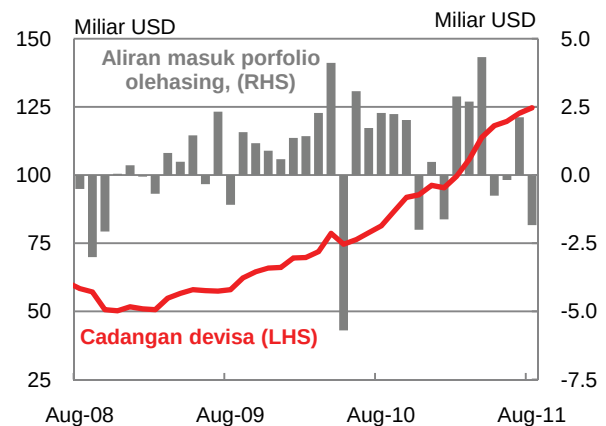
Sumber: BI dan Bank Dunia

**Gambar lampiran 9: Neraca perdagangan
(miliar dolar Amerika)**



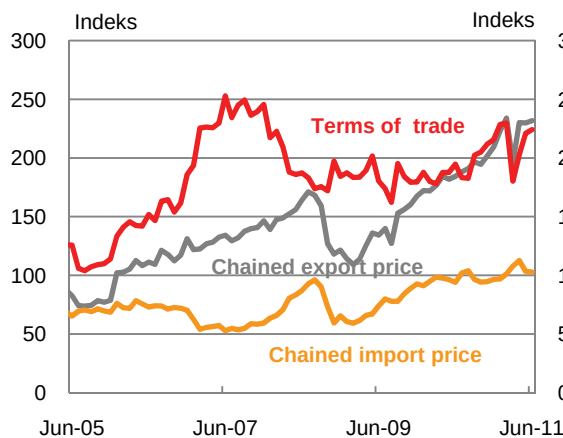
Sumber: BPS dan Bank Dunia

**Gambar lampiran 10: Cadangan devisa dan dana modal asing
(miliar dolar Amerika)**



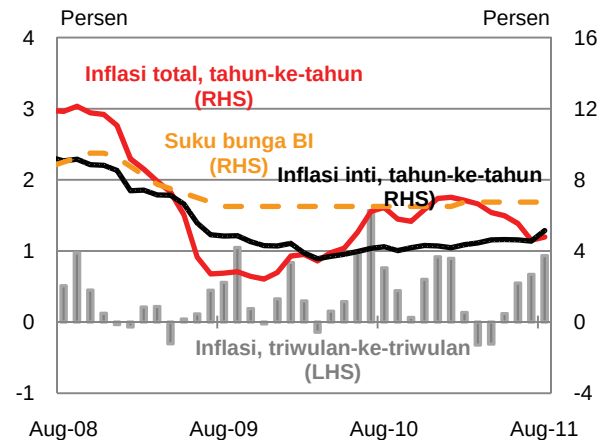
Sumber: BI dan Bank Dunia

**Gambar lampiran 11: Term of trade dan implisit ekspor-impor berdasarkan chained Fisher-Price indices
(indeks 2000=100)**

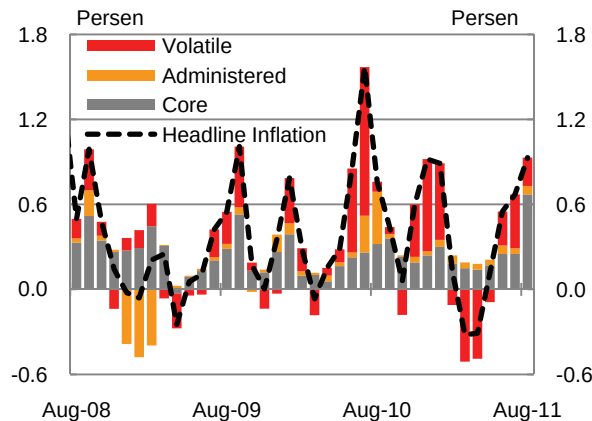


Sumber: BPS dan Bank Dunia

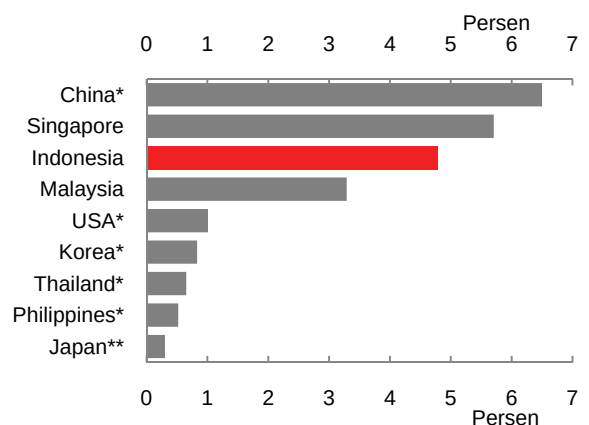
**Gambar lampiran 12: Inflasi dan kebijakan moneter
(pertumbuhan bulan-ke-bulan & tahun-ke-tahun)**



Sumber: BPS dan Bank Dunia

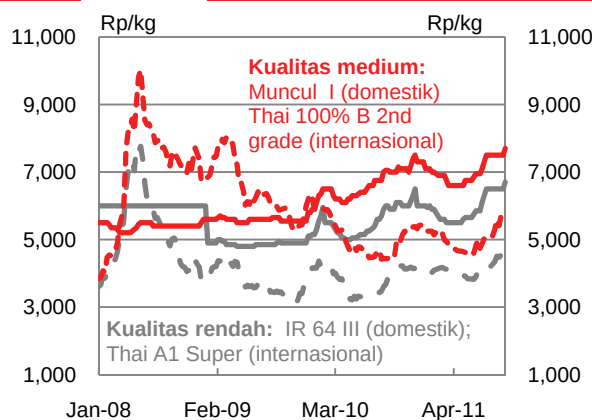
Gambar lampiran 13: Rincian tingkat harga konsumen (persentasi dari kontribusi inflasi bulanan)

Sumbers: BPS dan Bank Dunia

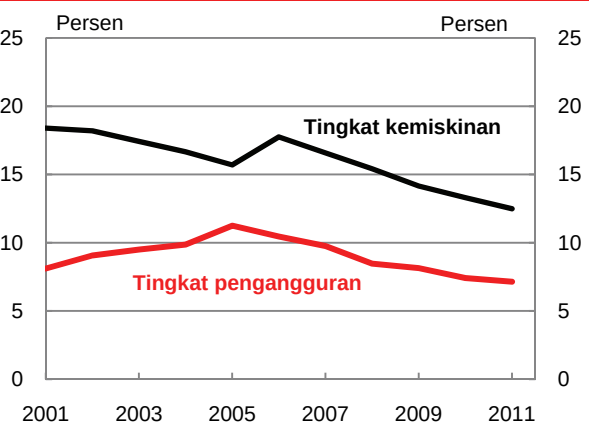
Gambar lampiran 14: Tingkat inflasi negara tetangga (pertumbuhan tahun-ke-tahun, Agustus 2011)

*Juli, dan ** Juni merupakan data terkini

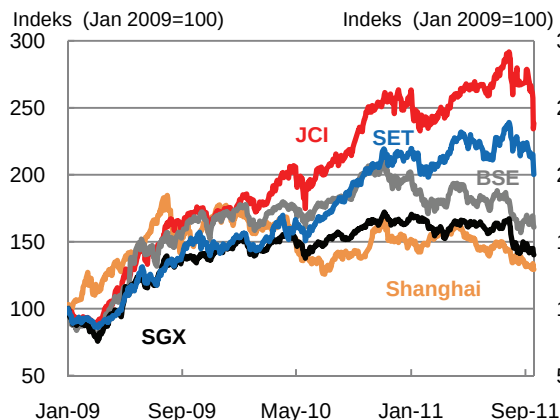
Sumbers: National statistical agencies via CEIC, dan BPS

Gambar lampiran 15: Harga beras domestik dan internasional (Rupiah per kg)

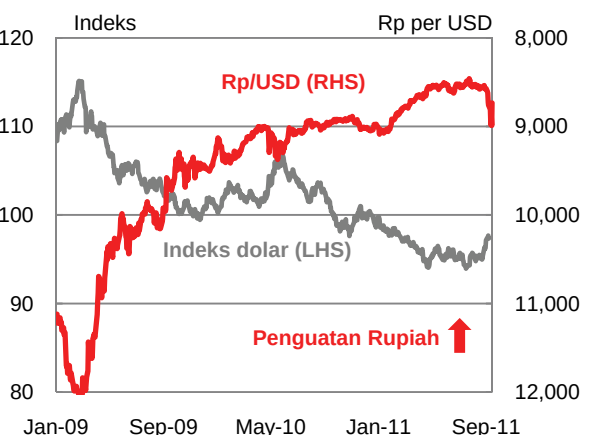
Catatan: Titik-titik adalah harga beras Thailand (cif)
Garis adalah harga beras domestic tingkat grosir
Sumbers: PIBC, FAO dan Bank Dunia

Gambar lampiran 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran (data tahunan, persen)

Catatan: Data tenaga kerja dari Sakernas Pebruari
Sumber: BPS, dan Bank Dunia

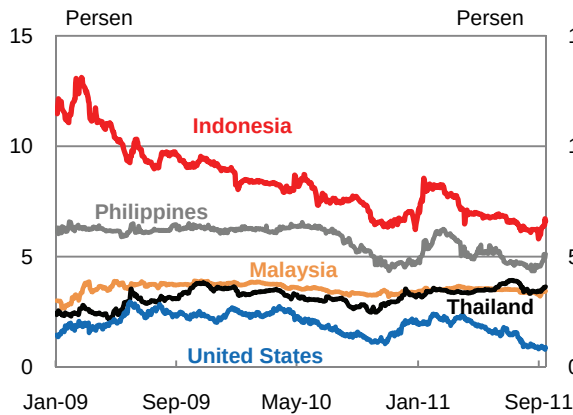
Gambar lampiran 17: Indeks saham regional (indeks harian)

Sumber: Bank Dunia dan CEIC

Gambar lampiran 18: Indeks spot dolar dan rupiah (indeks dan tingkat harga harian)

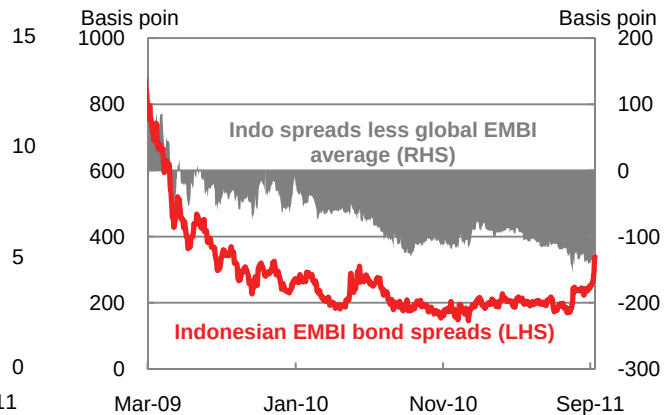
Sumber: Bank Dunia dan CEIC

Gambar lampiran 19: Yield obligasi pemerintah 5 tahunan mata uang lokal (persen, harian)



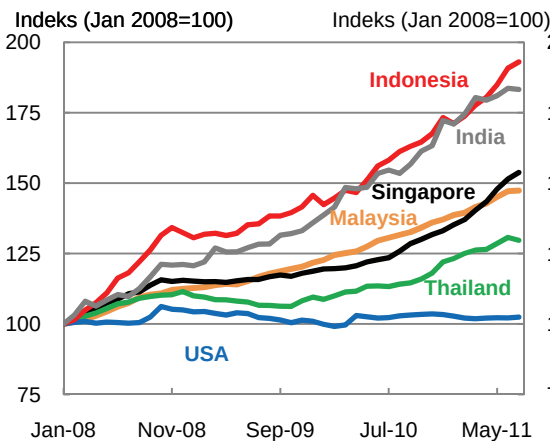
Sumber: Bank Dunia

Gambar lampiran 20: Spread EMBI obligasi pemerintah dengan obligasi dollar Amerika (basis poin, harian)



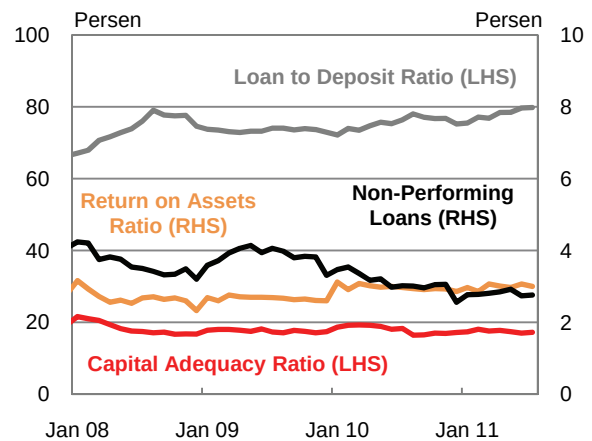
Sumber: Bank Dunia dan CEIC

Gambar lampiran 21: Tingkat kredit bank umum (indeks, bulanan Jan 2008=100)



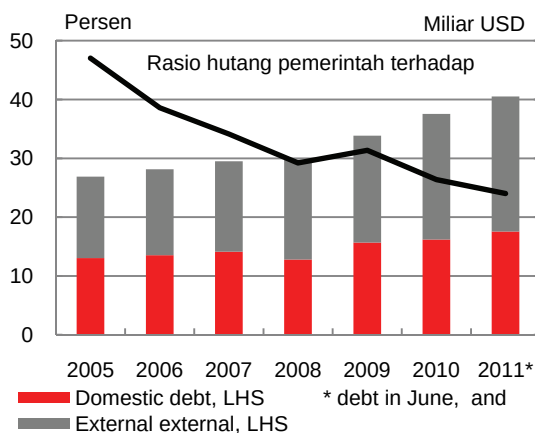
Sumber: CEIC dan Bank Dunia

Gambar lampiran 22: Indikator keuangan sektor perbankan (bulanan, persen)



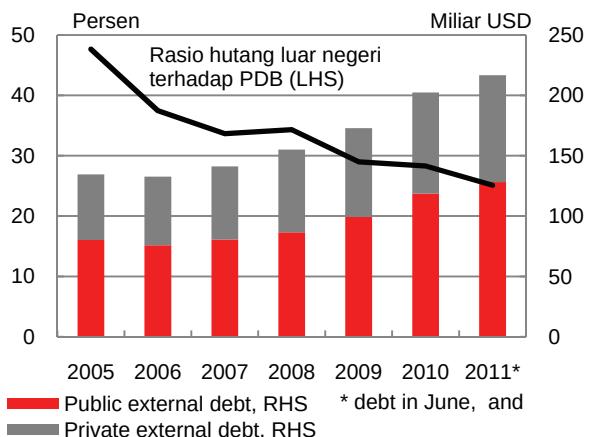
Sumber: BI dan Bank Dunia

Gambar lampiran 23: Hutang pemerintah (persentasi dari PDB; miliar dolar)



Sumber: BI dan Bank Dunia

Gambar lampiran 24: Hutang luar negeri (persentasi dari PDB; miliar dolar)



Sumber: BI dan Bank Dunia

**Tabel lampiran 1: Realisasi dan estimasi anggaran belanja pemerintah
(Triliun rupiah)**

	2008	2009	2010	2011 (p)	2011 (p)	2011 (p)	2011 (p)	2012 (p)
	Outcome	Outcome	Outcome	Budget	Revised Budget	WB June estimates*	WB Sept estimates*	Proposed Budget
A. State revenue and grants	981.6	848.8	1,014.0	1,104.9	1,169.8	1,189.4	1,185.8	1,292.9
1. Tax revenue	658.7	619.9	744.1	850.3	878.6	858.6	857.1	1,019.3
a. Domestic tax	622.4	601.3	715.2	827.2	831.7	813.3	801.5	976.9
i. Income tax	327.5	317.6	356.6	420.5	431.9	432.3	419.7	512.8
- Oil and gas	77.0	50.0	58.9	55.6	65.2	77.0	65.4	58.7
- Non oil and gas	250.5	267.5	297.7	364.9	366.7	355.3	354.4	454.2
2. Non-tax revenue	320.6	227.2	267.5	250.9	286.5	330.8	328.7	272.7
<i>o/w natural resources</i>	224.5	139.0	170.1	163.1	192.0	217.9	213.1	172.9
i. Oil and gas	211.6	125.8	152.7	149.3	173.2	197.5	192.8	156.0
ii. Non oil and gas	12.8	12.8	17.3	13.8	18.8	20.4	20.2	16.9
B. Expenditure	985.7	937.4	1,053.5	1,229.6	1,320.8	1,280.3	1,296.7	1,418.5
1. Central government	693.4	628.8	708.7	836.6	908.3	875.7	878.6	954.1
2. Transfers to the regions	292.4	308.6	344.7	393.0	412.5	404.6	418.1	464.4
C. Primary balance	84.3	5.2	48.9	-9.4	-44.4	21.9	-6.8	-2.5
D. SURPLUS / DEFICIT	(4.1)	(88.6)	(39.5)	(124.7)	(151.0)	(90.9)	(111.0)	(125.6)
(percent of GDP)	(0.1)	(1.6)	(0.6)	(1.8)	(2.1)	(1.2)	(1.5)	(1.5)

Catatan: * Untuk penghitungan proyeksi PDB nominal, Bank Dunia menggunakan metoda perhitungan perkiraan penerimaan yang berbeda dengan perhitungan pemerintah (penjelasan lengkap lihat bagian C pada IEQ Juni 2011)
Sumber: Depkeu dan Bank Dunia

**Tabel lampiran 2: Neraca Pembayaran
(Miliar USD)**

	2008	2009	2010	2009		2010			2011		
				Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
Balance of Payments	-1.9	12.5	30.3	3.5	4.0	6.6	5.4	7.0	11.3	7.7	11.9
<i>Percent of GDP</i>	-0.4	2.3	4.3	2.4	2.6	4.1	3.1	3.7	6.1	3.9	5.6
Current Account	0.1	10.6	5.6	1.8	3.8	1.9	1.4	1.2	1.1	2.1	0.2
<i>Percent of GDP</i>	0.0	2.0	0.8	1.2	2.5	1.2	0.8	0.6	0.6	1.1	0.1
Trade Balance	9.9	21.2	21.3	4.7	7.1	4.8	4.6	5.4	6.4	6.4	6.1
Net Income & Current Transfers	-9.8	-10.6	-15.7	-2.9	-3.3	-2.9	-3.2	-4.2	-5.4	-4.3	-5.9
Capital & Financial Accounts	-1.8	4.9	26.2	2.9	2.4	5.6	3.7	7.4	9.5	6.4	12.5
<i>Percent of GDP</i>	-0.4	0.9	3.7	2.0	1.6	3.5	2.1	4.0	5.1	3.3	5.9
Direct Investment	3.4	2.6	10.7	0.6	0.8	2.5	2.3	1.7	4.2	3.0	2.7
Portfolio Investment	1.8	10.3	13.2	3.0	3.5	6.2	1.1	4.5	1.4	3.8	5.7
Other Investment	-7.3	-8.2	2.2	-0.7	-1.9	-3.1	0.3	1.2	3.8	-0.4	4.1
Errors & Omissions	-0.2	-3.0	-1.6	-1.2	-2.2	-0.9	0.3	-1.6	0.6	-0.9	-0.9
Foreign Reserves*	51.6	66.1	96.2	62.3	66.1	71.8	76.3	86.6	96.2	105.7	119.7

Catatan: * Cadangan devisa pada akhir periode
Sumber: BI and BPS



Investing in Indonesia's Institutions
for Inclusive and Sustainable Development

